

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.1. Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused management*) di mana perumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai.

Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat dari pemerintah daerah dalam menciptakan nilai tambah (*added value*) bagi para pemangku kepentingan pembangunan daerah. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab bagaimana tahap-tahap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dengan batas waktu tertentu. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab lebih dari 1 (satu) sasaran pembangunan dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pencapaian target sasaran.

Untuk mencapai suatu sasaran pembangunan, rumusan strategi diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selanjutnya strategi yang dipilih akan dijadikan sebagai Prioritas Pembangunan Jangka Menengah dan arah kebijakan dijadikan dasar Prioritas Pembangunan Tahunan.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Tegal tahun 2019-2024, rumusan strategi ditentukan melalui:

- 1) Mengkaji sasaran pembangunan lima tahunan;
- 2) Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
- 3) Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh daerah (khususnya pemerintahan daerah);
- 4) Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan yang diselaraskan dengan permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah dan nasional;
- 5) Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi;
- 6) Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memperhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran RPJMD.

Berdasarkan rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam kertas kerja yang telah dikembangkan, strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Tegal adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah Jangka
Menengah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024

VISI: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia					
No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Strategi
I	MISI I: Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat				
1	Mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan budaya antikorupsi dalam pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Penguatan Integritas Pemerintahan berbasis TIK
				Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	
			Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja	Nilai SAKIP Kabupaten	
			Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK	
			Meningkatnya Kualitas Manajemen Kepegawaian Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	
II	MISI II: Memperkuat daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur yang andal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan				
2	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berwawasan Lingkungan	Indeks Infrastruktur Wilayah Mantap berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Infrastruktur Wilayah dan Permukiman yang Mantap	Persentase Infrastruktur Pekerjaan Umum yang mantap	Percepatan pemerataan infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah yang berwawasan lingkungan
			Meningkatnya Sistem Jaringan / Konektivitas Perhubungan	Rasio Konektivitas Kabupaten	
			Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	
III	MISI III: Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan				
3	Mewujudkan Perekonomian Rakyat yang Kuat Berbasis Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Produktifitas Sektor Pertanian	Laju PDRB Sektor Pertanian	Pemulihan dan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal berkelanjutan
			Meningkatnya Produktifitas di Sektor Industri Pengolahan	Laju PDRB Sektor Industri	
			Meningkatnya Produktifitas Pariwisata	Rasio PAD Sektor Pariwisata	

VISI: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia					
No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Strategi
				terhadap PAD Kabupaten	
			Meningkatnya Produktifitas di Sektor Perdagangan	Laju PDRB Sektor Perdagangan	
IV	MISI IV: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi				
4	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan	Penguatan kualitas dan Produktifitas SDM serta Pengarusutamaan gender
			Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	
			Meningkatnya Pemberdayaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	
			Meningkatnya Produktifitas Pemuda	Jumlah Wirausaha Muda Pemula berbasis Kinerja Bisnis	
5	Menekan laju kemiskinan	Persentase penduduk miskin	Menurunnya Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Penguatan ekonomi warga miskin dan rentan miskin dampak covid-19
			Menekan Laju Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	Perluasan Lapangan Kerja dan Transformasi Tenaga Kerja
V	MISI V: Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal				
6	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan	Meningkatnya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Ditegakkan	Presentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditegakkan	Penguatan kondusivitas wilayah, kualitas mitigasi dan penanggulangan bencana serta pelestarian budaya dan kearifan lokal
7	Menurunnya Resiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	Meningkatnya kapasitas daerah dalam menurunkan resiko bencana	Indeks Kapasitas Daerah	
8	Meningkatkan Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan	Persentase Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Meningkatnya Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan	Persentase Seni dan Kesenian yang dilestarikan	

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

Adapun penjelasan masing-masing rumusan strategi pembangunan jangka menengah diatas adalah sebagai berikut:

6. 1.1 Rumusan Strategi Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Adapun penjelasan masing-masing rumusan strategi pembangunan jangka menengah adalah sebagai berikut:

a. Penguatan Integritas Pemerintahan berbasis TIK

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan integritas adalah salah satu hal yang sangat penting. Upaya penguatan integritas dimaksud antara lain melalui penanaman pemahaman bahwa mewujudkan proses layanan yang cepat, mudah dan transparan serta bebas dari KKN saat ini bukan lagi sekadar kewajiban namun telah menjelma menjadi suatu kebutuhan bagi suatu unit organisasi yang memiliki tugas dan fungsi layanan.

Dalam penguatan integritas, selururuh aspek perlu dikuatkan tersebut meliputi Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Aspek Manajemen Perubahan bertujuan untuk mengubah pola pikir dan budaya kerja individu untuk menjadi lebih berintegritas. Aspek Penataan Tata Laksana menitikberatkan pada efektivitas dan efisiensi sistem dalam layanan, prosedur kerja dibuat secara jelas, tepat dan cepat. Aspek Penataan Sistem Manajemen SDM bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN). Aspek Penguatan Akuntabilitas merupakan perwujudan tanggung jawab instansi dalam pelaksanaan program yang telah ditetapkan. Terakhir adalah Aspek Peningkatan Kualitas Layanan Publik yang merupakan upaya dalam meningkatkan pelayanan publik melalui inovasi.

Yang menjadi penekanan dalam penguatan integritas pemerintahan adalah bagaimana bisa *smart* dalam berpemerintahan. Penguatan seluruh aspek integritas harus bermuatan *Smart*. Oleh karena itu pemanfaatan TIK menjadi salah satu prasyarat akselerasi penguatan integritas ini.

b. Percepatan Pemerataan Infrastruktur Dasar dan Aksesibilitas Wilayah Yang Berwawasan Lingkungan

Strategi ini menekankan pada 2 (dua) komponen utama yaitu komponen percepatan pemerataan infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah; dan komponen peningkatan kesehatan lingkungan hidup. Adapun penjelasan masing-masing komponen sebagai berikut:

b. 1. Percepatan pemerataan infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah

Infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah menjadi satu kesatuan yang mempunyai peranan yang penting dalam pengembangan suatu wilayah. Pemerataan infrastruktur dasar difokuskan pada pemerataan pelayanan lingkungan permukiman yang layak, pemenuhan sarana air bersih serta jaringan jalan sebagai salah satu penunjang aksesibilitas wilayah. Aksesibilitas wilayah yang dimaksud adalah kemampuan atau keadaan suatu wilayah untuk dapat diakses oleh pihak luar baik secara langsung atau tidak langsung. Aksesibilitas yang baik akan melancarkan interaksi masyarakat antar wilayah sehingga terjadi pemerataan pembangunan. Aksesibilitas tersebut terdiri dari prasarana (sistem jaringan jalan) yang ada beserta ketersediaan sarana untuk melakukan pergerakannya. Oleh karena itu pemerataan aksesibilitas menekankan pada dua

hal penting yaitu layanan jaringan jalan dan transportasi (perhubungan) yang baik secara menyeluruh hingga pelosok pedesaan.

b. 2. Peningkatan kesehatan lingkungan hidup

Kesehatan lingkungan menjadi kunci kelancaran berbagai aktifitas pembangunan. Peningkatan kesehatan lingkungan di Kabupaten Tegal menekankan pada 3 (tiga) aspek yaitu Aspek jenis pencemaran, stakeholders, dan kewilayahan. Aspek jenis pencemaran menekankan pada upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan baik pencemaran air, udara, maupun tanah atau lingkungan permukiman baik itu berupa limbah padat, limbah cair, maupun limbah gas. Aspek stakeholder menekankan pada penciptaan keterlibatan masyarakat dalam menyehatkan lingkungan khususnya dalam pengelolaan sampah. Dalam mewujudkan **Semboyan Merdeka Sampah**, partisipasi dan persepsi/paradigma masyarakat mulai dibangun dari yang sebelumnya sebatas mengumpulkan sampah menjadi proaktif dalam pengelolaan sampah hulu-hilir baik melalui manajemen bank sampah atau melalui konsep 3 R (*Reuse, Recycle, Reduce*) sebelum menuju Tempat Pengelolaan Akhir Sampah (TPAS). Adapun aspek kewilayahan menekankan pada prioritas wilayah yang perlu segera ditangani baik itu yang sifatnya administratif maupun kawasan.

c. Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Berbasis Sumberdaya Lokal **Berkelanjutan**

Strategi ini menekankan pada 4 (empat) komponen utama dengan tetap menekankan pada aspek keberlanjutan yaitu komponen Percepatan transformasi dan hilirisasi sektor pertanian dan ketahanan pangan **berkelanjutan**; Pemulihan dan hilirisasi Industri Lokal dan Iklim investasi **berkelanjutan**; Pemulihan dan pengembangan Kolaborasi usaha pariwisata era tatanan baru **berkelanjutan**; dan Pecepatan transformasi Perdagangan, Koperasi dan UKM Era tatanan baru **berkelanjutan**. Adapun penjelasan masing-masing komponen sebagai berikut:

c. 1. Percepatan Transformasi Dan Hilirisasi Sektor Pertanian dan Ketahanan Pangan Berkelanjutan

Meskipun pertanian menjadi salah satu sektor basis di Kabupaten Tegal, namun sektor ini belum mampu memberikan kesejahteraan pada petani. Oleh karena itu transformasi dan hilirasi sektor pertanian menjadi poin penting. Aspek tranformasi menekankan pada efektifitas dan produktivitas pertanian. Transformasi ini tidak hanya sebatas mekanisasi (alat) namun juga cara/teknik yang produktif dan ramah lingkungan. Petani harus mengenal dan mampu menggunakan teknologi serta mampu berinovasi dan mencoba sesuatu teknik bertani yang baru yang lebih produktif dan ramah lingkungan. Mekanisasi dilakukan dengan fasilitasi alat dan mesin pertanian, serta pelatihan dan pendampingannya. Sementara penumbuhkembangan teknologi dan inovasi dilakukan dengan menjalankan penelitian, pengkajian dan pengembangan yang adaptif dan menjawab kebutuhan di lapangan. Setelah itu paradigma pertanian akan digeser agar bisa menguasai hulu-hilir. Karena itu penguasaan pengolahan dan pemasaran produk pertanian menjadi faktor penting dalam strategi hilirisasi sektor pertanian. Disisi yang lain, sektor pertanian sangat terkait dengan kemampuan daerah dalam mewujudkan kemandirian pangan. Permasalahan kemandirian pangan secara umum ialah bahwa masyarakat terlalu tergantung

pada suatu jenis pangan tertentu dan kurang variatif. Oleh karena itu strategi kemandirian pangan ditekankan selain pada peningkatan produksi pertanian tanaman pangan dan diversifikasi pangan masyarakat.

c. 2. Pemulihan dan Hilirisasi Industri Lokal dan Iklim Investasi Berkelanjutan

Industri merupakan sektor yang cukup parah terdampak covid-19 di Kabupaten Tegal. Dengan pemulihan sektor industri yang merupakan sektor basis dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian Kabupaten Tegal. Pemulihan dilakukan melalui serangkain fasilitasi / stimulus usaha industri dari industri skala kecil hingga industri skala besar. Sedangkan untuk pengembangannya dilakukan melalui hilirisasi industri. Hilirisasi bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dari bahan baku sekaligus untuk menarik investasi. Sasaran utamanya adalah industri pengolahan logam agar bisa menghasilkan produk yang lebih variatif dan bernilai tambah. Untuk itu fasilitasi kerjasama yang berbentuk *supply-demand* dengan perusahaan besar perlu diwujudkan. Selain industri konvensional, industri kreatif juga menjadi penekanan strategi ini. Berbagai bentuk industri kreatif bisa dikembangkan. Untuk itu fasilitasi pelatihan, permodalan, dan iklim usaha yang kondusif menjadi poin yang penting. Dalam pemulihan dan pengembangan industri tersebut yang tetap diperhatikan ialah terkait aspek keberlanjutannya yang memuat aspek lingkungan dan kontinuitas usaha industri lokal.

c. 3. Pemulihan dan Pengembangan Kolaborasi Usaha Pariwisata Era Tatanan Baru Berkelanjutan

Dalam kondisi sektor pariwisata yang sedang tertekan akibat covid-19, maka berbagai usaha pariwisata perlu dipulihkan. Pariwisata bisa pulih jika kunjungan wisatawan mulai normal bahkan meningkat. Untuk itu daya tarik wisata harus ditingkatkan melalui pengembangan obyek dan destinasi wisata yang telah ada maupun menciptakan obyek dan destinasi wisata baru, pemasaran daya tarik obyek dan destinasi wisata yang lebih efektif, serta mengembangkan pariwisata kreatif. Untuk memperkuat produktifitas sektor pariwisata, diperlukan juga kolaborasi pariwisata dengan seni-budaya dan sejarah lokal. Untuk menyakinkan wisatawan akan keamanan obyek dan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Tegal, maka protokol kesehatan kedepan harus menjadi bagian wajib setiap aktifitas usaha pariwisata. Selain itu konsep pengembangan pariwisata berbasis lingkungan perlu jadi dasar dan dikembangkan sehingga dapat berjalan seiringan antara peningkatan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

c. 4. Percepatan Transformasi Perdagangan, Koperasi dan UKM Era Tatanan Baru Berkelanjutan

Sektor Perdagangan dan UKM merupakan sektor yang cukup terimbas dampak covid-19 di Kabupaten Tegal. Dengan segala pembatasan sosial yang ada telah merusak jejaring *supply* dan *demand* seluruh aktifitas perdagangan dan UKM di Kabupaten Tegal. Rusaknya jejaring tersebutlah yang kemudian merusak rantai produksi hingga pemasaran pada setiap aktifitas perdagangan dan UKM yang ada. Untuk menyambung kembali jejaring *supply-demand* tersebut, transformasi ekonomi digital pada aktifitas perdagangan dan UKM mutlak menjadi suatu kebutuhan. Setiap pelaku perdagangan dan UKM harus bergegas bertransformasi masuk ke digitalisasi perdagangan dan UKM. Untuk itu Proses transisi transformasi tersebut harus didukung dan diakselerasi oleh sistem yang tepat. Disamping itu

fungsi koperasi dalam mendukung transformasi khususnya aspek permodalan harus lebih efektif dan proaktif. Sistem koperasi tidak boleh lagi sama dengan kondisi sebelumnya. Proses pengajuan modal harus bisa diakses dari mana saja dengan syarat yang lebih mudah namun valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain transformasi diatas, pelaku perdagangan dan UKM juga harus terbiasa dalam menerapkan protokol kesehatan disetiap aktifitasnya. Setidaknya untuk meyakinkan konsumen akan keamanan bertransaksi agar geliat ekonomi perdagangan dan UKM mulai tumbuh kembali secara bertahap dan berkelanjutan.

d. Penguatan Kualitas dan Produktifitas SDM serta Pengarusutamaan gender

Strategi ini menekankan pada 4 (empat) komponen utama yaitu komponen Penguatan mutu dan transformasi pendidikan era tatanan baru; Penguatan mutu dan transformasi layanan kesehatan era tatanan baru; Percepatan pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup keluarga berencana; dan Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Wirausaha Muda dan Olahraga. Adapun penjelasan masing-masing komponen sebagai berikut:

d. 1. Penguatan Mutu dan Transformasi Pendidikan Era Tatanan Baru

Pendidikan menjadi kunci kualitas SDM suatu wilayah. Semakin tinggi mutu layanan pendidikan maka akan menghasilkan SDM yang berkualitas pula. Di era pandemi ini, pendidikan mendapatkan tantangan yang begitu besar. Dinamika buka tutup sekolah menjadi wajar di Kabupaten Tegal. Sementara belajar jarak jauh juga belum ditemukan konsep dan bentuk yang paling efektif dan ideal. Kondisi ini membuat mutu layanan pendidikan menjadi tidak terjamin. Untuk itu pendidikan juga harus mampu beradaptasi dan bertransformasi dengan kondisi saat ini. Tidak boleh hanya pembelajaran tatap muka saja yang bisa dijamin kualitasnya, namun jika sewaktu-waktu diperlukan pembelajaran jarak-jauh tetap dijamin kualitasnya. Untuk itu harus dikonsep format pendidikan yang non- tatap muka yang lebih efektif dan berkualitas. Belajar jarak jauh memang masih banyak kekurangan di sana-sini. Namun untukantisipasi kejadian serupa di masa depan, maka harus ada evaluasi untuk menemukan format dan konsep belajar yang paling efektif diberbagai keadaan. Setidaknya dalam aspek ini harus menekankan pada beberapa poin penting, yaitu:

- 1) Tenaga pendidikan dan kependidikan harus kompeten dan mampu menjamin mutu pendidikan baik sistem tatap muka maupun non-tatap muka;
- 2) Protokol kesehatan akan menjadi syarat berlangsungnya belajar mengajar dalam situasi apapun;
- 3) Seluruh peserta didik harus dapat mengakses layanan pendidikan khususnya dalam format non-tatap muka;
- 4) Sistem pembelajaran non-tatap muka harus menjadi salah satu opsi konsep yang baku, bukan hanya konsep sementara;
- 5) Sarana dan prasarana pendukung transformasi pendidikan harus terpenuhi secara bertahap.

d. 2. Penguatan Mutu dan Transformasi Layanan Kesehatan Era Tatanan Baru

Pandemi covid-19 di Kabupaten Tegal dapat mencerminkan kesiapan sektor kesehatan dalam menghadapi wabah. Dengan jumlah kasus covid-19 yang bisa dibilang masih bertambah, menunjukkan bahwa sektor kesehatan di Kabupaten Tegal masih kurang optimal dalam menghadapi pandemi. Bahkan fasilitas kesehatan telah menjadi salah satu tempat infeksi covid-19. Untuk itu mutu

standard pelayanan kesehatan harus ditingkatkan. Protokol kesehatan harus wajib diberlakukan disetiap layanan fasilitas kesehatan. Kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan harus terus ditingkatkan. Hal yang tidak kalah penting, transformasi layanan digital kesehatan harus mulai dikembangkan di Kabupaten Tegal. Saat era digital sekarang ini, komunikasi dan konsultasi pasien dan dokter tidak boleh terbatas oleh ruang bahkan waktu. Untuk itu layanan kesehatan online harus menjadi salah satu penekanan strategi sektor kesehatan kedepan.

d. 3. Percepatan Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga Berencana

Ukuran keadilan saat ini mulai berkembang dan mengarah berdasarkan gender. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan semua kelompok masyarakat (laki-laki, perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya) dapat terlibat dalam proses dan merasakan hasil pembangunan di Kabupaten Tegal. Untuk mendukung akselerasi pengarusutamaan gender, pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender. Untuk melaksanakan hal tersebut maka ada beberapa hal yang perlu dikuatkan terlebih dahulu antara lain ketersediaan data perencanaan yang terpilah gender dan kelembagaan yang khususnya meliputi organisasi hingga sumberdaya manusianya. Jika data dan kelembagaan sudah kuat maka kebijakan pangarusutamaan gender dapat terlaksana dengan baik hingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Mengingat masih terbatasnya sumberdaya yang ada, untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan gender yang berkualitas maka tingkat kelahiran penduduk khususnya keluarga miskin perlu dikendalikan,

d. 4. Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Wirausaha Muda dan Olahraga

Dalam kondisi pandemi seperti ini, banyak tenaga kerja asal Kabupaten Tegal di PHK. Bisa menjadi suatu keniscayaan bahwa tingkat penyerapan tenaga kerja pasca krisis tidak akan sebanding dengan jumlah tenaga kerja yang telah di-PHK. Dengan kata lain *supply* tenaga kerja jauh melebihi *demand* tenaga kerja itu sendiri. Adapun persaingan lapangan kerja kedepan hampir dipastikan semakin tinggi. Oleh karena itu alternatif sektor lapangan kerja informal harus lebih dikuatkan. Masyarakat harus mampu melangkah untuk menciptakan lapangan kerjanya sendiri. Berbagai peluang wirausaha harus mampu diambil sesuai dengan kondisi dan potensinya masing-masing. Untuk itu langkah awal yang harus dilakukan ialah untuk memunculkan minat wirausaha masyarakat terutama yang terdampak covid-19. Jika minat wirausaha sudah berkembang kemudian dilanjutkan dengan fasilitasi dan pendampingan mulai dari permodalan, pelatihan dan pemasaran. Wirausaha yang terbentuk harus tetap didampingi hingga produktif dan mandiri. Selain itu sebagai pendukung penciptaan produktifitas pemuda dan kesehatan masyarakat, maka pembudayaan olah raga di masyarakat perlu diwujudkan dengan dukungan berbagai sarana dan prasarana pendukungnya

e. Penguatan Ekonomi Warga Miskin dan Rentan Miskin Dampak Covid-19

Pandemi covid-19 telah memunculkan kemiskinan baru. Dalam kondisi yang serba sulit ini, cukup sulit untuk mengakselerasi penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Tegal. Untuk itu strategi kemiskinan saat ini ialah untuk menekan laju kemiskinan yang cukup cepat. Berbagai kebijakan harus fokus pada pemberian layanan kebutuhan

hidup dasar warga miskin sekaligus menjaga warga rentan miskin agar tidak jatuh dalam kemiskinan. Oleh karena itu berbagai layanan sosial, perlindungan dan jaminan sosial harus mampu meng-*cover* tidak hanya warga miskin namun juga warga rentan miskin hingga keadaan normal kembali. Bersamaan itu pemberdayaan ekonomi keluarga miskin dan rentan miskin juga perlu ditingkatkan. Sebagai pendukung gotong royong ekonomi perlu dibudayakan. Setidaknya hingga sikap saling bantu ekonomi khususnya kepada keluarga miskin muncul dan berkembang di kehidupan masyarakat.

f. Perluasan Lapangan Kerja dan Transformasi Tenaga Kerja

Tantangan tenaga kerja akibat pandemi covid-19 di Kabupaten Tegal cukup besar. Kedepan landscape dan standar kualifikasi tenaga kerja mulai berubah. Untuk itu transformasi tenaga kerja di Kabupaten Tegal harus mampu menciptakan tenaga kerja dengan kualifikasi yang tinggi. Tenaga kerja harus dibentuk agar memiliki 10 *soft skill* era Revolusi Industri Generasi Keempat dan memiliki *hard skill* penguasaan teknologi. Penguasaan teknologi menjadi sangat penting mengingat lapangan usaha yang berkembang di era pascapandemi adalah usaha yang berhubungan dengan teknologi. Selain sentuhan pada sisi *supply*, strategi kebijakan tenaga kerja juga harus menyentuh sisi *demand*. Dalam artian sisi lapangan kerja perlu diperluas. Berbagai kerjasama perluasan lapangan kerja harus menjadi prioritas dari sisi *demand*. Daya tarik dan kemudahan investasi yang mampu membuka lapangan kerja perlu ditingkatkan. Untuk itu strategi kebijakannya harus menekankan pada aspek proaktif untuk menarik investasi masuk sebesar-besarnya khususnya investasi yang dapat membuka lapangan kerja.

g. Penguatan Kondusivitas Wilayah, Kualitas Mitigasi dan Penanggulangan Bencana Serta Pelestarian Budaya Dan Kearifan Lokal

Strategi ini menekankan pada 3 (tiga) komponen utama yaitu Penguatan kerukunan dan toleransi di masyarakat; Penguatan kualitas mitigasi dan penanggulangan bencana; dan Optimalisasi Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal. Adapun penjelasan masing-masing komponen sebagai berikut:

g. 1. Penguatan Kerukunan dan Toleransi di Masyarakat

Untuk menjamin kelancaran berbagai aktifitas pembangunan di Kabupaten Tegal, kondusivitas wilayah harus terjaga. Kerukunan dan toleransi dimasyarakat perlu dikuatkan. Di era pandemi maupun pascapandemi, potensi gesekan dimasyarakat bisa cukup nyata. Pembatasan aktifitas tidak terkecuali aktifitas keagamaan dapat memunculkan friksi dimasyarakat. Selain itu dengan melemahnya ekonomi masyarakat, banyaknya pengangguran, serta terbatasnya lapangan pekerjaan dapat meningkatkan kriminalitas. Untuk itu penguatan kelembagaan dan komunikasi FKUB perlu diperkuat. Selain itu, untuk meningkatkan keamanan dimasyarakat secara umum, seluruh stakeholder harus terlibat didalamnya. Bentuk kesadaran bahwa keamanan dan kenyamanan hidup merupakan tanggung jawab bersama harus mulai muncul di masyarakat. Berbagai potensi gangguan keamanan harus dapat dideteksi secara dini agar tidak berkembang. Untuk itu perlu didukung sarana, prasarana dan SDM pendukung keamanan yang cukup dan kuat.

g. 2. Penguatan Kualitas Mitigasi dan Penanggulangan Bencana

Kabupaten Tegal mempunyai potensi bencana yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Risiko kebakaran, tanah longsong, banjir, gempa, gunung merapi, kekeringan menjadi jenis bencana yang cukup serius jika tidak diantisipasi. Mitigasi risiko bencana Kabupaten Tegal harus dilakukan sedini mungkin. Bersamaan dengan itu kualitas penganggulangan bencana harus ditingkatkan. Respon dan penanganan saat terjadi bencana maupun pasca bencana juga harus ditingkatkan kalitasnya. Untuk itu peran serta masyarakat dibarengi dengan peningkatan kapasitas relawan terlatih dalam penyelenggaraan kebencanaan menjadi salah satu kunci penting keberhasilan selain kerjasama yang baik antara BPNB, BPBD Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Sekitar dengan mengoptimalkan ases sumberdaya yang ada. Selain itu ketersediaan sarana dan prasarana pendukung menjadi syarat utama yang mendukung kualitas mitigasi dan penanggulangan bencana di Kabupaten Tegal.

g. 3. Optimalisasi Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal

Kabupaten Tegal mempunyai kekayaan budaya dan kearifan lokal yang harus dilestarikan. Tidak hanya bermanfaat secara ekonomi, kekayaan budaya dan kearifan lokal juga mampu membendung pengaruh buruk budaya luar yang semakin cepat masuk di era globalisasi dengan kemajuan teknologi saat ini. Untuk itu budaya dan kearifan lokal harus dikenalkan dan diajarkan sejak dini mulai dari lingkungan sekolah. Berbagai even-even seni budaya lokal perlu diselenggarakan untuk lebih mengenalkan budaya dan kearifan lokal dimasyarakat. Untuk itu konsep pelestarian budaya dan kearifan lokal tidak hanya sebatas menyimpan dalam suatu tempat seperti museum, namun lebih dari itu pelestarian budaya dan kearifan lokal harus disimpan dalam setiap diri masyarakat Kabupaten Tegal.

6. 1.2 Strategi Pengarusutamaan dalam Pembangunan

Pembangunan di Kabupaten Tegal didesain melakukan pengarusutamaan (*mainstreaming*) dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Pengarusutamaan (*mainstreaming*) merupakan upaya untuk menjadikan isu-isu pengarusutamaan sebagai perspektif, sebagai cara pandang dan cara bertindak dalam melaksanakan pembangunan. Program dan kegiatan dalam pengarusutamaan (*mainstreaming*) tidak harus selalu eksplisit memuat nomenklatur isu-isu pengarusutamaan (*mainstreaming*) namun dapat secara implisit mendukung terwujudnya isu-isu pengarusutamaan (*mainstreaming*). Isu-isu pengarusutamaan dalam pembangunan di Kabupaten Tegal yaitu:

a. Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pengarusutamaan Gender (PUG) didesain sebagai perspektif untuk mewujudkan pembangunan yang responsif gender. Pembangunan yang responsif gender memberi ruang yang cukup bagi konstruksi gender laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan akses, partisipasi, pengawasan dan manfaat dalam pembangunan. Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam program dan kegiatan ditindaklanjuti dalam bentuk Gender *Analisis Pathway* (GAP), Gender *Budget Statement* (GBS) sebagai lampiran RKA. RKA merupakan dokumen operasional Renstra dan Renja.

b. Pengarusutamaan penanggulangan masalah gizi (*stunting*).

Pengarusutamaan penanggulangan masalah gizi dilakukan melalui intervensi yang bersifat spesifik gizi (penanggulangan langsung kepada kelompok sasaran penanggulangan masalah gizi/*stunting* yaitu remaja putri, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu melahirkan/nifas, ibu menyusui, ibu yang memiliki baduta dan balita) maupun penanggulangan sensitif gizi (program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, sosial hingga sanitasi dasar) yang ditindaklanjuti dengan rencana aksi konvergensi *stunting* sebagai penjabaran Renstra dan Renja. Perangkat Daerah yang terlibat aktif dalam pengarusutamaan penanggulangan masalah gizi (*stunting*) terutama Dinkes (Kesehatan Ibu dan Anak, Kesehatan Lingkungan, Promosi Kesehatan); Dis Ketahanan Pangan dan Pertanian (Ketahanan Pangan dan Produksi Pangan berkelanjutan); DP3AP2KB (Keluarga Sejahtera); Disdikbud (PAUD); Disperkim (Sanitasi); DLH (Sanitasi); Dispermades (Kebijakan Desa); Bappeda dan Litbang (Aksi Konvergensi *Stunting*) DPUPR (infrastruktur, sanitasi); Dinsos (kemiskinan, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial); DKP (perikanan); Disperinaker (perindustrian, tenaga kerja); Disdakop UKM (Perdagangan, koperasi, UMKM).

c. Pengarusutamaan inovasi

Kebijakan, program, kegiatan atau aktifitas pembangunan yang dilaksanakan didesain dengan menerapkan dengan inovasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Setiap Perangkat Daerah diharapkan dapat mendesain inovasi-inovasi sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi serta program dan kegiatan yang diimplementasikan. Agar inovasi yang ditetapkan memiliki daya ungkit dan dampak pembangunan yang memadai, inovasi didesain melalui pemenuhan instrumen yang sesuai dengan kriteria kelengkapan dan kematangan inovasi daerah. Kriteria kelengkapan dan kematangan inovasi didesain sebagai upaya mewujudkan peningkatan daya saing daerah.

d. Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan merupakan implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) maupun pembangunan berkelanjutan dalam arti yang lebih luas diantaranya Pengurangan Risiko Bencana (PRB), kependudukan, lingkungan hidup, pendidikan, kesehatan hingga kesejahteraan sosial. Perspektif pembangunan berkelanjutan mewarnai perencanaan program, kegiatan dan aktifitas Perangkat Daerah yang diturunkan ke dalam Renstra dan Renja.

e. Pengarusutamaan keberpihakan kepada kelompok inklusi

Kelompok inklusi merupakan anggota masyarakat yang memiliki karakteristik khas dan seringkali berada pada posisi yang marjinal dalam pembangunan. Kelompok inklusi ini antara lain difabel, lansia, pemuda, masyarakat miskin/tertinggal, pemuda, perempuan dan anak serta kelompok inklusi lain yang masih marjinal. Dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program, kegiatan dan aktifitas Perangkat Daerah didesain dengan perspektif memuliakan kelompok inklusi dalam membuka ruang akses, peran, kontrol dan manfaat dalam pembangunan.

f. Pengarusutamaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi perspektif dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dalam kebijakan, rencana, program urusan-urusan wajib pelayanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, permukiman rakyat, sosial, serta ketentraman dan ketertiban umum. Integrasi SPM dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah diterapkan melalui penetapan indikator kinerja SPM sebagai indikator kinerja *outcome* program pembangunan. Komitmen pengarusutamaan SPM diimplementasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan di dalam Renstra dan Renja.

g. Pengarusutamaan Mitigasi Risiko

Mitigasi risiko pembangunan merupakan salah satu sistem agar reformasi birokrasi dapat berjalan dengan baik. Mitigasi risiko pembangunan merupakan tugas melekat pada masing-masing Perangkat Daerah. Dalam melakukan mitigasi risiko dilakukan identifikasi potensi risiko dalam Register Risiko. Register Risiko merupakan identifikasi potensi risiko yang paling mungkin terjadi atau kebijakan rencana program yang memiliki risiko paling tinggi. Dari Register Risiko disusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP). RTP disusun dengan memperhatikan Lingkungan pengendalian; Penilaian risiko; Kegiatan pengendalian; Informasi dan komunikasi serta Pemantauan pengendalian intern.

6. 2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan RPJMD dijadikan dasar dalam menentukan tahapan dan prioritas secara bertahap yang mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya sebagai suatu rangkaian dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran RPJMD. Untuk itu maka analisis permasalahan dan isu-isu strategis kewilayahan juga menjadi basis utama rumusan arah kebijakan pembangunan untuk memberikan prioritas pembangunan. Selanjutnya, tema dan arah kebijakan yang telah dirumuskan harus dipedomani bersama seluruh OPD yang terlibat di dalamnya.

Perumusan strategi dan arah kebijakan harus mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Sebagaimana didalam Permendagri nomor 86 tahun 2017 bahwa perumusan strategi merupakan pemecahan masalah pokok dan arah kebijakan merupakan pemecahan permasalahan penyebab dari suatu masalah pokok, maka keduanya harus punya benang merah yang jelas.

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Tegal tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.2
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024

No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Strategi	Arah Kebijakan
I	MISI I: Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat					
1	Mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan budaya antikorupsi dalam pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkatnya Kualitas Manajemen Kepegawaian Daerah	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai SAKIP Kabupaten Opini BPK Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Penguatan Integritas Pemerintahan berbasis TIK	Penguatan kualitas layanan pemerintahan dan efektifitas pembangunan yang inovatif dan berbasis TIK
II	MISI II: Memperkuat daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur yang andal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan					
2	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berwawasan Lingkungan	Indeks Infrastruktur Wilayah Mantap berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Infrastruktur Wilayah dan Permukiman yang Mantap Meningkatnya Sistem Jaringan / Konektivitas Perhubungan Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase Infrastruktur Pekerjaan Umum yang mantap Rasio Konektivitas Kabupaten Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Percepatan pemerataan infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah yang berwawasan lingkungan	Perluasan akses infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah serta Peningkatan kualitas lingkungan hidup
III	MISI III: Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan					
3	Mewujudkan Perekonomian Rakyat yang Kuat Berbasis	Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Produktifitas Sektor Pertanian	Laju PDRB Sektor Pertanian	Pemulihan dan transformasi ekonomi	Pemulihan dan transformasi sektor pertanian, perdagangan,

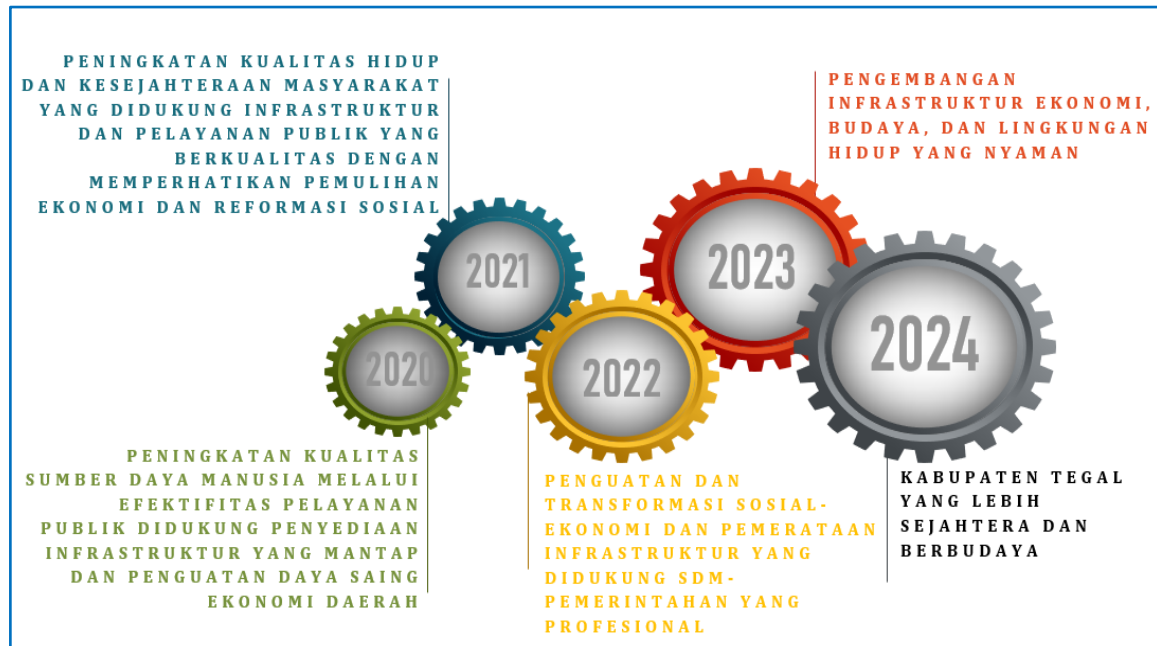
No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Strategi	Arah Kebijakan
	Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Meningkatnya Produktifitas di Sektor Industri Pengolahan	Laju PDRB Sektor Industri	berbasis sumberdaya lokal Berkelanjutan	industri, Koperasi dan UKM, pariwisata dan iklim investasi ramah lingkungan
			Meningkatnya Produktifitas Pariwisata	Rasio PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten		
			Meningkatnya Produktifitas di Sektor Perdagangan	Laju PDRB Sektor Perdagangan		
IV	MISI IV: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi					
4	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan	Penguatan kualitas dan Produktifitas SDM serta Pengarusutamaan gender	Penguatan mutu dan transformasi pendidikan dan kesehatan era tatanan baru
			Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan		Peningkatan produktifitas pemuda dan olah raga berbasis gender
			Meningkatnya Pemberdayaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		
			Meningkatnya Produktifitas Pemuda	Jumlah Wirausaha Muda Pemula berbasis Kinerja Bisnis		
5	Menekan laju kemiskinan	Persentase penduduk miskin	Menurunnya Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Penguatan ekonomi warga miskin dan rentan miskin dampak covid-19	Peningkatan kualitas layanan perlindungan dan Jaminan sosial serta Pemberdayaan ekonomi warga miskin dan rentan miskin

No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Strategi	Arah Kebijakan
			Menekan Laju Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	Perluasan Lapangan Kerja dan Transformasi Tenaga Kerja	Peningkatan Kompetensi Angkatan Kerja dan Akselerasi Investasi untuk Perluasan Lapangan Kerja
V	MISI V: Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal					
6	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan	Meningkatnya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Ditegakkan	Presentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditegakkan	Penguatan kondusivitas wilayah, kualitas mitigasi dan penanggulangan bencana serta pelestarian budaya dan kearifan lokal	Peningkatan kualitas keamanan dan nyaman hidup masyarakat
7	Menurunnya Resiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	Meningkatnya kapasitas daerah dalam menurunkan resiko bencana	Indeks Kapasitas Daerah		
8	Meningkatkan Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan	Persentase Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Meningkatnya Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan	Persentase Seni dan Kesenian yang dilestarikan		Optimalisasi Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa arah kebijakan harus dapat memecahkan masalah dari suatu masalah pokok, maka perlu disusun suatu tahapan pelaksanaan arah kebijakan yang telah dirumuskan. Tahapan ini yang kemudian menjadi prioritas RKPD pada tahun berkenaan. Untuk memberikan arah pembangunan yang jelas, maka perlu juga disusun fokus atau tema pembangunan tahunan sebagai dasar menentukan prioritas arah kebijakan tahunan yang dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar 6. 1
Tema Tahunan Pembangunan Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal
Tahun 2019-2024



Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

Adapun penjelasan masing-masing tema adalah sebagai berikut:

a. Arah Kebijakan Tahun Pertama (2020)

Tema pembangunan Kabupaten Tegal pada tahun 2020 adalah **“PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI EFEKTIFITAS PELAYANAN PUBLIK DIDUKUNG PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR YANG MANTAP DAN PENGUATAN DAYA SAING EKONOMI DAERAH”**. Berdasarkan tema tersebut arah kebijakan difokuskan pada pembangunan pondasi SDM yang berkualitas sebagai dasar. Sebagai penunjangnya maka secara bersamaan kualitas dan efektifitas pelayanan publik juga ditingkatkan tidak terkecuali pemerataan layanan infrastruktur kepada seluruh lapisan masyarakat. Selain itu daya saing ekonomi daerah juga dikuatkan terutama potensi ekonomi lokal yang basis maupun yang berpotensi sebagai sektor basis ekonomi kedepan. Berdasarkan hal tersebut maka prioritas kebijakan tahun 2020 antara lain:

- 1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial
- 2) Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran

- 3) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta peningkatan kualitas pelayanan publik
- 4) Peningkatan infrastruktur dan pengembangan wilayah yang berwawasan lingkungan
- 5) Peningkatan daya saing ekonomi lokal, ketahanan pangan dan pengembangan industri kreatif
- 6) Pengembangan potensi pariwisata dan penumbuhan destinasi wisata desa

b. Arah Kebijakan Tahun Kedua (2021)

Tema pembangunan Kabupaten Tegal pada tahun 2021 adalah **“PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG DIDUKUNG INFRASTRUKTUR DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS DENGAN MEMPERHATIKAN PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMASI SOSIAL”**.

Berdasarkan tema tersebut arah kebijakan mempunyai empat penekanan yaitu pemulihan, layanan dasar, layanan publik dan transformasi/reformasi sosial. Kebijakan pemulihan diarahkan agar daya beli masyarakat meningkat dan investasi dapat berkembang untuk membuka lapangan kerja. Untuk memperkuat konsumsi / daya beli masyarakat khususnya golongan masyarakat miskin dan rentan miskin maka akselerasi belanja bantuan sosial serta modifikasi belanja perlindungan sosial perlu diperkuat efektifitasnya. Bersamaan ini juga diharapkan masyarakat kelas menengah keatas juga bisa melakukan *recovery*. Untuk memulihkan ekonomi dalam lingkup yang lebih besar, maka arus investasi harus dapat ditarik sebanyak mungkin. Untuk itu kebutuhan infrastruktur dasar dan penggerak investasi harus disiapkan. Layanan dasar perlu diperkuat khususnya kesehatan sebagai langkah preventif, antisipatif dan solutif atas suatu dinamika kasus covid-19 di Kabupaten Tegal.

Kebijakan transformasi / reformasi sosial menekankan pada adaptasi *tatanan baru* pada seluruh aspek kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Untuk itu protokol kesehatan dan implementasi teknologi informasi menjadi poin utama. *Start up* bisnis, wirausaha khususnya yang berkaitan dengan industri kreatif menjadi salah satu ukuran transformasi ekonomi ini. Dan untuk mendukung itu semua perlu dibarengi dengan peningkatan kualitas layanan publik.

Adapun prioritas kebijakan tahun 2021 antara lain:

- 1) Penguatan kualitas layanan pemerintahan dan efektifitas pembangunan yang inovatif dan berbasis TIK; fokus kebijakan pada:**
 - a) Percepatan difusi TIK pada seluruh aspek pemerintahan
 - b) Perbaikan dan penataan sistem pelayanan prima kepada masyarakat
 - c) Peningkatan partisipasi dan integrasi perencanaan dan penganggaran
 - d) Difusi produk kelitbangan dalam pembangunan yang inovatif
 - e) Peningkatan Pengawasan, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - f) Penguatan kapasitas ASN dan penerapan merit sistem
- 2) Perluasan akses infrastruktur dasar dan konektifitas wilayah serta Peningkatan kualitas lingkungan hidup; fokus kebijakan pada:**
 - a) Percepatan pemerataan infrastruktur wilayah
 - b) Penataan ruang kota dan permukiman

- 3) **Pemulihan dan transformasi sektor pertanian, perdagangan, industri, Koperasi dan UKM, pariwisata dan iklim investasi ramah lingkungan;** fokus kebijakan pada:
 - a) Penyiapan dan Pengembangan sektor perikanan kreatif **ramah lingkungan**
 - b) Penyiapan dan Pengembangan Sektor Pertanian kreatif Meliputi Tanaman Pangan Holtikultura, Perkebunan dan Peternakan **ramah lingkungan**
 - c) Penyehatan dan pengembangan industri pengolahan dan industri kreatif **ramah lingkungan**
 - d) Pengembangan SDM pariwisata kreatif
 - e) Penguatan Fungsi Pasar Tradisional Era tatanan baru
 - f) Perlindungan Konsumen dan Pengendalian stabilitas harga
 - g) Pengembangan layanan dan sistem perdagangan digital
 - h) Penyehatan dan pengembangan koperasi
 - i) Pemulihan dan pengembangan UMKM
 - 4) **Penguatan mutu dan transformasi pendidikan dan kesehatan era tatanan baru;** fokus kebijakan pada:
 - a) Peningkatan akses layanan pendidikan dasar berbasis TIK
 - b) Peningkatan akses layanan kesehatan dasar berbasis TIK
 - c) Peningkatan Upaya Promosi dan Pembudayaan Hidup Sehat Era tatanan baru
 - 5) **Peningkatan produktifitas pemuda dan olah raga berbasis gender;** fokus kebijakan pada:
 - a) Peningkatan Pelayanan Pengarustamaan Gender
 - b) Peningkatan minat dan kapasitas wirausaha muda
 - 6) **Peningkatan kualitas layanan perlindungan dan Jaminan sosial serta Pemberdayaan ekonomi warga miskin dan rentan miskin;** fokus kebijakan pada:
 - a) Peningkatan layanan sosial masyarakat miskin dan rentan miskin
 - b) Perluasan perlindungan dan Jaminan sosial serta Pemberdayaan warga miskin dan rentan miskin
 - 7) **Peningkatan Kompetensi Angkatan Kerja dan Akselerasi Investasi untuk Perluasan Lapangan Kerja;** fokus kebijakan pada:
 - a) Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Angkatan Kerja
 - b) Peningkatan akselerasi kemudahan investasi khususnya yang membuka lapangan kerja
- c. **Arah Kebijakan Tahun Ketiga (2022)**
- Tema pembangunan Kabupaten Tegal pada tahun 2022 adalah **“PENGUATAN DAN TRANSFORMASI SOSIAL - EKONOMI DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR YANG DIDUKUNG SDM-PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL”**. Berdasarkan tema tersebut arah kebijakan difokuskan pada penguatan sosial-ekonomi yang baru pulih akibat dampak covid-19 sekaligus menjadi tindak lanjut dari arah kebijakan tahun sebelumnya. Oleh karena itu berbagai kebijakan tahun 2021 masih mewarnai ditahun 2022 dengan penekanannya pada aspek penguatan. Pembangunan infrastruktur dasar mulai

diakselerasi dan ruang kota mulai ditata dalam kerangka yang berkelanjutan. Untuk mendukung percepatan penguatan transformasi tersebut maka perlu didukung SDM dan tata kelola pemerintah yang baik.

Adapun prioritas kebijakan tahun 2022 antara lain:

- 1) Penguatan kualitas layanan pemerintahan dan efektifitas pembangunan yang inovatif dan berbasis TIK; fokus kebijakan pada:**
 - a) Percepatan difusi TIK pada seluruh aspek pemerintahan
 - b) Perbaikan dan penataan sistem pelayanan prima kepada masyarakat
 - c) Peningkatan partisipasi dan integrasi perencanaan dan penganggaran
 - d) Difusi produk kelitbangan dalam pembangunan yang inovatif
 - e) Peningkatan Pengawasan, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - f) Penguatan kapasitas ASN dan penerapan merit sistem
- 2) Perluasan akses infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah serta Peningkatan kualitas lingkungan hidup; fokus kebijakan pada:**
 - a) Percepatan pemerataan infrastruktur wilayah
 - b) Penataan ruang kota dan permukiman
 - c) Peningkatan kualitas pencegahan dan pengelolaan limbah pencemar lingkungan
- 3) Pemulihan dan transformasi sektor pertanian, perdagangan, industri, Koperasi dan UKM, pariwisata dan iklim investasi **ramah lingkungan**; fokus kebijakan pada:**
 - a) Penyiapan dan Pengembangan sektor perikanan kreatif **ramah lingkungan**
 - b) Penyiapan dan Pengembangan Sektor Pertanian kreatif Meliputi Tanaman Pangan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan **ramah lingkungan**
 - c) Penguatan dan diversifikasi pangan
 - d) Penyehatan dan pengembangan industri pengolahan dan industri kreatif **ramah lingkungan**
 - e) Penguatan dan pengembangan destinasi wisata **ramah lingkungan**
 - f) Pengembangan SDM pariwisata kreatif
 - g) Penguatan Fungsi Pasar Tradisional Era tatanan baru
 - h) Pengembangan layanan dan sistem perdagangan digital
 - i) Penyehatan dan pengembangan koperasi
 - j) Pemulihan dan pengembangan UMKM
- 4) Penguatan mutu dan transformasi pendidikan dan kesehatan era tatanan baru; fokus kebijakan pada:**
 - a) Peningkatan akses layanan pendidikan dasar berbasis TIK
 - b) Peningkatan akses layanan kesehatan dasar berbasis TIK
 - c) Peningkatan Upaya Promosi dan Pembudayaan Hidup Sehat Era tatanan baru
- 5) Peningkatan produktifitas pemuda dan olah raga berbasis gender; fokus kebijakan pada:**
 - a) Peningkatan Pelayanan Pengarusutamaan Gender
 - b) Perlindungan dan peningkatan kualitas hidup perempuan, dan anak
 - c) Peningkatan minat dan kapasitas wirausaha muda

- 6) **Peningkatan kualitas layanan perlindungan dan Jaminan sosial serta Pemberdayaan ekonomi warga miskin dan rentan miskin; fokus kebijakan pada:**
 - a) Peningkatan layanan sosial masyarakat miskin dan rentan miskin
 - b) Perluasan perlindungan dan Jaminan sosial serta Pemberdayaan warga miskin dan rentan miskin
 - c) Peningkatan gotong royong ekonomi masyarakat
- 7) **Peningkatan Kompetensi Angkatan Kerja dan Akselerasi Investasi untuk Perluasan Lapangan Kerja; fokus kebijakan pada:**
 - a) Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Angkatan Kerja
 - b) Peningkatan akselerasi kemudahan investasi khususnya yang membuka lapangan kerja

d. Arah Kebijakan Tahun Keempat (2023)

Tema pembangunan Kabupaten Tegal pada tahun 2023 adalah “**PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR EKONOMI, BUDAYA, DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG NYAMAN**”. Berdasarkan tema tersebut arah kebijakan tahun 2023 diarahkan pada aspek penumbuhan dan akselerasi perekonomian wilayah. Berbagai infrastruktur penunjang ekonomi baik skala kecil maupun skala besar perlu dipenuhi kebutuhannya berdasarkan skala prioritas. Pada tahap ini juga pengembangan seni-budaya dikolaborasikan dengan pengembangan sektor pariwisata.

Pembangunan dan pengembangan obyek/destinasi wisata mulai digerakkan khususnya pada aspek pembangunan dan penataan fasilitas dan jasa pariwisata. Untuk mendukung kualitas lingkungan hidup, maka eco-tourism menjadi tema pembangunan pariwisata.

Adapun prioritas kebijakan tahun 2023 antara lain:

- 1) **Penguatan kualitas layanan pemerintahan dan efektifitas pembangunan yang inovatif dan berbasis TIK; fokus kebijakan pada:**
 - a) Perbaikan dan penataan sistem pelayanan prima kepada masyarakat
 - b) Difusi produk kelitbangan dalam pembangunan yang inovatif
 - c) Peningkatan Pengawasan, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - d) Penguatan kapasitas ASN dan penerapan merit sistem
- 2) **Perluasan akses infrastruktur dasar dan konektifitas wilayah serta Peningkatan kualitas lingkungan hidup; fokus kebijakan pada:**
 - a) Percepatan pemerataan infrastruktur wilayah
 - b) Penataan ruang kota dan permukiman
 - c) Peningkatan kualitas layanan dan sarana transportasi
 - d) Peningkatan kualitas pencegahan dan pengelolaan limbah pencemar lingkungan
 - e) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
- 3) **Pemulihan dan transformasi sektor pertanian, perdagangan, industri, Koperasi dan UKM, pariwisata dan iklim investasi **ramah lingkungan**; fokus kebijakan pada:**
 - a) Penyiapan dan Pengembangan sektor perikanan kreatif **ramah lingkungan**

- b) Penyiapan dan Pengembangan Sektor Pertanian kreatif Meliputi Tanaman Pangan Holtikultura, Perkebunan dan Peternakan **ramah lingkungan**
 - c) Penguatan dan diversifikasi pangan
 - d) Penyehatan dan pengembangan industri pengolahan dan industri kreatif **ramah lingkungan**
 - e) penguatan dan pengembangan destinasi wisata **ramah lingkungan**
 - f) Peningkatan efektifitas Pemasaran Wisata
 - g) Pengembangan SDM pariwisata kreatif
 - h) Penguatan Fungsi Pasar Tradisional Era tatanan baru
 - i) Pemulihan dan pengembangan UMKM
- 4) Penguatan mutu dan transformasi pendidikan dan kesehatan era tatanan baru; fokus kebijakan pada:**
- a) Peningkatan akses layanan pendidikan dasar berbasis TIK
 - b) Peningkatan Minat dan Budaya Baca Masyarakat berbasis TIK
 - c) Peningkatan akses layanan kesehatan dasar berbasis TIK
 - d) Peningkatan Upaya Promosi dan Pembudayaan Hidup Sehat Era tatanan baru
- 5) Peningkatan produktifitas pemuda dan olah raga berbasis gender; fokus kebijakan pada:**
- a) Pengendalian kelahiran dan Peningkatan Kualitas Keluarga Berencana
 - b) Peningkatan minat dan kapasitas wirausaha muda
 - c) Peningkatan layanan dan pembinaan olah raga masyarakat
- 6) Peningkatan kualitas layanan perlindungan dan Jaminan sosial serta Pemberdayaan ekonomi warga miskin dan rentan miskin; fokus kebijakan pada:**
- a) Peningkatan layanan sosial masyarakat miskin dan rentan miskin
 - b) Perluasan perlindungan dan Jaminan sosial serta Pemberdayaan warga miskin dan rentan miskin
 - c) Peningkatan gotong royong ekonomi masyarakat
- 7) Peningkatan Kompetensi Angkatan Kerja dan Akselerasi Investasi untuk Perluasan Lapangan Kerja; fokus kebijakan pada:**
- a) Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Angkatan Kerja
 - b) Peningkatan kerjasama ketenagakerjaan
 - c) Peningkatan akselerasi kemudahan investasi khususnya yang membuka lapangan kerja
- 8) Peningkatan kualitas keamanan dan kenyamanan hidup masyarakat; fokus kebijakan pada:**
- a) Penguatan Kebhinekaan dan Penciptaan Ruang Dialog dan kerjasama antar Warga dan umat beragama
 - b) Peningkatan Upaya Penegakan Peraturan Daerah
 - c) Optimalisasi penanganan bencana sesuai standar

9) Optimalisasi Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal; fokus kebijakan pada:

- a) Penguatan Pemahaman Budaya dan kearifan lokal di Lingkungan Sekolah
- b) Pelestarian dan Promosi Seni dan Cagar Budaya

e. Arah Kebijakan Tahun Kelima (2024)

Tema pembangunan Kabupaten Tegal pada tahun 2024 adalah “**KABUPATEN TEGAL YANG LEBIH SEJAHTERA DAN BERBUDAYA**”. Arah kebijakan periode terakhir RPJMD 2019-2024 ini ditujukan untuk memastikan kesejahteraan masyarakat meningkat dibandingkan kondisi sebelum periode RPJMD 2019-2024. Kesejahteraan yang dimaksudkan minimal diukur dari kondisi ekonomi masyarakat yang meningkat, lingkungan yang lebih nyaman baik dari aspek lingkungan hidup maupun keamanan lingkungan bermasyarakat, akses layanan infrastruktur dasar yang lebih baik, serta kuatnya benteng budaya dan kearifan lokal.

Adapun prioritas kebijakan tahun 2024 antara lain:

1) Penguatan kualitas layanan pemerintahan dan efektifitas pembangunan yang inovatif dan berbasis TIK; fokus kebijakan pada:

- a) Perbaikan dan penataan sistem pelayanan prima kepada masyarakat

2) Perluasan akses infrastruktur dasar dan konektifitas wilayah serta Peningkatan kualitas lingkungan hidup; fokus kebijakan pada:

- a) Percepatan pemerataan infrastruktur wilayah
- b) Peningkatan kualitas layanan dan sarana transportasi
- c) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan

3) Pemulihan dan transformasi sektor pertanian, perdagangan, industri, Koperasi dan UKM, pariwisata dan iklim investasi **ramah lingkungan; fokus kebijakan pada:**

- a) Penyiapan dan Pengembangan sektor perikanan kreatif **ramah lingkungan**
- b) Penyiapan dan Pengembangan Sektor Pertanian kreatif Meliputi Tanaman Pangan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan **ramah lingkungan**
- c) penguatan dan pengembangan destinasi wisata **ramah lingkungan**
- d) Peningkatan efektifitas Pemasaran Wisata
- e) Pemulihan dan pengembangan UMKM

4) Penguatan mutu dan transformasi pendidikan dan kesehatan era tatanan baru; fokus kebijakan pada:

- a) Peningkatan akses layanan pendidikan dasar berbasis TIK
- b) Peningkatan Minat dan Budaya Baca Masyarakat berbasis TIK
- c) Peningkatan akses layanan kesehatan dasar berbasis TIK

5) Peningkatan produktifitas pemuda dan olah raga berbasis gender; fokus kebijakan pada:

- a) Peningkatan Pelayanan Pengarustamaan Gender
- b) Perlindungan dan peningkatan kualitas hidup perempuan, dan anak
- c) Pengendalian kelahiran dan Peningkatan Kualitas Keluarga Berencana
- d) Peningkatan minat dan kapasitas wirausaha muda
- e) Peningkatan layanan dan pembinaan olah raga masyarakat

- 6) Peningkatan kualitas layanan perlindungan dan Jaminan sosial serta Pemberdayaan ekonomi warga miskin dan rentan miskin; fokus kebijakan pada:**
 - a) Peningkatan layanan sosial masyarakat miskin dan rentan miskin
 - b) Perluasan perlindungan dan Jaminan sosial serta Pemberdayaan warga miskin dan rentan miskin
- 7) Peningkatan Kompetensi Angkatan Kerja dan Akselerasi Investasi untuk Perluasan Lapangan Kerja; fokus kebijakan pada:**
 - a) Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Angkatan Kerja
 - b) Peningkatan kerjasama ketenagakerjaan
- 8) Peningkatan kualitas keamanan dan kenyamanan hidup masyarakat; fokus kebijakan pada:**
 - a) Penguatan Kebhinekaan dan Penciptaan Ruang Dialog dan kerjasama antar Warga dan umat beragama
 - b) Peningkatan Upaya Penegakan Peraturan Daerah
 - c) Optimalisasi penanganan bencana sesuai standar
- 9) Optimalisasi Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal; fokus kebijakan pada:**
 - a) Penguatan Pemahaman Budaya dan kearifan lokal di Lingkungan Sekolah
 - b) Pelestarian dan Promosi Seni dan Cagar Budaya

Adapun rangkuman prioritas arah kebijakan dan fokus kebijakannya yang kemudian dijadikan pedoman penyusunan prioritas RKPD dapat dilihat pada kedua tabel berikut ini:

Tabel 6.3
Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024

TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
Tema/Fokus: PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI EFEKTIFITAS PELAYANAN PUBLIK DIDUKUNG PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR YANG MANTAP DAN PENGUATAN DAYA SAING EKONOMI DAERAH	Tema/Fokus: PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG DIDUKUNG INFRASTRUKTUR DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS DENGAN MEMPERHATIKAN PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMASI SOSIAL	Tema/Fokus: PENGUATAN DAN TRANSFORMASI SOSIAL-EKONOMI DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR YANG DIDUKUNG SDM PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL	Tema/Fokus: PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR EKONOMI, BUDAYA, DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG NYAMAN	Tema/Fokus: KABUPATEN TEGAL YANG LEBIH SEJAHTERA DAN BERBUDAYA
Arah Kebijakan:	Arah Kebijakan:	Arah Kebijakan:	Arah Kebijakan:	Arah Kebijakan:
1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial	1. Penguatan kualitas layanan pemerintahan dan efektifitas pembangunan yang inovatif dan berbasis TIK	1. Penguatan kualitas layanan pemerintahan dan efektifitas pembangunan yang inovatif dan berbasis TIK	1. Penguatan kualitas layanan pemerintahan dan efektifitas pembangunan yang inovatif dan berbasis TIK	1. Penguatan kualitas layanan pemerintahan dan efektifitas pembangunan yang inovatif dan berbasis TIK
2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran	2. Perluasan akses infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah serta Peningkatan kualitas lingkungan hidup	2. Perluasan akses infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah serta Peningkatan kualitas lingkungan hidup	2. Perluasan akses infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah serta Peningkatan kualitas lingkungan hidup	2. Perluasan akses infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah serta Peningkatan kualitas lingkungan hidup
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta peningkatan kualitas pelayanan publik	3. Pemulihan dan transformasi sektor pertanian, perdagangan, industri, Koperasi dan UKM, pariwisata dan iklim investasi	3. Pemulihan dan transformasi sektor pertanian, perdagangan, industri, Koperasi dan UKM, pariwisata dan iklim investasi ramah lingkungan	3. Pemulihan dan transformasi sektor pertanian, perdagangan, industri, Koperasi dan UKM, pariwisata dan iklim investasi ramah lingkungan	3. Pemulihan dan transformasi sektor pertanian, perdagangan, industri, Koperasi dan UKM, pariwisata dan iklim investasi ramah lingkungan

TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
4. Peningkatan infrastruktur dan pengembangan wilayah yang berwawasan lingkungan	4. Penguatan mutu dan transformasi pendidikan dan kesehatan era tatanan baru	4. Penguatan mutu dan transformasi pendidikan dan kesehatan era tatanan baru	4. Penguatan mutu dan transformasi pendidikan dan kesehatan era tatanan baru	4. Penguatan mutu dan transformasi pendidikan dan kesehatan era tatanan baru
5. Peningkatan daya saing ekonomi lokal, ketahanan pangan dan pengembangan industri kreatif	5. Peningkatan produktifitas pemuda dan olah raga berbasis gender	5. Peningkatan produktifitas pemuda dan olah raga berbasis gender	5. Peningkatan produktifitas pemuda dan olah raga berbasis gender	5. Peningkatan produktifitas pemuda dan olah raga berbasis gender
6. Pengembangan potensi pariwisata dan penumbuhan destinasi wisata desa	6. Peningkatan kualitas layanan perlindungan dan Jaminan sosial serta Pemberdayaan ekonomi warga miskin dan rentan miskin	6. Peningkatan kualitas layanan perlindungan dan Jaminan sosial serta Pemberdayaan ekonomi warga miskin dan rentan miskin	6. Peningkatan kualitas layanan perlindungan dan Jaminan sosial serta Pemberdayaan ekonomi warga miskin dan rentan miskin	6. Peningkatan kualitas layanan perlindungan dan Jaminan sosial serta Pemberdayaan ekonomi warga miskin dan rentan miskin
	7. Peningkatan Kompetensi Angkatan Kerja dan Akselerasi Investasi untuk Perluasan Lapangan Kerja	7. Peningkatan Kompetensi Angkatan Kerja dan Akselerasi Investasi untuk Perluasan Lapangan Kerja	7. Peningkatan Kompetensi Angkatan Kerja dan Akselerasi Investasi untuk Perluasan Lapangan Kerja	7. Peningkatan Kompetensi Angkatan Kerja dan Akselerasi Investasi untuk Perluasan Lapangan Kerja
			8. Peningkatan kualitas keamanan dan kenyamanan hidup masyarakat	8. Peningkatan kualitas keamanan dan kenyamanan hidup masyarakat
			9. Optimalisasi Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal	9. Optimalisasi Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

Tabel 6.4
Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dan Fokus Kebijakan Tahunan RPJMD
Kabupaten Tegal Tahun 2021-2024

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	2021	2022	2023	2024
MISI 1: Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat								
Mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan budaya antikorupsi dalam pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Penguatan Integritas Pemerintahan berbasis TIK	Penguatan kualitas layanan pemerintahan dan efektifitas pembangunan yang inovatif dan berbasis TIK	Percepatan difusi TIK pada seluruh aspek pemerintahan	✓	✓		
				Perbaikan dan penataan sistem pelayanan prima kepada masyarakat	✓	✓	✓	✓
	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja			Peningkatan partisipasi dan integrasi perencanaan dan penganggaran	✓	✓		
	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah			Difusi produk kelitbangan dalam pembangunan yang inovatif	✓	✓	✓	
	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kepegawaian Daerah			Peningkatan Pengawasan, Akuntabilitas dan Transparasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	✓	✓	✓	
				Penguatan kapasitas ASN dan penerapan merit sistem	✓	✓	✓	
MISI 2: Memperkuat daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur yang andal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan								
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Infrastruktur Wilayah dan Permukiman yang Mantap	Percepatan pemerataan infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah yang berwawasan lingkungan	Perluasan akses infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah serta Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Percepatan pemerataan infrastruktur wilayah	✓	✓	✓	✓
				Penataan ruang kota dan permukiman	✓	✓	✓	
	Meningkatnya Sistem Jaringan / Konektivitas Perhubungan			Peningkatan kualitas layanan dan sarana transportasi			✓	✓
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup			Peningkatan kualitas pencegahan dan pengelolaan limbah pencemar lingkungan		✓	✓	
				Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan			✓	✓
MISI 3: Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan								
Mewujudkan Perekonomian Rakyat yang Kuat Berbasis Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Produktifitas Sektor Pertanian	Pemulihan dan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya local berkelanjutan	Pemulihan dan transformasi sektor pertanian, perdagangan, industri, Koperasi dan UKM, pariwisata dan iklim investasi ramah lingkungan	Penyiapan dan Pengembangan sektor perikanan kreatif ramah lingkungan	✓	✓	✓	✓
				Penyiapan dan Pengembangan Sektor Pertanian kreatif Meliputi Tanaman Pangan Holtikultura, Perkebunan dan Peternakan ramah lingkungan	✓	✓	✓	✓
				Penguatan dan diversifikasi pangan		✓	✓	
	Meningkatnya Produktifitas di Sektor Industri Pengolahan			Penyehatan dan pengembangan industri pengolahan dan industri kreatif ramah lingkungan	✓	✓	✓	
				penguatan dan pengembangan destinasi wisata ramah lingkungan		✓	✓	✓
	Meningkatnya Produktifitas Pariwisata			Peningkatan efektifitas Pemasaran Wisata			✓	✓
				Pengembangan SDM pariwisata kreatif	✓	✓	✓	
				Penguatan Fungsi Pasar Tradisional Era tatanan baru	✓	✓	✓	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Fokus Kebijakan	2021	2022	2023	2024
				Perlindungan Konsumen dan Pengendalian stabilitas harga	✓			
				Pengembangan layanan dan sistem perdagangan digital	✓	✓		
				Penyehatan dan pengembangan koperasi	✓	✓		
				Pemulihan dan pengembangan UMKM	✓	✓	✓	✓
MISI 4: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi								
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat	Penguatan kualitas dan Produktifitas SDM serta Pengarusutamaan gender	Penguatan mutu dan transformasi pendidikan dan kesehatan era tatanan baru	Peningkatan akses layanan pendidikan dasar berbasis TIK	✓	✓	✓	✓
	Peningkatan Minat dan Budaya Baca Masyarakat berbasis TIK					✓	✓	
	Peningkatan akses layanan kesehatan dasar berbasis TIK			✓	✓	✓	✓	
	Peningkatan Upaya Promosi dan Pembudayaan Hidup Sehat Era tatanan baru			✓	✓	✓		
	Meningkatnya Pemberdayaan Gender	Peningkatan produktifitas pemuda dan olah raga berbasis gender	Peningkatan Pelayanan Pengarusutamaan Gender	✓	✓		✓	
	Meningkatnya Produktifitas Pemuda		Perlindungan dan peningkatan kualitas hidup perempuan, dan anak		✓		✓	
			Pengendalian kelahiran dan Peningkatan Kualitas Keluarga Berencana			✓	✓	
			Peningkatan minat dan kapasitas wirausaha muda	✓	✓	✓	✓	
Peningkatan layanan dan pembinaan olah raga masyarakat				✓	✓			
Menekan laju kemiskinan	Menurunnya Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan	Penguatan ekonomi warga miskin dan rentan miskin dampak covid-19	Peningkatan kualitas layanan perlindungan dan Jaminan sosial serta Pemberdayaan ekonomi warga miskin dan rentan miskin	Peningkatan layanan sosial masyarakat miskin dan rentan miskin	✓	✓	✓	✓
				Perluasan perlindungan dan Jaminan sosial serta Pemberdayaan warga miskin dan rentan miskin	✓	✓	✓	✓
				Peningkatan gotong royong ekonomi masyarakat		✓	✓	
	Menekan Laju Tingkat Pengangguran	Perluasan Lapangan Kerja dan Transformasi Tenaga Kerja	Peningkatan Kompetensi Angkatan Kerja dan Akselerasi Investasi untuk Perluasan Lapangan Kerja	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Angkatan Kerja	✓	✓	✓	✓
				Peningkatan kerjasama ketenagakerjaan			✓	✓
				Peningkatan akselerasi kemudahan investasi khususnya yang membuka lapangan kerja	✓	✓	✓	
MISI 5: Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal								
Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	Meningkatnya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Ditegakkan	Penguatan kondusivitas wilayah, kualitas mitigasi dan penanggulangan bencana serta pelestarian budaya dan kearifan lokal	Peningkatan kualitas keamanan dan nyaman hidup masyarakat	Penguatan Kebhinekaan dan Penciptaan Ruang Dialog dan kerjasama antar Warga dan umat beragama			✓	✓
	Peningkatan Upaya Penegakan Peraturan Daerah					✓	✓	
Menurunnya Resiko Bencana	Meningkatnya kapasitas daerah dalam menurunkan resiko bencana			Optimalisasi penanganan bencana sesuai standar			✓	✓
Meningkatkan Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan	Meningkatnya Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan	Optimalisasi Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal	Penguatan Pemahaman Budaya dan kearifan lokal di Lingkungan Sekolah			✓	✓	
			Pelestarian dan Promosi Seni dan Cagar Budaya			✓	✓	

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

6.3. Sinkronisasi RPJMN 2020-2024 dengan Perubahan RPJMD 2019-2024

Perubahan RPJMD 2019-2024 didesain sebagai respons terhadap penetapan RPJMN 2020-2024. Karena itu dalam RPJMD maupun dokumen perencanaan yang lebih spesifik memuat indikasi kegiatan dan kebijakan strategis dalam Renstra Perangkat Daerah terkait. Berikut disajikan sinkronisasi RPJMN dan rencana indikasi implementasinya dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Tabel 6.5
Sinkronisasi RPJMN 2020-2024 dan RPJMD 2019-2024

RPJMN 2020-2024 (Agenda)	Visi Misi Perubahan RPJMD 2019-2024 (Bab V)	Isu Strategis Perubahan RPJMD 2019-2024 (Bab IV)	Program Prioritas Pembangunan Perubahan RPJMD 2019-2024 (Bab VI)	Kebijakan/Kegiatan Strategis Perubahan Renstra 2019-2024 (Bab VI)	Perangkat Daerah
1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.	Misi 3. Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan.	Isu 3. Pemulihan Ekonomi Lokal, Industri Kreatif, dan Ketahanan Pangan	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pengembangan IKM agro (kayu) dan IKM logam	Dinass Perinaker
			Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Sarpras Pasar	Disdakop UKM
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Pengembangan OW, Duta Wisata	Disporapar
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Pengembangan usaha produktif UMKM (makan Disdakop UKM minum, kerajinan bambu); <i>Start up</i> Wirausaha Muda; <i>Co working space</i> ; Pelatihan <i>market place</i>	Disporapar
			Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Cadangan pangan; Desa Rawan Pangan	Dis Tan dan KP
1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi	Misi 4. Meningkatkan kualitas	Isu 1. Menekan Laju Kemiskinan	Program Pemberdayaan Sosial	Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)	Dinsos

RPJMN 2020-2024 (Agenda)	Visi Misi Perubahan RPJMD 2019-2024 (Bab V)	Isu Strategis Perubahan RPJMD 2019-2024 (Bab IV)	Program Prioritas Pembangunan Perubahan RPJMD 2019-2024 (Bab VI)	Kebijakan/Kegiatan Strategis Perubahan Renstra 2019-2024 (Bab VI)	Perangkat Daerah
untuk Pertumbuha n yang Berkualitas dan Berkeadilan.	sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan memanfaatka n kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.	dan Pengangguran	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabsos PMKS, Difabel, anak terlantar, PGOT	Dinsos
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Verval DTKS, pelatihan anak jalanan	Dinsos
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Optimalisasi APBDesa untuk Program Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Permasdes
			Program Peningkatan Kerjasama Desa	Fasilitasi BUMDesa; Pengembangan Kawasan Perdesaan	Dinas Permasdes
			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelatihan ketrampilan kerja produktif	Dinas Perinaker
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Job fair	Dinas Perinaker
2. Mengemban gkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.	Misi 2. Memperkuat daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur yang andal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan.	Isu 4. Pemerataan infrastruktur dasar dan Penyehatan Lingkungan Hidup	Program Penyelenggaraan Jalan	Pembangunan jalan dan jembatan; Pelebaran jalan dan jembatan; Pemeliharaan jalan dan jembatan;	DPU

RPJMN 2020-2024 (Agenda)	Visi Misi Perubahan RPJMD 2019-2024 (Bab V)	Isu Strategis Perubahan RPJMD 2019-2024 (Bab IV)	Program Prioritas Pembangunan Perubahan RPJMD 2019-2024 (Bab VI)	Kebijakan/Kegiatan Strategis Perubahan Renstra 2019-2024 (Bab VI)	Perangkat Daerah
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar			Program Penataan Bangunan Gedung	Pembangunan gedung pemerintah; Sertifikat Laik Fungsi gedung pemerintah;	Disperkim taru
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penyusunan, pemanfaatan dan pengendalian Tata Ruang	Disperkim taru
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Misi 2. Memperkuat daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur yang andal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan.	Isu 4. Pemerataan infrastruktur dasar dan Penyehatan Lingkungan Hidup	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Penyediaan sarpras TPA, TPST, TPS 3R	DLH
			Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pembangunan RTLH; Penataan Kawasan kumuh	Disperkim taru
			Program Penanggulangan Bencana	Dokumen rencana mitigasi bencana; SOP tanggap darurat bencana; Pelatihan mitigasi bencana; Gladi posko; Sekolah aman bencana; Operasional Tim Reaksi Cepat	BPBD
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.	Misi 4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu	Isu 2. Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pengelolaan Pendidikan	Penyelenggaraan KBM, Penyediaan Sarpras Pendidikan; Yuh Sekolah Maning	Disdikbud

RPJMN 2020-2024 (Agenda)	Visi Misi Perubahan RPJMD 2019-2024 (Bab V)	Isu Strategis Perubahan RPJMD 2019-2024 (Bab IV)	Program Prioritas Pembangunan Perubahan RPJMD 2019-2024 (Bab VI)	Kebijakan/Kegiatan Strategis Perubahan Renstra 2019-2024 (Bab VI)	Perangkat Daerah
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.	pengetahuan dan teknologi.		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Vaksinasi covid 19, Gerakan Masyarakat Sehat (Germas)	Dinkes
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Penyediaan Alkon; KIE	DP3AP2KB
			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Pemberdayaan Tri Bina (BKB, BKL, BKR); Upaya Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Sejahtera/ UPPKS	DP3AP2KB
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Pembinaan organisasi pemuda; Wirausaha Pemuda	Disporapar
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhank am dan Transformasi Pelayanan Publik	Misi 1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat	Isu 5. Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik, Penguatan Kelitbangan dan Teknologi Informasi	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Diseminasi informasi publik;	Diskominfo
	Misi 5. Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal		Program Aplikasi Informatika	Penyelenggaraan e-government; penyelenggaraan e-office; Pengelolaan Pusat Data	Diskominfo
			Program Pencatatan Sipil	Penatausahaan dokumen adminduk (KTP, KK, Akta-Akta)	Disdukcapil
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Sinkronisasi perencanaan Pusat-Daerah-Perangkat Daerah	Bappeda dan Litbang
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penatausahaan keuangan daerah; Pengelolaan Aset Daerah, Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPKAD

RPJMN 2020-2024 (Agenda)	Visi Misi Perubahan RPJMD 2019-2024 (Bab V)	Isu Strategis Perubahan RPJMD 2019-2024 (Bab IV)	Program Prioritas Pembangunan Perubahan RPJMD 2019-2024 (Bab VI)	Kebijakan/Kegiatan Strategis Perubahan Renstra 2019-2024 (Bab VI)	Perangkat Daerah
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Misi 1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat	Isu 5. Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik, Penguatan Kelitbangan dan Teknologi Informasi	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Penerimaan CPNS, Diklat CPNS	BKD
	Misi 5. Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal.		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan pengawasan internal; Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu; Pendampingan dan asistensi	Inspektora t
			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Pengembangan inovasi teknologi	Bappeda dan Litbang

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

Sinkronisasi dan implementasi RPJMN ke dalam RPJMD diwadahi sampai level indikasi program. Untuk memperoleh gambaran yang lebih terperinci, diperlukan gambaran hingga ke level indikasi kegiatan dan kebijakan strategis dalam Renstra Perangkat Daerah. Dengan demikian dapat diperoleh informasi sinkronisasi RPJMN-RPJMN-Renstra Perangkat Daerah.

6.4. Sinkronisasi RPJMD dengan SPM

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Untuk itu pemerintah daerah wajib melaksanakan SPM sebagaimana diamanatkan dalam PP no 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Permendagri No 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Adapun pelaksanaan SPM dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal tahun 2019-2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6.6
Sinkronisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan RPJMD 2019-2024

No	Bidang SPM	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Program Pembangunan Prioritas	Indikator	Kondisi Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	PD Penanggung Jawab
								2021	2022	2023	2024		
1	Bidang Urusan Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini	11	Jumlah warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	79,86	79,87	79,88	79,89	79,9	79,9	DINAS DIKBUD
		Pendidikan Dasar	12a	Jumlah warga Negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar jenjang SD/MI		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	107,03	100	100	100	100	100	DINAS DIKBUD
			12b	Jumlah warga Negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar Jenjang SMP/MTs		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	105,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DINAS DIKBUD

No	Bidang SPM	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Program Pembangunan Prioritas	Indikator	Kondisi Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	PD Penanggung Jawab
								2021	2022	2023	2024		
		Pendidikan Kesetaraan	13	Jumlah warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	97,25	97,26	97,27	97,28	97,29	97,29	DINAS DIKBUD
2	Bidang Urusan Kesehatan	Pelayanan kesehatan ibu hamil	21	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	93,30	97,00	98,00	99,00	100,00	100,00	DINAS KESEHATAN
		Pelayanan kesehatan ibu bersalin	22	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	98,20	99,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DINAS KESEHATAN
		Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	23	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	99,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DINAS KESEHATAN

No	Bidang SPM	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Program Pembangunan Prioritas	Indikator	Kondisi Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	PD Penanggung Jawab
								2021	2022	2023	2024		
		Pelayanan kesehatan balita	24	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	73,70	90,00	91,00	92,00	93,00	93,00	DINAS KESEHATAN
		Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	25	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan		Persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	38,90	50,00	55,00	60,00	65,00	65,00	DINAS KESEHATAN
		Pelayanan kesehatan pada usia produktif	26	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan		Persentase orang usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	15,40	25,00	30,00	35,00	40,00	40,00	DINAS KESEHATAN
		Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	27	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	33,60	77,00	56,00	57,00	58,00	58,00	DINAS KESEHATAN

No	Bidang SPM	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Program Pembangunan Prioritas	Indikator	Kondisi Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	PD Penanggung Jawab
								2021	2022	2023	2024		
		Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	28	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10,10	25,00	30,00	35,00	40,00	40,00	DINAS KESEHATAN
		Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	29	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	74,50	78,00	79,00	80,00	81,00	81,00	DINAS KESEHATAN
		Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	210	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	57,30	65,00	70,00	75,00	80,00	80,00	DINAS KESEHATAN
		Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis	211	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	57,10	65,00	70,00	75,00	80,00	80,00	DINAS KESEHATAN

No	Bidang SPM	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Program Pembanguna n Prioritas	Indikator	Kondisi Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	PD Penanggung Jawab
								2021	2022	2023	2024		
		Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	212	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan layanan kesehatan		Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	90,50	95,00	95,00	98,00	98,00	98,00	DINAS KESEHATAN
3	Bidang Urusan Pekerjaan Umum	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	31	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBA NGAN SISTEM PENYEDIAA N AIR MINUM	Cakupan Akses Layanan Air Minum	61,09	63,32	63,32	65,55	67,78	70,00	DPU
		Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	32	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBA NGAN SISTEM AIR LIMBAH	Cakupan Akses Sanitasi/ Limbah Domestik	94,37	95,17	95,57	95,97	96,37	96,37	DPU
4	Bidang Urusan Perumahan Rakyat	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana	41	Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh rumah layak huni	PROGRAM PENGEMBA NGAN PERUMAHA N	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	100	100	100	100	100	100	DINAS PERKIMTAH

No	Bidang SPM	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Program Pembangunan Prioritas	Indikator	Kondisi Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	PD Penanggung Jawab
								2021	2022	2023	2024		
		Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah	42	Jumlah Warga Negara yang terkena rekolasi akibat program Pemerintah Daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni									
5	Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	51	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase pelanggaran perda dan perkara yg diselesaikan	83,00	86,00	87,00	88,00	90,00	90,00	SATPOL PP
		Pelayanan informasi rawan bencana	52	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	79	82	88	90	100	100	SATPOL PP
		Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan	53	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan		Persentase jumlah warga negara di kawasan rawan	65	68,25	71,66	75,25	79,01	79,01	BPBD

No	Bidang SPM	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Program Pembangunan Prioritas	Indikator	Kondisi Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	PD Penanggung Jawab
								2021	2022	2023	2024		
		terhadap bencana		pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		bencana yang mempeloleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana							
		Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	54	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		Persentase jumlah warga negara yg memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1,38	1,45	1,52	1,6	1,68	1,68	BPBD
		Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	55	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase jumlah warga negara yg memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	22,26	23,37	24,54	25,77	27,06	27,06	BPBD
6	Bidang Urusan Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang	56	Jumlah warga Negara penyandang disabilitas yang	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas	29,39	34,61	62,62	81,15	100	100	DINAS SOSIAL

No	Bidang SPM	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Program Pembangunan Prioritas	Indikator	Kondisi Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	PD Penanggung Jawab
								2021	2022	2023	2024		
		disabilitas di luar panti		memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti		terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan pengemis dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti .							
		Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	57	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti									
		Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	58	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti									
		Rehabilitasi sosial dasar tuna social khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	59	Jumlah warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti									
		Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana Kabupaten	510	Jumlah warga negara korban bencana Kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS, Fakir Miskin dan anak terlantar yang memperoleh perlindungan dan jaminan Sosial.	97,99	98,75	99,21	100,00	100,00	100	DINAS SOSIAL

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

6.5. Sinkronisasi RPJMD dengan TPB/SDG's/KLHS

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) adalah Agenda 2030 yang merupakan kesepakatan pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan. TPB/SDGs berprinsip Universal, Integrasi dan Inklusif, untuk meyakinkan bahwa tidak ada satupun yang tertinggal atau disebut NO ONE LEFT BEHIND. Kebijakan TPB diamanatkan dalam Perpres No 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Berkelanjutan yang menjadi substansi utama kajian KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024. Rekomendasi KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 memuat beberapa hal antara lain: rehabilitasi kawasan pesisir dan DAS; pengelolaan limbah B3; pengendalian alih fungsi lahan; upaya konservasi air (defisit air), upaya perbaikan lingkungan pada kawasan rawan bencana. Rekomendasi KLHS tersebut menjadi salah satu acuan utama Perangkat Daerah dalam menyusun program/kegiatan/subkegiatan dalam Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024. Adapun kebijakan tindak lanjut rekomendasi KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.7

Tindaklanjut Rekomendasi KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024

No	Rekomendasi KLHS	Tindaklanjut RPJMD dan Renstra
1	Konservasi Kawasan Pesisir	Dilaksanakan melalui penanaman mangrove di kawasan pesisir dan pemberdayaan masyarakat dalam perlindungan mangrove pesisir
2	Upaya Konservasi Air (defisit air)	Dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati seperti: konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air, penanaman pohon pada daerah lahan kritis.
3	Konservasi DAS	Dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati seperti : konservasi daerah aliran sungai, pemberdayaan masyarakat dalam perlindungan DAS, penanaman pohon pada daerah lahan kritis, perlindungan sempadan sungai
4	Pengelolaan Limbah B3	<i>Clean Up</i> Lahan Terkontaminasi B3, Kerjasama dengan BPPT dalam pengelolaan Limbah B3.
5	Pengendalian Alih Fungsi Lahan	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Tata Ruang
6	Upaya Perbaikan Lingkungan pada Kawasan Rawan Bencana	Penanaman Pohon di Daerah Longsor, Normalisasi Sungai, Perbaikan Drainase, dan penguatan kapasitas mitigasi bencana

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

Dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal 2019-2024 sebagaimana terdapat pada RAD SDG's Kabupaten Tegal maka target kinerja program RPJMD dalam pencapaian tujuan TPB/SDG's dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6.8
Sinkronisasi RPJMD 2019-2024 dengan TPB/SDG's

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
1	Tujuan 1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS Perseorangan Keluarga dan Kelembagaan yang pernah dibina dan diberdayakan	32,44	49,35	66,25	83,15	100,00	100,00	DINAS SOSIAL
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan pengemis dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti .	29,39	34,61	62,62	81,15	100,00	100	DINAS SOSIAL

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS, Fakir Miskin dan anak terlantar yang memperoleh perlindungan dan jaminan Sosial.	97,99	98,75	99,21	100,00	100,00	100	DINAS SOSIAL
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Pemberdayaan masyarakat Desa	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DISPERMASDES
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga yang mendapatkan pembinaan dan ketahanan kesejahteraan keluarga	21,58	22,32	21,79	21,89	22	22	DINAS P3AP2KB
2	Tujuan 2. Menghilangkan kelaparan,	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap (Kg.)	1.964.378	1.964.378	2.003.862	2.023.900	2.044.139	2.044.139	DKPP

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
	mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan		Nilai Produksi Perikanan Tangkap (Rp.)	13.608.184	13.608.184	13.881.708	14.020.525	14.160.730	14.160.730	DKPP
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya (kg)	2.730.262	2.743.913	2.764.493	2.792.138	2.825.643	2.825.643	DKPP
			Nilai Produksi Perikanan Budidaya (Rp.000)	145.642.227	146.698.838	148.291.680	150.431.397	153.024.735	153.024.735	DKPP
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	5.478.639	5.484.118	5.492.344	5.503.329	5.517.087	5.517.087	DKPP

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
			Nilai Produksi Pengolahan Hasil Perikanan (Rp.000)	131.189.142	131.320.33 2	131.517.31 2	131.780.347	132.109.79 8	132.109. 798	DKPP
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANG AN SARANA PERTANIAN	Produksi daging (kg)	11.284.734	11.397.581	11.511.557	11.626.673	11.742.939	11.742.9 39	DINAS TAN KP
			Produksi Telur (kg.)	10.760.493	10.868.098	10.976.779	11.086.547	11.197.412	11.197.4 12	DINAS TAN KP
			Produksi Susu (kg.)	604.664	610.711	616.818	622.986	629.216	629.216	DINAS TANKP
			Persentase Penanganan Organisme	89,80	89,85	89,90	89,93	90,00	90,00	DINAS TAN KP

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
			Pengganggu Tanaman (OPT)							
			Persentase Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi	63,00	64,00	65,00	67,00	70,00	70,00	DINAS TAN KP
			Luas Lahan Pertanian Organik	2,00	2,00	2,00	2,00	5,00	5,00	DINAS TAN KP
			Rasio Penggunaan Alsintan Pra Panen	62,72	62,72	62,98	63,24	63,50	63,50	DINAS TAN KP
			Rasio Penggunaan Alsintan Pasca Panen	15,51	15,51	16,98	19,45	22,01	22,01	DINAS TAN KP
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Indeks pertanaman	1,52	1,58	1,62	1,66	1,70	1,70	DINAS TAN KP
			Aksebilitas Jalan Usaha Tani (Km/Ha)	2,60	3,00	3,34	3,70	4,11	4,11	DINAS TAN KP

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
			Luas Lahan Sawah Lestari	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DINAS TAN KP
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Rasio Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5	DINAS TAN KP
			Rasio Penggunaan Agen Pengendali Hayati per Luas tanam dalam menekan serangan OPT Padi	0,00	1,00	1,5	2,00	2,5	2,5	DINAS TAN KP
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Ternak terkendali status kesehatannya	31,37	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	DINAS TAN KP

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
			Persentase Pengawasan peredaran produk hasil ternak yang Aman Sehat Utruh dan Halal/ASUH	100	2 Jenis	100	100	100	100	DINAS TAN KP
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan kapasitas penyuluh swadaya terhadap dasar-dasar penyuluhan	0	33	27	20	20	100	DINAS TAN KP
			Penumbuhan Peningkatan Kelas Kelompok Tani Pemula Ke Lanjut	0,00	2,45	2,51	2,57	2,64	11,94	DINAS TAN KP
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan daerah rawan pangan	72,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	DINAS TAN KP

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	90	76	80	83	85	85	DINAS TANKP
3	Tujuan 3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	0,092	0,094	0,096	0,098	0,100	0,10	DINAS KESEHATAN
			Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	88,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DINAS KESEHATAN
			Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	93,30	97,00	98,00	99,00	100,00	100,00	DINAS KESEHATAN

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	98,20	99,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DINAS KESEHATAN
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	99,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DINAS KESEHATAN
			Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	73,70	90,00	91,00	92,00	93,00	93,00	DINAS KESEHATAN
			Persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	38,90	50,00	55,00	60,00	65,00	65,00	DINAS KESEHATAN

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
			Persentase orang usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	15,40	25,00	30,00	35,00	40,00	40,00	DINAS KESEHATAN
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	33,60	77,00	56,00	57,00	58,00	58,00	DINAS KESEHATAN
			Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10,10	25,00	30,00	35,00	40,00	40,00	DINAS KESEHATAN

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
			Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	74,50	78,00	79,00	80,00	81,00	81,00	DINAS KESEHATAN
			Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	57,30	65,00	70,00	75,00	80,00	80,00	DINAS KESEHATAN
			Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	57,10	65,00	70,00	75,00	80,00	80,00	DINAS KESEHATAN
			Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	90,50	95,00	95,00	98,00	98,00	98,00	DINAS KESEHATAN

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
			Cakupan balita stunting	12,50	12,40	12,30	12,20	12,00	12,00	DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah RSUD dr Soeselo	100	100	100	100	100	100	RSUD dr SOESELO
			Nilai Kesehatan Kinerja BLUD RSUD Soeselo	78,46 (AA)	88.5 (AA)	82 (AA)	86 (AA)	90 (AA)	90 (AA)	RSUD dr SOESELO
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah RSUD Suradadi	100	100	100	100	100	100	RSUD SURADADI
			Nilai Kesehatan Kinerja BLUD RSUD Suradadi	74,06 (A)	100	76,16 (A)	77,26 (A)	78,36 (A)	78,36 (A)	RSUD SURADADI
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Cakupan pelayanan perijinan praktik tenaga kesehatan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DINAS KESEHATAN

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
			Cakupan puskesmas yang mempunyai 9 tenaga kesehatan strategis	83,00	86,20	89,60	93,10	100,00	100,00	DINAS KESEHATAN
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana produksi pangan industri rumah tangga yang diterbitkan sesuai ketentuan	30	100	36,00	39,00	42,00	42	DINAS KESEHATAN
			Cakupan pemenuhan persyaratan perijinan sarana pelayanan kefarmasian	100	100	100	100	100	100	DINAS KESEHATAN

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	95,4	95,5	96	96	96	95,8	DINAS KESEHATAN
4	Tujuan 4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	79,86	79,87	79,88	79,89	79,9	79,9	DINAS DIKBUD
			Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	97,25	97,26	97,27	97,28	97,29	97,29	DINAS DIKBUD

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
			Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	107,03	100	100	100	100	100	DINAS DIKBUD
			Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	105,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DINAS DIKBUD
			Rata-rata Nilai Kelulusan SD	77.47	75	76	77	78	78	DINAS DIKBUD
			Rata-rata Nilai Kelulusan SMP	70.86	72.11	73.36	74.5	75.75	75.75	DINAS DIKBUD
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Muatan Lokal dalam KBM	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	DINAS DIKBUD
		PROGRAM PENDIDIK DAN	Rasio Guru Kelas PAUD	23,00	20,00	22,00	15,00	16,00	16,00	DINAS DIKBUD

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
		TENAGA KEPENDIDIKAN								
			Rasio Guru Kelas TK	3,16	4,00	4,61	5,82	7,03	7,03	DINAS DIKBUD
			Rasio Guru Kelas SD	19:11	1.70	1.40	1.30	1.20	1.20	DINAS DIKBUD
			Guru Mapel PAI	3.00	3.20	2.40	1.90	1.40	1.40	DINAS DIKBUD
			Guru Mapel PJOK	2.90	3.10	2.40	1.90	1.40	1.40	DINAS DIKBUD
			Rasio Guru Mapel SMP	04:38	07:44	20:19	00:11	04:03	04:03	DINAS DIKBUD
			Rasio Guru Mapel Paket A	06:14	00:00	06:14	06:14	06:14	06:14	DINAS DIKBUD
			Rasio Guru Mapel Paket B	22:44	22:44	22:44	22:44	22:44	22:44	DINAS DIKBUD
			Rasio Guru Mapel Paket C	18:14	12:07	18:14	18:11	18:14	18:14	DINAS DIKBUD
		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Berizin	100	100	100	100	100	100	DINAS DIKBUD

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
5	Tujuan 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja operasi APBD	26,84	27,00	28,00	29,00	30,00	30,00	DINAS P3AP2KB
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Keluarga mendapat pelayanan konseling	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,08	DINAS P3AP2KB
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Data Gender dan Anak yang tersedia	20,00	55,00	40,00	50,00	60,00	60,00	DINAS P3AP2KB
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Pencapaian Pemenuhan Hak Anak	50,00	22,42	64,00	67,00	70,00	70,00	DINAS P3AP2KB
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence Rate) CPR	67,8	68,94	69,14	69,34	69,54	69,54	DINAS P3AP2KB
			Persentase kebutuhan ber-KB	15,27	13,96	14,87	14,67	14,47	14,47	DINAS P3AP2KB

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
6	Tujuan 6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua		yang tidak terpenuhi (unmeet need)							
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,28	2,40	2,24	2,22	2,22	2,22	DINAS P3AP2KB
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio Ketersediaan Jaringan Irigasi dalam kondisi baik pada Daerah Irigasi (DI) Kewenangan Kabupaten	58,86	60,10	61,33	62,57	63,80	63,80	DPU
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan Akses Layanan Air Minum	61,09	63,32	63,32	65,55	67,78	70,00	DPU

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase ketersediaan Jaringan Drainase di Jalan Kewenangan Kabupaten	58,42	61,42	61,79	62,15	62,52	62,52	DPU
7	Tujuan 7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua									
8.	Tujuan 8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Destinasi Tujuan Wisata produktif (DTW) yang ditetapkan	78,33	78,33	85	90	95	95	DISPORAPAR

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
	inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua		Persentase usaha pariwisata memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	69,00	148,00	79,00	84,00	89,00	89	DISPORAPAR
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase DTW yang dipromosikan	78,33	78,33	85,00	90,00	95,00	95,00	DISPORAPAR
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata yang dibina	50	100	65	80	95	95,00	DISPORAPAR
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pasar direhabilitasi	50,00	61,54	65,38	76,92	88,46	88,46	DINAS DAGKOP UKM
			Persentase pasar e-ritribusi	7,69	26,92	46,15	65,38	84,62	84,62	DINAS DAGKOP UKM

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
			Persentase Sarana dan Prasarana Pendistribusian yang terkelola dengan baik	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DINAS DAGKOP UKM
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase laju peningkatan nilai penjualan produk dalam negeri	2	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	DINAS DAGKOP UKM
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Laju Nilai Ekspor	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	DINAS DAGKOP UKM
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi bermitra	1,04	2,34	3,64	4,94	6,23	6,23	Disdagkop UMKM
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Peningkatan UMKM yang Bermitra	2,63	3,68	4,21	4,73	5,26	5,26	DINAS DAGKOP UKM

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Peningkatan Skala Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil	Persen; Kumulatif; IKU OPD	35000,00	240133,00	160000,00	161600,00	310000,00	631600
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,073	0,109	0,135	0,161	0,187	0,187	DINAS PORAPAR
			Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan	0,067	0,069	0,071	0,073	0,076	0,076	DINAS PORAPAR
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100	100	100	100	100	100	DISPERINAKER
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	37.990,000	39.438,000	40.737,000	42.410,000	44.326,000	44.326,000	DISPERINAKER

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
			Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi	3,70	4,60	5,50	6,40	6,70	6,70	DISPERINAKER
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah	17,82	25,00	30,00	35,00	40,00	40,00	DISPERINAKER
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Lokasi potensial yang memiliki profil investasi	0,00	28,57	42,86	57,14	71,43	71,43	DINAS PMPTSP
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan calon investor yang berkomitmen	100,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	DINAS PMPTSP
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase ketepatan waktu perizinan yang ditetapkan sebelum batas waktu	100	79,00	100,00	100,00	100,00	100	DINAS PMPTSP

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Kepatuhan Perusahaan	61,28	64,28	67,28	70,28	73,28	73,28	DINAS PMPTSP
9	Tujuan 9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil Kelitbangan yang termanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	65,00	72,50	72,50	73,44	87,50	87,50	BAPPEDA DAN LITBANG
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Rasio Bangunan dan Lingkungan yang tertata	0,3	10	60	91,11	100	100	DPU
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio Bangunan Negara yang Sesuai Standar Teknis	76,88	78,00	79,12	80,24	81,36	81,36	DPU

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
			Rasio bangunan yang memiliki IMB	6,50	7,49	8,01	8,57	9,15	9,15	DPU
		PROGRAM PENYELENGGA RAAN JALAN	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	81,11	82,50	84,00	85,50	87,50	87,50	DPU
			Proporsi Jembatan dalam Kondisi Mantap	88,05	89,50	91,00	92,00	93,50	93,50	DPU

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
		PROGRAM PENYELENGGA RAAN PENATAAN RUANG	Rasio kepatuhan terhadap ITR yang diajukan	79,93	87	88	89	90	90	DPU
		PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Sarana dan Prasarana Desa yang terpenuhi dan Baik	55,23	60,23	65,23	70,23	80,23	80,23	DISPERMASDES
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIP	60,00	60,00	70,00	80,00	100,00	100,00	DISPERINAKER
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DISPERINAKER

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase industri yang memiliki 7 informasi industri secara lengkap dan terkini (SII Nas)	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	100,00	DISPERINAKER
10.	Tujuan 10. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa mandiri Kecamatan Adiwerna	0,00	0,00	0,00	4,76	4,76	4,76	KECAMATAN ADIWERNA
			Persentase desa Maju Kecamatan Adiwerna	9,52	9,52	9,52	14,29	14,29	14,29	KECAMATAN ADIWERNA
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa mandiri Kecamatan Balapulang	0,00	0,00	5,00	9,52	9,52	9,52	KECAMATAN BALAPULANG
			Persentase desa maju Kecamatan Balapulang	5,00	5,00	9,52	9,52	15,00	15,00	KECAMATAN BALAPULANG
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa mandiri Kecamatan Bojong	12,00	12,00	0,12	0,18	0,18	0,18	KECAMATAN BOJONG

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
			Persentase desa maju Kecamatan Bojong	0,29	0,29	0,29	0,35	0,35	0,35	KECAMATAN BOJONG
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa mandiri Kecamatan Bumijawa	0,00	0,00	0,00	5,56	11,11	11,11	KECAMATAN BUMIJAWA
			Persentase desa maju Kecamatan Bumijawa	11,11	11,11	16,67	22,22	37,78	37,78	KECAMATAN BUMIJAWA
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa mandiri Kecamatan Dukuhwaru	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	KECAMATAN DUKUHTURI
			Persentase desa maju Kecamatan Dukuhwaru	10,00	10,00	10,00	10,00	20,00	20,00	KECAMATAN DUKUHTURI
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa mandiri Kecamatan Dukuhturi	0,00	0,00	0,00	5,56	5,56	5,56	KECAMATAN DUKUHWARU
			Persentase desa maju Kecamatan Dukuhturi	5,56	5,56	5,56	11,11	16,67	16,67	KECAMATAN DUKUHWARU

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa mandiri Kecamatan Jatinegara	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	KECAMATAN JATINEGARA
			Persentase desa maju Kecamatan Jatinegara	6,00	6,00	12,00	12,00	12,00	12,00	KECAMATAN JATINEGARA
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa mandiri Kecamatan Kedungbanteng	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	KECAMATAN KEDUNGABNTENG
			Persentase desa maju Kecamatan Kedungbanteng	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	KECAMATAN KEDUNGABNTENG
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan mandiri Kecamatan Kramat	0,00	0,00	5,26	5,26	5,26	5,26	KECAMATAN KRAMAT
			Persentase desa/kelurahan maju Kecamatan Kramat	16,00	16,00	16,00	26,00	26,00	26,00	KECAMATAN KRAMAT
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa mandiri Kecamatan Lebaksiu	7,69	7,69	7,69	7,69	15,38	15,38	KECAMATAN LEBAKSIU

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
			Persentase desa Maju Kecamatan Lebaksiu	15,00	15,00	15,00	23,00	23,00	23,00	KECAMATAN LEBAKSIU
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa mandiri Kecamatan Margasari	8,00	8,00	8,00	15,00	15,00	15,00	KECAMATAN MARGASARI
			Persentase desa maju Kecamatan Margasari	46,00	46,00	46,00	54,00	62,00	62,00	KECAMATAN MARGASARI
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa mandiri Kecamatan Pagerbarang	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	KECAMATAN PAGERBARANG
			Persentase desa maju Kecamatan Pagerbarang	8,00	8,00	16,00	24,00	30,00	30,00	KECAMATAN PAGERBARANG
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa mandiri Kecamatan Pangkah	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	KECAMATAN PANGKAH
			Persentase desa Maju Kecamatan Pangkah	4,00	4,00	4,00	9,00	9,00	9,00	KECAMATAN PANGKAH

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa mandiri Kecamatan Slawi	0,00	0,00	20,00	20,00	40,00	40,00	KECAMATAN SLAWI
			Persentase desa maju Kecamatan Slawi	60,00	60,00	60,00	80,00	80,00	80,00	KECAMATAN SLAWI
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa mandiri Kecamatan Suradadi	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00	KECAMATAN SURADADI
			Persentase desa maju Kecamatan Suradadi	9,00	9,00	18,00	18,00	18,00	18,00	KECAMATAN SURADADI
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa mandiri Kecamatan Talang	0,00	0,00	0,00	0,00	5,26	5,26	KECAMATAN TALANG
			Persentase desa maju Kecamatan Talang	0,00	0,00	5,26	5,26	0,11	0,11	KECAMATAN TALANG
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa mandiri Kecamatan Tarub	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	KECAMATAN TARUB

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
			Persentase desa maju Kecamatan Tarub	20,00	20,00	20,00	25,00	25,00	25,00	KECAMATAN TARUB
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan mandiri Kecamatan Warureja	0,00	0,00	8,00	8,00	17,00	17,00	KECAMATAN WARUREJA
			Persentase desa/kelurahan Maju Kecamatan Warureja	17,00	17,00	17,00	25,00	33,00	33,00	KECAMATAN WARUREJA
11	Tujuan 11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	100	100	100	100	100	100	DINAS PERKIMTAH
			Rasio Pembangunan dan pengembangan perumahan yang memiliki izin	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DINAS PERKIMTAH

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Penanganan Perumahan Tidak Layak Huni	13,06	15,4	17,98	20,79	23,6	23,6	DINAS PERKIMTAH
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Laju Penurunan Luas Kawasan Kumuh yang telah ditetapkan	35,47	198,01	45,72	50,48	55,97	55,97	DINAS PERKIMTAH
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase ketersediaan PSU perumahan	83,31	83,90	84,50	85,10	85,70	85,70	DINAS PERKIMTAH
12	Tujuan 12. Menjamin pola produksi dan konsumsi berkelanjutan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase penguatan cadangan pangan	26,50	27,00	28,50	30,00	32,50	32,50	DINAS TAN KP

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
			Persentase ketersediaan informasi harga dan pasokan pangan	48,00	49,00	50,00	51,00	52,00	52,00	DINAS TAN KP
13.	Tujuan 13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Nilai Peningkatan Status Mutu Air Sungai	3,70	3,70	7,41	11,11	14,81	14,81	DLH
			Presentase Pengendalian Lahan Terkontaminasi Limbah B3	1,08	5,77	9,76	16,84	18,60	18,60	DLH

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Penanganan Limbah B3	60,00	60,00	62,50	65,00	67,00	67,00	DLH
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Cakupan Akses Sanitasi/ Limbah Domestik	94,37	95,17	95,57	95,97	96,37	96,37	DPU
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan Sampah	47,29	54,69	52,08	54,18	56,28	56,28	DLH
			Persentase Pengurangan Sampah	14,00	15,31	17,92	23,15	29,00	29,00	DLH
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Rasio ketersediaan sarana dan prasarana persampahan	78,00	80,00	82,00	83,00	85,00	85,00	DPU

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
14	Tujuan 14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase perairan umum daratan (PUD) yang bebas dari destructive fishing	11,11	33,33	55,56	77,78	100,00	100,00	DKPP
15	Tujuan 15. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Peningkatan Luas Lahan Kehati yang terkelola	0	33,33	34,72	37,50	38,89	38,89	DLH
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN	Persentase Pelaku Usaha yang Berkomitmen dalam Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	30,00	40,00	45,00	50,00	55,00	55,00	DLH

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
	keanekaragaman hayati	PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)								
16	Tujuan 16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase perangkat daerah yang terpenuhi kebutuhan TIK dalam digitalisasi pemerintahan	25,00	25,00	50,00	75,00	100,00	100,00	DINAS KOMINFO
			Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan Dinas kominfo	16,67	54,17	70,83	85,42	100,00	100,00	DINAS KOMINFO
			Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	45,00	55,00	65,00	75,00	85,00	85,00	DINAS KOMINFO

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	20,00	25,00	30,00	50,00	80,00	80,00	DINAS KOMINFO
		PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Adiwerna	76,37	77,62	78,87	79,87	80,87	80,87	KECAMATAN ADIWERNA
		PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Balapulang	79,29	80,54	81,79	82,79	83,79	83,79	KECAMATAN BALAPULANG
		PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Bojong	79,62	80,87	82,12	83,12	84,12	84,12	KECAMATAN BOJONG

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
		PELAYANAN PUBLIK								
		PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Bumijawa	87,53	88,78	90,03	91,03	92,03	92,03	KECAMATAN BUMIJAWA
		PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Dukuhturi	79,37	80,62	81,87	82,87	83,87	83,87	KECAMATAN DUKUHTURI
		PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Dukuhturi	77,44	78,69	79,94	80,94	81,94	81,94	KECAMATAN DUKUHWARU
		PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Jatinegara	79,70	80,95	82,20	83,20	84,20	84,20	KECAMATAN JATINEGARA

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
		PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Kedungbanteng	82,00	83,00	84,00	85,00	86,00	86,00	KECAMATAN KEDUNGABNTENG
		PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Kramat	78,98	80,23	81,48	82,48	83,48	83,48	KECAMATAN KRAMAT
		PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Lebaksiu	77,25	80,00	81,25	82,25	83,25	83,25	KECAMATAN LEBAKSIU
		PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Margasari	77,40	78,65	79,90	80,90	81,90	81,90	KECAMATAN MARGASARI

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
		PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Pagerbarang	77,63	78,88	80,13	81,13	82,13	82,13	KECAMATAN PAGERBARANG
		PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Pangkah	78,74	79,99	81,24	82,24	83,24	83,24	KECAMATAN PANGKAH
		PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Slawi	79,67	80,92	82,17	83,17	84,17	84,17	KECAMATAN SLAWI
		PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Suradadi	79,76	81,01	82,26	83,26	84,26	84,26	KECAMATAN SURADADI

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
		PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Talang	73,20	74,45	75,70	76,70	77,70	77,70	KECAMATAN TALANG
		PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Tarub	80,55	81,80	83,05	84,05	85,05	85,05	KECAMATAN TARUB
		PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Warureja	77,40	78,65	79,90	80,90	81,90	81,90	KECAMATAN WARUREJA
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	15,00	20,00	30,00	40,00	50,00	50,00	DISDUKCAPIL

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penduduk ber Kartu Keluarga	91,67	92,00	94,00	96,00	98,00	98,00	DISDUKCAPIL
			Perekaman KTP elektronik	99,68	99,72	99,74	99,76	99,80	99,80	DISDUKCAPIL
			Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	21,80	50,00	60,00	70,00	80,00	80,00	DISDUKCAPIL
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Kepemilikan akta kelahiran	93,10	94,00	95,50	96,00	96,50	96,50	DISDUKCAPIL
			Persentase penduduk ber akta kematian	68,54	69,29	70,04	70,79	71,54	71,54	DISDUKCAPIL

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan disusun sesuai tahapan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	BAPPEDA DAN LITBANG
			Persentase hasil rekomendasi Pengendalian yang ditindaklanjuti	75,00	86,00	75,00	80,00	85,00	85,00	BAPPEDA DAN LITBANG
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Adiwerna	50,00	50,00	68,00	89,00	100,00	100,00	KECAMATAN ADIWERNA
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Balapulang	35,00	50,00	70,00	90,00	100,00	100,00	KECAMATAN BALAPULANG
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Bojong	35,00	50,00	68,00	89,00	100,00	100,00	KECAMATAN BOJONG

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Bumijawa	35,00	50,00	68,00	84,00	100,00	100,00	KECAMATAN BUMIJAWA
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Dukuhturi	35,00	40,00	50,00	60,00	70,00	70,00	KECAMATAN DUKUHTURI
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Dukuhturi	50,00	50,00	68,00	89,00	100,00	100,00	KECAMATAN DUKUHWARU
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Jatinegara	35,00	50,00	68,00	89,00	100,00	100,00	KECAMATAN JATINEGARA
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Kedungbanteng	35,00	50,00	68,00	89,00	100,00	100,00	KECAMATAN KEDUNGBANTENG

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Kramat	30,00	50,00	68,00	89,00	100,00	100,00	KECAMATAN KRAMAT
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Lebaksiu	35,00	50,00	68,00	89,00	95,00	95,00	KECAMATAN LEBAKSIU
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Margasari	50,00	68,00	89,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN MARGASARI
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Pagerbarang	35,00	50,00	68,00	89,00	100,00	100,00	KECAMATAN PAGERBARANG
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Pangkah	35,00	50,00	68,00	89,00	100,00	100,00	KECAMATAN PANGKAH

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Slawi	35,00	50,00	68,00	89,00	100,00	100,00	KECAMATAN SLAWI
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Suradadi	35,00	50,00	68,00	89,00	100,00	100,00	KECAMATAN SURADADI
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Talang	35,00	50,00	68,00	89,00	100,00	100,00	KECAMATAN TALANG
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Tarub	35,00	50,00	68,00	89,00	100,00	100,00	KECAMATAN TARUB
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Warureja	35,00	50,00	68,00	89,00	100,00	100,00	KECAMATAN WARUREJA

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase ketepatan waktu Penyusunan APBD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	BPKAD
			Persentase ketepatan waktu Penerbitan SP2D	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	BPKAD
			Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Peraturan Daerah & Peraturan Bupati Pertanggungjawaban APBD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	BPKAD
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio PAD	14,09	14,81	15,06	15,15	15,27	15,27	BAPPENDA
			Rasio Piutang Pajak Daerah	66,26	90,00	95,00	98,90	99,10	99,10	BAPPENDA
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Penyusunan Laporan BMD yang Baik dan Tepat Waktu	62,50	65,00	70,00	75,00	80,00	80,00	BPKAD
		Program Penyelenggaraa n Pengawasan	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan BPK RI	91,70	91,00	92,00	92,00	92,00	92,00	INSPEKTORAT

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
			Persentase tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Provinsi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	INSPEKTORAT
			Persentase tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Kabupaten	39,02	50,00	60,00	70,00	80,00	80,00	INSPEKTORAT
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Predikat WBK/WBBM berdasarkan penilaian internal	16,67	4,20	16,67	16,67	16,67	16,67	INSPEKTORAT
			Persentase Pemenuhan IKU Perangkat Daerah	60,41	60,00	66,66	70,83	75,00	75,00	INSPEKTORAT
			Persentase PD menyajikan laporan keuangan secara akuntabel	81,25	85,00	85,41	89,58	93,75	93,75	INSPEKTORAT
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin sesuai peraturan	0,12	0,12	0,12	0,11	0,11	0,10	BKD

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
			Persentase jabatan struktural terisi sesuai dengan kompetensinya	87,97	91,50	94,77	95,42	96,08	96,08	BKD
			Persentase jabatan jabatan fungsional (non guru non kesehatan) terisi sesuai dengan kompetensinya	35,76	38,79	41,82	44,85	47,88	47,88	BKD
			Rasio pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah Dasar (%)	110,04	224,96	259,85	288,10	318,87	318,87	BKD
			Rasio pegawai fungsional (%)	9,87	14,40	15,28	15,68	16,23	16,23	BKD

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
			Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi (%) tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	93,50	92,94	93,26	92,69	93,05	93,05	BKD
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 20/jam dalam setahun	47,49	65,01	70,00	75,01	80,00	80,00	BKD
			Persentase PNS mengikuti seminar/ workshop/sejenis sesuai dengan tupoksi jabatan	33,40103814	37,10259301	40	45,00563698	50	50	BKD
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	6,79	6,4	8,3	8,49	9,67	9,67	DINAS P3AP2KB
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	0,01	0.010	0.0120	0.0130	0.0140	0.0140	DINAS P3AP2KB

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Presentase masyarakat yang memahami ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	80,42	84,66	86,66	88,66	90,66	90,66	BADAN KESBANGPOL
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Gangguan KANTIBMAS yang tertangani	85	100	100	100	100	100,00	BADAN KESBANGPOL
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Konflik yang tertangani	97	100	100	100	100	100,00	BADAN KESBANGPOL
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Adiwerna	100	100	100	100	100	100,00	KECAMATAN ADIWERNA

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Balapulang	100	100	100	100	100	100,00	KECAMATAN BALAPULANG
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Bojong	100	100	100	100	100	100,00	KECAMATAN BOJONG
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Bumijawa	100	100	100	100	100	100,00	KECAMATAN BUMIJAWA
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Dukuhwaru	75	75	80	85	90	90,00	KECAMATAN DUKUHTURI
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Dukuhuturi	100	100	100	100	100	100,00	KECAMATAN DUKUHWARU

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Jatinegara	100	100	100	100	100	100,00	KECAMATAN JATINEGARA
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Kedungbanteng	81	81	82	83	84	84,00	KECAMATAN KEDUNGBANTENG
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Kramat	100	100	100	100	100	100,00	KECAMATAN KRAMAT
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Lebaksiu	70	70	75	80	85	85,00	KECAMATAN LEBAKSIU
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Margasari	100	100	100	100	100	100,00	KECAMATAN MARGASARI

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Pagerbarang	100	100	100	100	100	100,00	KECAMATAN PAGERBARANG
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Pangkah	100	100	100	100	100	100,00	KECAMATAN PANGKAH
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Slawi	100	100	100	100	100	100,00	KECAMATAN SLAWI
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Suradadi	100	100	100	100	100	100,00	KECAMATAN SURADADI
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Talang	100	100	100	100	100	100,00	KECAMATAN TALANG

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Tarub	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN TARUB
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Kecamatan Warureja	82,00	82,00	83,00	84,00	85,00	85,00	KECAMATAN WARUREJA
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase gangguan trantibun yang tertangani	82,00	84,00	86,00	88,00	90,00	90	SATPOL PP
			Presentase pelanggaran perda dan perkara yg diselesaikan	83	86	87	88	90	90	SATPOL PP

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	79	82	88	90	100	100	SATPOL PP
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase jumlah warga negara di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	65	68,25	71,66	75,25	79,01	79,01	BPBD
			Persentase jumlah warga negara yg memperoleh layanan pencegahan dan kesiap siagaan terhadap bencana	1,38	1,45	1,52	1,6	1,68	1,68	BPBD

No	Tujuan TPB/SDGs	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2024)	Perangkat Daerah
			Persentase jumlah warga negara yg memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	22,26	23,37	24,54	25,77	27,06	27,06	BPBD
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DINAS SOSIAL
17	Tujuan 17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan									

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

6.6. Sinkronisasi RPJMD dengan amanat Perpres No. 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Provinsi Jawa Tengah (Kawasan Bregasmalang).

Perubahan RPJMD 2019-2024 didesain sebagai respons terhadap Perpres No. 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Provinsi Jawa Tengah (Kawasan Bregasmalang). Upaya sinkronisasi RPJMD 2019-2024 terhadap implementasi Perpres dimaksud dapat dicermati dalam tebal berikut.

Tabel 6.9
Sinkronisasi RPJMD 2019-2024 dengan Perpres No. 79 Tahun 2019

PERPRES 79 TAHUN 2019	Isu Strategis Perubahan RPJMD 2019-2024 (Bab IV)	Program Prioritas Pembangunan Perubahan RPJMD 2019-2024 (Bab VI)	Kebijakan/Kegiatan Strategis Perubahan Renstra 2019-2024 (Bab VI)	Perangkat Daerah
Pengendali Banjir dan Normalisasi Sungai Jimat dan Sungai Rambut	Isu 4. Pemerataan infrastruktur dasar dan Penyehatan Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	DED (2022); Dok Lingkungan (2023); LARAP (2023); Konstruksi (2024)	DPU
Pengembangan Sumber Air Baku SPAM Perkotaan		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Kerjasama dg Perguruan Tinggi untuk Study Potensi Sumber Air Permukaan maupun Air Dalam	Diperkimtaru
Pembangunan Bendungan Jatinegara		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Sertifikasi Teknis Kelayakan Teknis oleh Komite Bendungan; Apprasal/Penentuan Harga; Pembebasan lahan; Penganggaran; Lelang	DPU
Optimalisasi Waduk Cacaban			PEKERJAAN PENATAAN KAWASAN: Pekerjaan Normalisasi Bibir Waduk (P = 880.00 m'); Pekerjaan Pembuatan Dermaga dan Lansekap; Pekerjaan Pembuatan Pujasera; Pekerjaan Pembuatan Gardu Pandang; Pekerjaan Pembuatan Toilet dan Mushola; Pekerjaan Pembuatan Playground dan Landskip	
Pengendalian Banjir Sistem Sungai Cacaban	Isu 4. Pemerataan infrastruktur dasar dan Penyehatan Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	DED (2017) oleh Pemda Tegal; Review DED (2022); Dok Lingkungan (2023); LARAP (2023); Konstruksi (2024)	DPU

PERPRES 79 TAHUN 2019	Isu Strategis Perubahan RPJMD 2019-2024 (Bab IV)	Program Prioritas Pembangunan Perubahan RPJMD 2019-2024 (Bab VI)	Kebijakan/Kegiatan Strategis Perubahan Renstra 2019-2024 (Bab VI)	Perangkat Daerah
Pembangunan Sarpras Konservasi SDA Sungai Pemali (Tegal dan Brebes)			DED (2016) oleh Pemda Tegal; Review DED (2022); Dok Lingkungan (2023); LARAP (2023); Konstruksi (2024)	DPU
Peningkatan Jalan Akses Kaligua - Guci		Program Penyelenggaraan Jalan	Koordinasi lintas sektor	DPU
Peningkatan Jalan Yomani - Guci			DED (2020); Koordinasi Anggaran (2021); Konstruksi (2022)	DPU
Peningkatan Jalan dan Perlengkapan Jalan Ketanggungan - Prupuk			Pelebaran Jalan menjadi 12 meter; Pemasangan Guardrail pada Tepi Saluran Irigasi; Penertiban Bangunan Liar yang berada pada Tanah PSDA	DPU
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Jawa Tengah		Program Pengembangan Perumahan	Verifikasi, validasi, rekomendasi, pembangunan	Disperkimtaru
		Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh		
Fasilitasi Pengembangan Industri Klaster Logam	Isu 3. Pemulihan Ekonomi Lokal, Pariwisata, Industri Kreatif, dan Ketahanan Pangan	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Revitalisasi Penataan Kawasan; Peremajaan Bangunan; Pengembangan Fasilitas	Disperinaker
Revitalisasi Pasar Adiwerna, Balamoa, Guci, Bumijawa		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembahasan dg Kemendag Bln Februari 2020; Peninjauan Lap oleh Kemendag Bln Februari 2020; Telah mengirimkan Semua Dokumen 2020; Koordinasi dg PPMU Prop Jateng	Disdakop UKM
Pembangunan Pasar Ikan dan Balai Benih Ikan (BBI)		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	FS (2021); DED (2021); LARAP (2021); Dok Lingkungan (2022); Pembebasan Lahan	DKPP

PERPRES 79 TAHUN 2019	Isu Strategis Perubahan RPJMD 2019-2024 (Bab IV)	Program Prioritas Pembangunan Perubahan RPJMD 2019-2024 (Bab VI)	Kebijakan/Kegiatan Strategis Perubahan Renstra 2019-2024 (Bab VI)	Perangkat Daerah
			(2022); Konstruksi (2023)	
Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Koordinasi lintas sektor	DKPP
Pengembangan Pertanian Bawang Putih		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	FS (2022); DED (2022) Dok Lingkungan (2022); Konstruksi (2023)	Dis Tan dan KP

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

Perpres Nomor 79 Tahun 2019 didesain sebagai instrumen quick wins untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7% di Jawa Tengah. Dari 14 project yang berlokasi di Kabupaten Tegal, telah dialirkan indikasi programnya dalam RPJMD dan indikasi kegiatan/kebijakan strategisnya dalam Renstra masing-masing Perangkat Daerah. Dengan demikian implementasi Perpres 79 Tahun 2019 telah menjadi arus utama dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

6.7. Rencana Aksi Adaptasi Kebiasaan Baru Pasca Covid-19

Perubahan RPJMD 2019-2024 dilakukan antara lain sebagai respons covid-19 yang melanda Indonesia sejak awal tahun 2020. Tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi kesehatan, sosial dan ekonomi menjadi agenda pembangunan daerah yang dituangkan dalam RPJMD dan diturunkan dalam Renstra Perangkat Daerah. Berikut disajikan dukungan implementasi program dan kegiatan dalam pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Pasca covid-19.

Tabel 6.10
Rencana Aksi Adaptasi Kebiasaan Baru Pasca Covid-19

Strategi Penanggulangan Covid-19	Program Prioritas Pembangunan Perubahan RPJMD 2019-2024 (Bab VI)	Kebijakan/ Kegiatan Strategis Perubahan Renstra 2019-2024 (Bab VI)	Perangkat Daerah
Penanganan lanjutan Pasca Covid-19	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pelayanan kesehatan dengan penerapan protokol kesehatan; Peningkatan kapasitas tracing dan testing dan vaksin; Peningkatan sarana dan prasana	Dinkes
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM dalam penanganan Covid 19	Dinkes

Strategi Penanggulangan Covid-19	Program Prioritas Pembangunan Perubahan RPJMD 2019-2024 (Bab VI)	Kebijakan/ Kegiatan Strategis Perubahan Renstra 2019-2024 (Bab VI)	Perangkat Daerah
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Pemenuhan Alat Pelindung Diri, obat-obatan, & Alat Kesehatan	Dinkes
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Promkes Adaptasi Kebiasaan Baru; Peningkatan peran masyarakat dalam penanganan covid -19	Dinkes
	Pengelolaan BLUD RSUD Dr. Soeselo	Penyediaan dan pengelolaan Lab. PCR; Penyediaan layanan medis covid -19 <i>dan vaksinasi</i> ; Penyediaan layanan farmasi covid -19; Penyediaan APD	RSUD dr. Soeselo
	Pengelolaan Blud Rsud Suradadi	Penyediaan layanan medis covid -19 <i>dan vaksinasi</i> ; Penyediaan layanan farmasi covid-19; Penyediaan APD	RSUD Suradadi
Pemulihan Sosial Pasca Covid-19	Program Pemberdayaan Sosial	Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)	Dinsos
	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabsos PMKS, Difabel, anak terlantar, PGOT ; Jaring Pengaman Sosial (JPS)	Dinsos
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Verval DTKS, pelatihan anak jalanan	Dinsos
	Program Penanganan Bencana	Oeprasional Gugus Tugas Covid-19; Satu Data Penanganan Covid-19	Dinsos
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Optimalisasi APBDesa untuk Program Penanggulangan Kemiskinan Pasca Covid-19	Dispermasdes
Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Pengembangan IKM agro (kayu) dan IKM logam	Disperinaker
	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Sarpras Pasar; Adaptasi Kebiasaan Baru di Pasar	Disdakop UKM

Strategi Penanggulangan Covid-19	Program Prioritas Pembangunan Perubahan RPJMD 2019-2024 (Bab VI)	Kebijakan/ Kegiatan Strategis Perubahan Renstra 2019-2024 (Bab VI)	Perangkat Daerah
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Pengembangan OW, Duta Wisata; Pengembangan Desa Wisata	Disporapar
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pengembangan usaha produktif UMKM (makan minum, kerajinan bambu); <i>Start up</i> Wirausaha Muda; <i>Co working space</i> ; Pelatihan <i>market place</i>	Disdakop UKM
	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Cadangan pangan; Desa Rawan Pangan	Dis Tan dan KP
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelatihan ketrampilan kerja produktif	Disperinaker
	Program Penempatan Tenaga Kerja	<i>Job fair</i>	Disperinaker
	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pemberdayaan Tri Bina (BKB, BKL, BKR); Pemberdayaan Upaya Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Sejahtera/ UPPKS	DP3AP2KB

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

Penanganan pasca covid-19 diprioritaskan pada penanganan lanjutan pasca covid-19, pemulihan ekonomi dan pemulihan sosial pasca covid-19. Implementasi penanganan pasca covid-19 ini diintegrasikan dengan Renstra masing-masing Perangkat Daerah dan mulai diimplementasikan sejak RKPD 2021.

6.8. Strategi dan Arah Pengembangan Wilayah

A. Kebijakan Umum Pengembangan Wilayah

Arah pengembangan wilayah di Kabupaten Tegal ditujukan untuk mewujudkan ruang Kabupaten berbasis industri yang didukung oleh pertanian berkelanjutan dan kepariwisataan yang saling terintegrasi, lestari dan berwawasan lingkungan. Memperhatikan kondisi geografis wilayah dan kawasan strategis di regional maupun di dalam wilayah Kabupaten Tegal. Kabupaten secara regional telah ditetapkan bagian dari kawasan strategis propinsi Bregasmalang yang meliputi Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kota Tegal dan Kabupaten Pemalang, dimana kawasan ini dikembangkan dengan memantapkan pembangunan di koridor utara, sehingga tetap mampu menjadi pendorong ekonomi wilayah Jawa Tengah.

Kebijakan dan strategi pengembangan wilayah di Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

- 1) pengembangan kegiatan industri kecil dan industri rumah tangga di seluruh wilayah Kabupaten serta industri menengah dan besar di bagian utara dan selatan wilayah Kabupaten;
- 2) pengembangan kawasan agropolitan di bagian selatan wilayah Kabupaten;
- 3) pengendalian kawasan pertanian pangan berkelanjutan secara ketat;
- 4) pengembangan kawasan minapolitan di bagian utara wilayah Kabupaten;
- 5) pengembangan sistem pelayanan perkotaan didukung infrastruktur wilayah yang terpadu;
- 6) pengembangan dan pemantapan sistem prasarana wilayah untuk mendukung kegiatan industri dan sentra produksi pertanian;
- 7) pemantapan pelestarian kawasan lindung;
- 8) pengembangan kawasan pariwisata; dan peningkatan fungsi kawasan kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

B. Pengembangan Struktur Ruang

Berdasarkan rencana pengembangan struktur ruang, secara hirarki sistem perkotaan Kabupaten Tegal telah ditetapkan menjadi sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu Kecamatan Slawi dan Adiwerna, dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yaitu seluruh Ibukota Kecamatan dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). Pusat pusat kegiatan ini merupakan pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tegal. Untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi tersebut diperlukan jaringan prasarana wilayah meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan Sumber Daya Air (SDA). sistem jaringan prasarana lainnya (SPAM, SPAL, Persampahan).

Strategi pengembangan struktur ruang ini dilakukan melalui Pengembangan sistem perkotaan yang terpadu dan saling bersinergi antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan melalui:

- 1) menyusun dan menetapkan rencana rinci pengembangan sistem pelayanan perkotaan.
- 2) mengoptimalkan fungsi PKL, dan PPK dalam penyediaan ruang bagi sektor informal dan RTH.
- 3) mengembangkan kawasan permukiman dengan menyediakan prasarana dasar dan penyediaan RTH serta pengembangan komunitas dalam permukiman.
- 4) merevitalisasi perdagangan dan jasa dengan penyediaan pasar tradisional bersih yang menampung komoditas lokal.
- 5) menetapkan lingkungan siap bangun guna penyediaan perumahan yang tersebar di PKL, dan PPK.
- 6) Menyediakan sarana prasarana pendukung kegiatan baik pada kawasan perkotaan maupun pada kawasan perdesaan.
- 7) Mengembangkan jaringan infrastruktur yang menghubungkan kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

Sedangkan strategi Pengembangan dan pemantapan sistem prasarana wilayah untuk mendukung kegiatan industri dan sentra produksi pertanian, dilakukan melalui:

- 1) Mengembangkan sistem transportasi secara intermoda sampai ke pusat produksi industri, pertanian dan pariwisata;
- 2) Mengembangkan prasarana telematika, yang lebih luas jangkauan pelayanannya hingga menjangkau daerah terisolir;
- 3) Mengembangkan prasarana pengairan dan pendukungnya;
- 4) Mengembangkan kembali embung-embung/ waduk lapangan;
- 5) Menyediakan prasarana energi pada wilayah pelosok dengan pengembangan mikrohidro; dan
- 6) Mengembangkan prasarana lingkungan dengan mendukung Sistem Penyediaan Air Minum regional dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) regional.

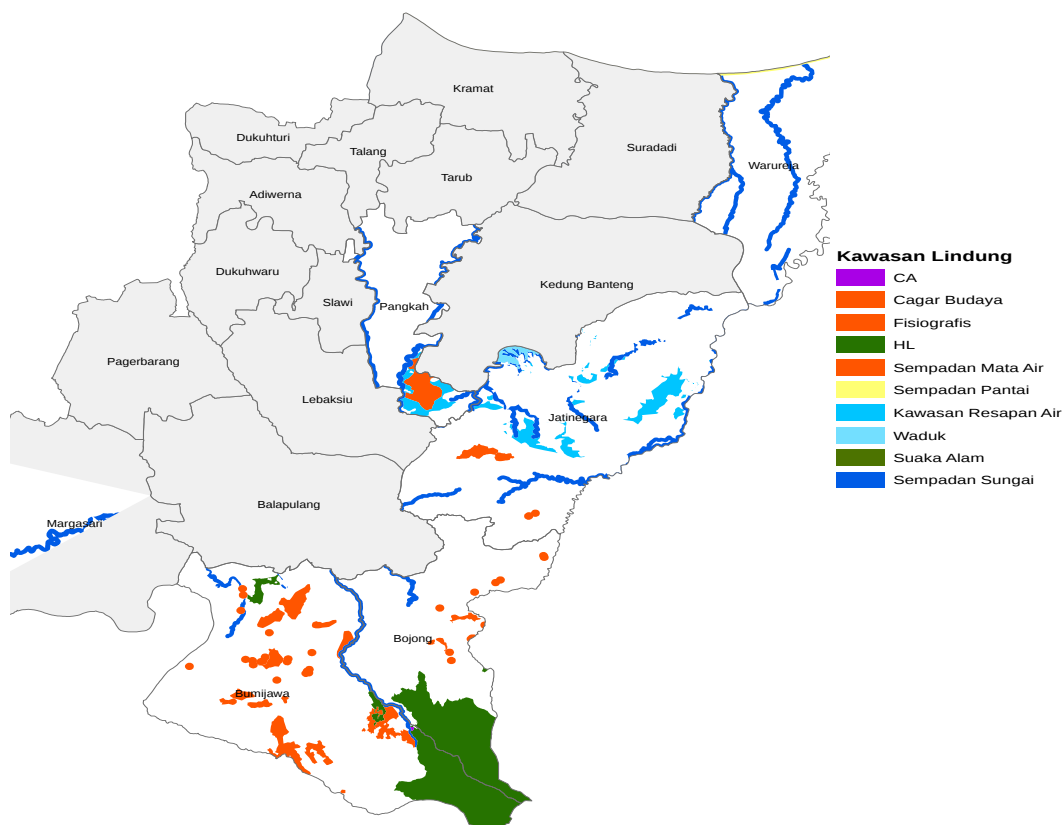
C. Pengembangan Kawasan Lindung

Kawasan lindung memiliki fungsi utama melindungi kelestarian sumber daya alam seperti tanah, air, iklim, tumbuhan, keanekaragaman hayati, satwa, tipe ekosistem, dan keunikan alam serta sumber daya buatan seperti nilai budaya dan sejarah bangsa. Di kawasan ini tidak diperkenankan adanya kegiatan budidaya yang dapat mengurangi atau merusak fungsi lindungnya, kecuali digunakan untuk meningkatkan fungsi lindungnya. Kawasan lindung tersebut terdiri dari: Kawasan hutan lindung, Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya berupa kawasan resapan air, Kawasan perlindungan setempat (sempadan sungai, sempadan pantai, sempadan mata air).

Fokus pengembangan kawasan lindung adalah Pemantapan pelestarian kawasan lindung dengan strategi meliputi:

- 1) menentukan deliniasi kawasan lindung berdasarkan sifat perlindungannya;
- 2) mempertahankan fungsi lindung secara ketat dan melarang alih fungsi pada kawasan lindung;
- 3) mengembangkan prasarana dan sarana peringatan dini dari kemungkinan adanya bencana alam;
- 4) mencegah kegiatan penambangan liar terutama pada kawasan yang membahayakan lingkungan; dan
- 5) mengembalikan rona alam melalui proses reklamasi pada lahan paska penambangan.

Gambar 6. 2
Peta Pengembangan Kawasan Lindung



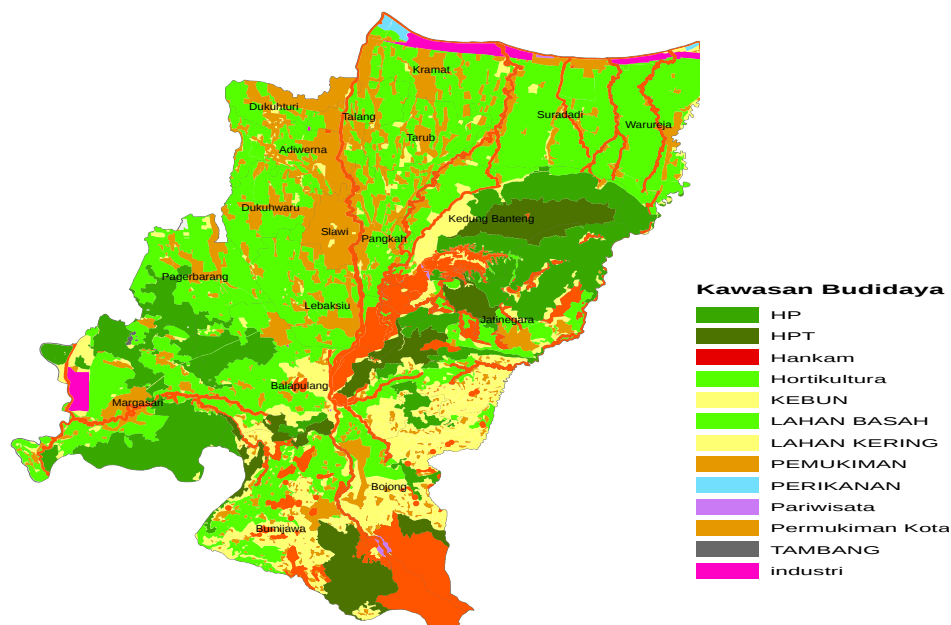
Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012 - 2032

D. Pengembangan Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya merupakan kawasan di luar kawasan lindung yang kondisi fisik dan potensi sumber daya alamnya dianggap dapat dan perlu dimanfaatkan baik bagi kepentingan produksi (kegiatan usaha) maupun pemenuhan kebutuhan permukiman. Oleh karena itu, dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal, penetapan kawasan ini dititikberatkan pada usaha untuk memberikan arahan pengembangan berbagai kegiatan budidaya sesuai. Meliputi kawasan peruntukan hutan produksi; kawasan peruntukan pertanian; kawasan peruntukan perikanan; kawasan peruntukan pertambangan; kawasan peruntukan industri; kawasan peruntukan pariwisata; kawasan peruntukan permukiman; kawasan peruntukan lainnya.

Untuk mendukung kebijakan kedaulatan pangan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032 telah ditetapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) seluas 41.296 Ha (47% dari luas wilayah Kabupaten Tegal). Dalam Perda RTRW pengembangan wilayah untuk permukiman penduduk sampai dengan Tahun 2032 dialokasikan 15.951 Ha, sedangkan kondisi eksisting permukiman saat ini adalah 14.093 Ha. Alokasi pengembangan permukiman saat ini hanya terkonsentrasi di perkotaan, sedangkan di perdesaan pengembangannya belum optimal.

Gambar 6.3
Peta Pengembangan Kawasan Budidaya



Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012 - 2032

Alokasi pengembangan wilayah untuk industri berada di wilayah pantura dan margaayu seluas 1.214 Ha, Namun kondisi eksiting lahan yang dialokasikan untuk industri khususnya di Pantura merupakan permukiman dan lahan tambak masyarakat, sehingga apabila masyarakat ingin melakukan investasi di bidang industri dapat dilakukan di lokasi tersebut.

Tabel 6.11
Kawasan Budidaya dan Lindung

KAWASAN	LUAS (Ha)	KAWASAN	LUAS (Ha)
A. KAWASAN BUDIDAYA	86.200	B. KAWASAN LINDUNG	12.226
Hankam	63	Cagar Alam	10
Hortikultura	786	Cagar Budaya	11
Hutan Produksi	14.770	Fisiografis	1.588
Hutan Produksi Terbatas	6.520	Hutan Lindung	2.753
Industry	1.214	Kawasan Resapan Air	1.571
Kebun	3.966	Sempadan Mata Air	315
Lahan Sawah Basah	35.946	Sempadan Pantai	234
Lahan Sawah Kering	6.629	Sempadan Sungai	5.206
Pariwisata	87	Suaka Alam	13
Permukiman Desa	7.275	Waduk	524
Perikanan	237		
Permukiman Kota	8.676		
Pertambangan	33		

Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012 – 2032

E. Pengembangan Kawasan Strategis

Kawasan strategis di Kabupaten Tegal terdiri dari Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK):

- 1) Kawasan Strategis Provinsi, terdiri dari:
 - Kawasan Perkotaan Bregasmalang (Brebes, Kota, Tegal, Slawi, dan Pemalang) dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - Kawasan Panas Bumi Guci dan Baturaden dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/ atau teknologi tinggi;
 - Daerah Aliran Sungai kritis lintas Kabupaten/ Kota terletak di DAS Pemali dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
 - Kawasan Gunung Slamet dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- 2) Kawasan Strategis Kabupaten, terdiri dari:
 - kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi; kawasan perkotaan Slawi-Adiwerna, kawasan Industri Pantura dan Margasari, Kawasan Agropolitan (Kecamatan Bojong; dan Kecamatan Bumijawa) Kawasan Minapolitan terdiri (Perikanan tangkap Waduk Cacaban, dan Perikanan budidaya di Kecamatan Lebaksiu dan Balapulang), Wilayah perbatasan dengan Kabupaten Brebes terletak di Kecamatan Pagerbarang dan Margasari; Wilayah perbatasan dengan Kabupaten Pemalang terletak di Kecamatan Warureja dan Jatinegara; dan Wilayah perbatasan dengan Kota Tegal terletak di Kecamatan Kramat, Kecamatan Talang dan Kecamatan Dukuhturi. Kawasan Perdagangan dan Jasa Mejasem Raya di Kecamatan Kramat; serta Kawasan Perdagangan dan Jasa Balamoa di Kecamatan Pangkah dan Kecamatan Tarub;
 - kawasan strategis dari sudut kepentingan Sosial dan budaya, meliputi: kawasan Semedo di Kecamatan Kedungbanteng; dan Kawasan Pesarean Kecamatan Adiwerna.

F. Pengembangan Kawasan Perdesaan

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa, perlu dilakukan pembangunan antar-desa dalam satu kabupaten melalui Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Kawasan yang dapat ditetapkan sebagai kawasan perdesaan merupakan bagian dari suatu kabupaten/kota yang terdiri dari beberapa desa yang berbatasan dalam sebuah wilayah perencanaan terpadu yang memiliki kesamaan dan/atau keterkaitan masalah atau potensi pengembangan. Desa-desa yang berbatasan ini dapat terdiri atas desa dalam kecamatan yang berbeda.

Kajian eksploratif memunculkan delineasi pengelompokan desa dengan tema tertentu sesuai dengan kesamaan dan/atau keterkaitan masalah atau potensi pengembangan. Jumlah desa dalam suatu tema Kawasan Perdesaan disusun dengan mempertimbangkan dampak positif yang signifikan dalam mendukung pemajuan desa dan kabupaten.

Pendekatan (ancangan) pemajuan desa melalui pengelompokan desa secara tematik ini tidak dilakukan hanya untuk suatu kelompok desa tertentu, melainkan digunakan untuk membangun seluruh desa, tidak ada satu desapun yang terlepas dari pengelompokan secara tematik tersebut.

Dalam memajukan desa dengan pendekatan kawasan ini, keterkaitan antara pengembangan kelompok desa dan kelurahan merupakan pertimbangan penting, sesuai dengan amanat undang-undang Penataan Ruang. Dengan demikian sejumlah 281 desa dan 6 kelurahan di Kabupaten Tegal merupakan suatu kesatuan yang maju secara terpadu dan berkelanjutan.

Pengelompokan desa dalam Kawasan Perdesaan dilakukan dalam kesamaan dan/atau keterkaitan masalah atau potensi pengembangan. Artinya, tema dikemas dalam bentuk yang cukup unik dan tajam agar memiliki daya ungkit yang tinggi.

Kawasan I, yang terdiri dari desa-desa di kecamatan Suradadi, Kramat dan Warureja, diberi tema yang mengangkat keserasian hamparan kebun melati dan industri di sepanjang pesisir utara kabupaten Tegal. Dengan profil seperti itu kawasan perdesaan ini diberi nama “Industri di Lautan Melati”.

Kawasan II, yang terdiri dari desa-desa di kecamatan Talang, Pangkah, Adiwerna, Dukuhturi dan Tarub, mengangkat tema keserasian antara kegiatan persawahan padi dengan sentra industri kecil di sekitarnya yang berpotensi mengeluarkan limbah. Dengan profil seperti itu, kawasan perdesaan ini diberi nama “Langkah Adituri” yang diambil dari singkatan kata Talang, Pangkah, Adiwerna, Tarub dan Dukuhturi.

Kawasan III, yang terdiri dari desa-desa di kecamatan Jatinegara, Kedungbanteng dan Pangkah, merupakan perpaduan antara infrastruktur pertanian berupa waduk dengan segenap sistem pemasokan air, digabung dengan pelestarian warisan bumi yang berpotensi sebagai eduwisata. Dengan profil seperti itu, kawasan perdesaan ini diberi nama “Warisan Bumi Lestari”.

Kawasan IV, yang terdiri dari desa-desa di kecamatan Balapulang, Lebaksiu, Dukuhwaru, Slawi dan Pangkah, memiliki keunikan tersendiri. Di kawasan ini terdapat pusat pemerintahan kabupaten Tegal. Taman Teknologi Pertanian juga berlokasi di kawasan ini. Dengan demikian kawasan ini merupakan pendorong inovasi kawasan perdesaan. Dengan profil seperti itu, kawasan perdesaan ini diberi nama “Handayani Inovasi”.

Kawasan V, yang terdiri dari desa-desa di kecamatan Margasari, Balapulang dan Pagerbarang, merupakan sentra budidaya yang cukup lengkap meliputi tanaman pangan, peternakan termasuk sentra penanaman pohon sebagai bahan baku bangunan. Industri sandang juga mulai dimulai di sini, sehingga tema kawasan perdesaannya adalah perpaduan antara kegiatan-kegiatan tadi. Dengan profil seperti itu, kawasan perdesaan ini diberi nama “Sapa Papa”, yang merupakan singkatan dari kata Sandang, Pangan, Papan dan Pakan.

Kawasan VI, yang terdiri dari desa-desa di kecamatan Balapulang, Bumijawa dan Bojong, memiliki ciri pertanian yang khusus. Budidaya tanaman obat berpusat di sini, bahkan dilengkapi dengan klinik jamu. Selain budidaya tanaman berkhasiat obat, di kawasan ini juga terdapat potensi pemanfaatan air untuk kegiatan terapi. Dengan ciri-

ciri tersebut, ditambah dengan lingkungan alam yang menarik, kawasan ini bertepatan kesehatan alami dan pariwisata. Dengan profil seperti itu, kawasan perdesaan ini diberi nama “Sehat Alami”.

Untuk membuat gerakan pembangunan Kawasan Perdesaan ini menjadi efisien, masing-masing Kawasan Perdesaan Tematik kemudian dibagi menjadi beberapa sub-kawasan untuk kepentingan kemudahan pengelolaan.

Karena sebagian besar wilayah kabupaten Tegal merupakan kawasan perdesaan, ditambah dengan pusat pemerintahan kabupaten berada di kawasan perdesaan, maka Pembangunan Kawasan Perdesaan dapat dijadikan “cross cutting issues” yang sangat strategis.

Karena kawasan perdesaan mencakup seluruh desa di kabupaten Tegal, program-program penting pembangunan kabupaten Tegal perlu digerakkan melalui Kawasan Perdesaan Tematik.

Dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan Tematik, program penting pembangunan kabupaten dijadikan program generik, sehingga seluruh kawasan perdesaan wajib melaksanakannya, sedangkan program yang sesuai dengan tema kawasan perdesaan dilaksanakan sebagai program spesifik.

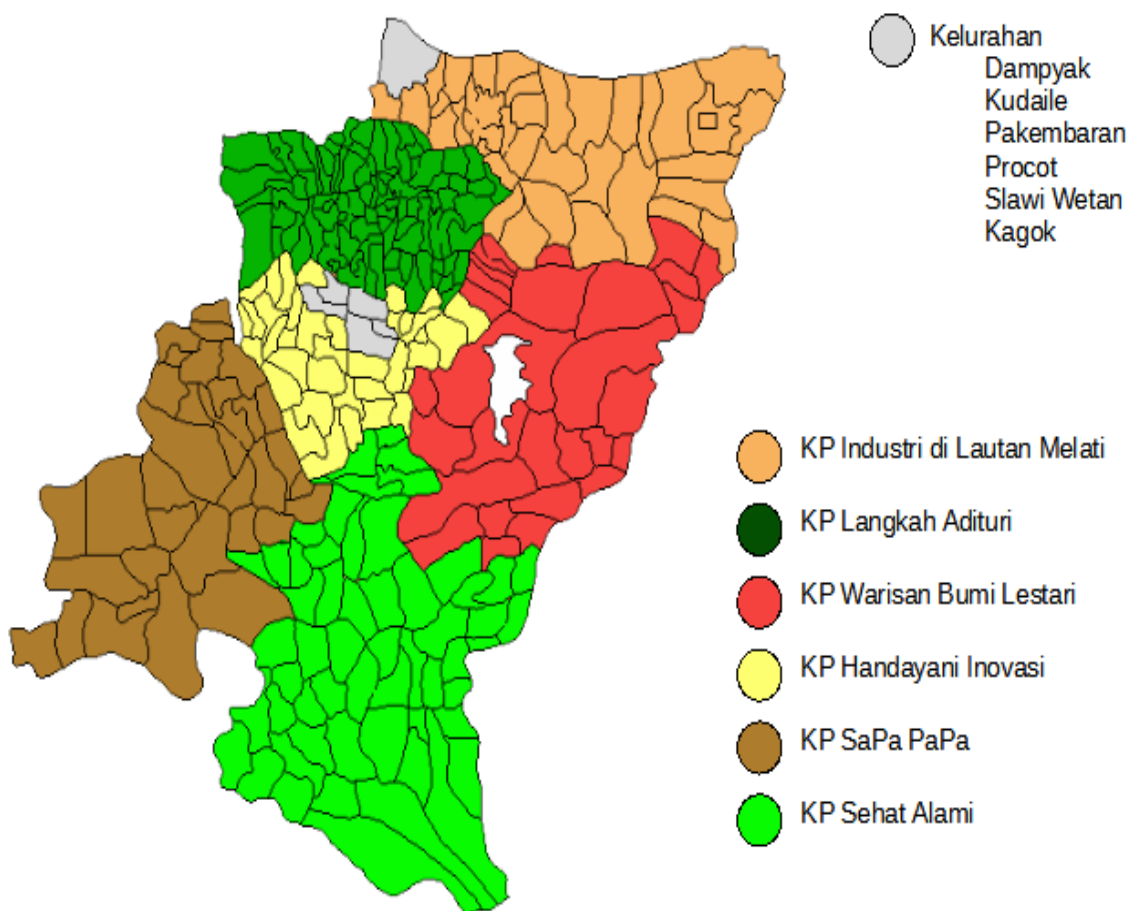
Program penting yang dapat dilaksanakan sebagai program generik adalah sebagai berikut:

Sistem pengelolaan sampah, Kegiatan ramah lingkungan, Penumbuhan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT), Peningkatan akses telekomunikasi, Jalan lingkar kawasan, Transportasi lingkar kawasan, termasuk penataan transportasi tertentu, Ruang publik terbuka, Pusat belajar masyarakat, termasuk balai pertemuan warga, fasilitas kesehatan masyarakat, Pengukuran daya dukung lingkungan, Peningkatan skor SDG, termasuk penanganan stunting, dan Pelaksanaan Permendes tentang prioritas pembangunan desa.

Program spesifik Kawasan Perdesaan Tematik disusun sesuai dengan tema kawasan dan disepakati oleh desa-desa anggota kawasan.

Pembangunan kawasan perkotaan yang juga merupakan program pembangunan kabupaten diserasikan dengan pembangunan tata ruang dan pendukung pembangunan secara komplementer.

Gambar 6.4
Delineasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Tegal



Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal tahun 2021

G. Pengembangan Kawasan Strategis Bregasmalang

Kawasan strategis Provinsi Kawasan Perkotaan Bregasmalang (Brebes, Kota, Tegal, Slawi, dan Pemalang) telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan strategis Provinsi Kawasan Perkotaan Bregasmalang (Brebes, Kota, Tegal, Slawi, dan Pemalang Tahun 2016 – 2036. Dimana tujuan dari penataan ruang kawasan strategis Bregasmalang adalah ***Terwujudnya kawasan perkotaan Bregasmalang yang mampu berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh sektor perdagangan, jasa, industri, transportasi, pertanian, dan perikanan dalam kesatuan kawasan yang berkelanjutan.*** Sedangkan kebijakan penataan ruang Kawasan Strategis Bregasmalang adalah :

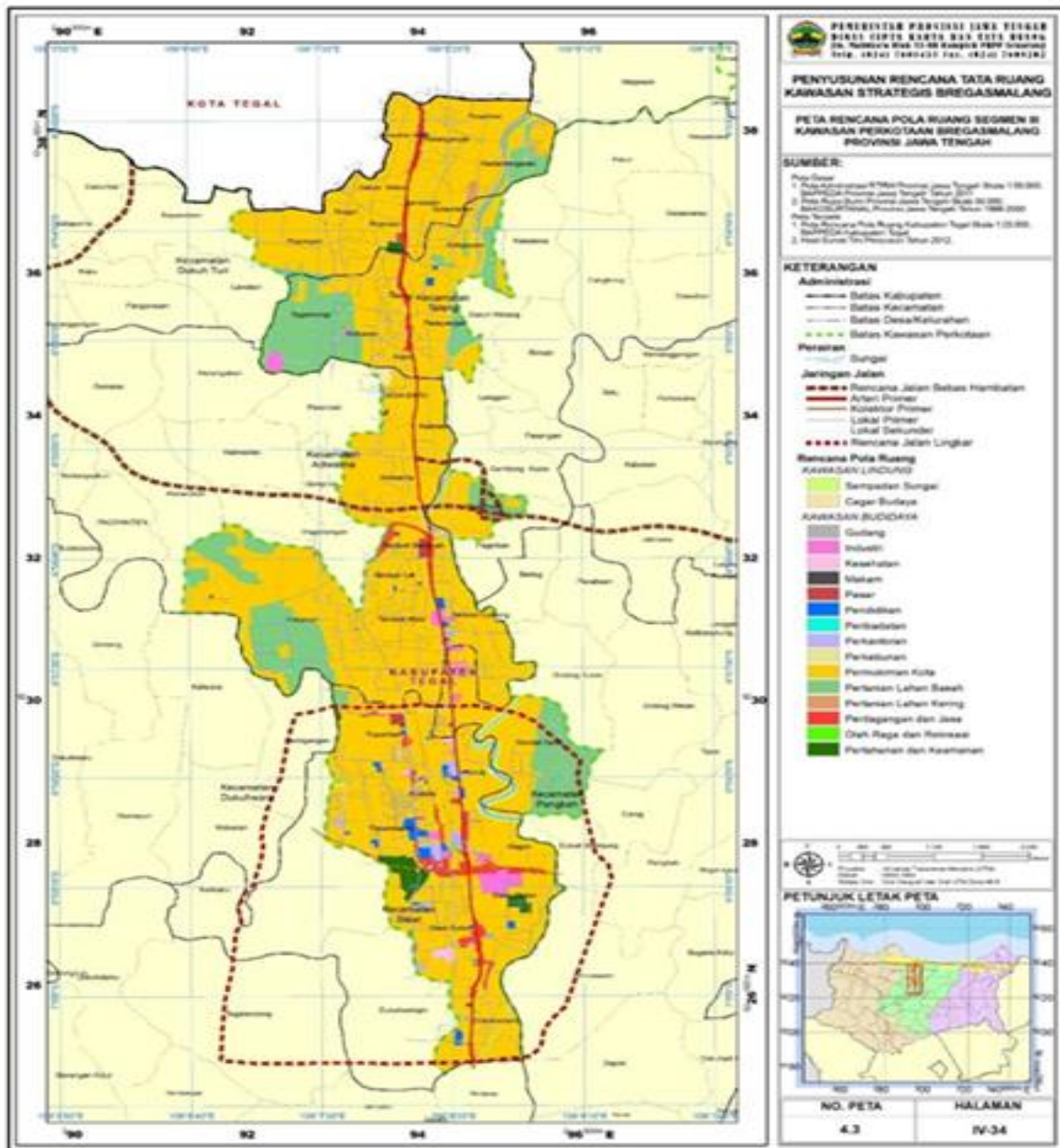
- 1) Pemantapan peran antar kawasan;
- 2) Pengembangan prasarana dan sarana transportasi;
- 3) Peningkatan prasarana dan sarana sumberdaya air;
- 4) Peningkatan prasarana dan sarana sumberdaya energi;
- 5) Peningkatan prasarana dan sarana telekomunikasi;

- 6) Peningkatan prasarana dan sarana lingkungan;
- 7) Perwujudan kegiatan perdagangan dan jasa yang mampu menjadi pengumpul dan pendistribusi produk komoditas ekonomi wilayah bregasmalang;
- 8) Pengembangan kegiatan dan kawasan industri;
- 9) Perlindungan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- 10) Peningkatan pengelolaan kawasan pantai yang produktif dan ramah lingkungan; dan
- 11) Pencegahan dan penanggulangan bencana.

Luas wilayah kawasan strategis Bregasmalang 24.786 Ha, sedangkan wilayah Kabupaten Tegal yang masuk dalam wilayah kawasan strategis Bregasmalang adalah sekitar 7.675 Ha meliputi 8 Kecamatan dan 49 Desa/Kelurahan. Berdasarkan pembagian wilayah Perencanaan Kawasan Strategis Bregasmalang, maka wilayah Kabupaten Tegal masuk dalam 3 wilayah perkotaan yaitu:

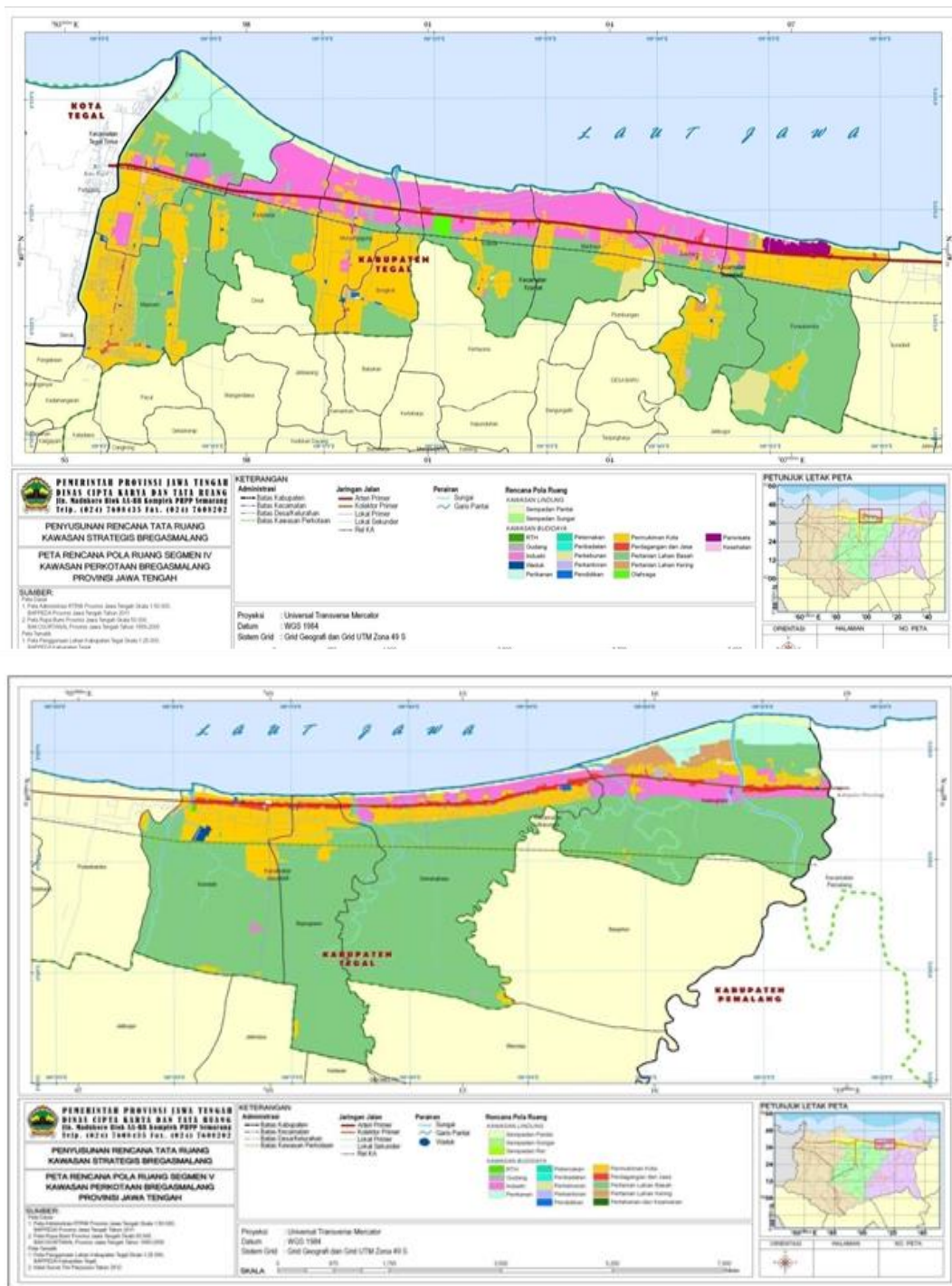
- 1) Kawasan Perkotaan Inti 3 yang meliputi wilayah Kecamatan Slawi, sebagai perkotaan di Kecamatan Adiwerna, Kecamatan Talang dan Wilayah Perkotaan Kecamatan Dukuhturi. Sedangkan untuk arah pengembangannya antara lain:
 - pemantapan peran kawasan perkotaan Slawi sebagai PKL;
 - pengembangan kawasan industri kecil dan/atau mikro;
 - pengembangan pasar tradisional hasil industri rumah tangga;
 - pengembangan terminal penumpang tipe B; dan
 - pengembangan terminal barang.
- 2) Kawasan Perkotaan Penyangga I yang meliputi wilayah Kecamatan Kramat dan Sebagian Suradadi yang sejajar dengan Jalur arteri Primer Jalan Pantura. Sedangkan untuk arah pengembangannya antara lain:
 - pengotimalan kawasan peruntukan industri; dan
 - pengembangan kawasan perikanan budidaya.
- 3) Kawasan Perkotaan Penyangga II yang meliputi wilayah Sebagian Wilayah Kecamatan Suradadi dan Sebagian wilayah Kecamatan Warureja yang sejajar dengan Jalur arteri Primer Jalan Pantura. Sedangkan untuk arah pengembangannya antara lain:
 - pengotimalan kawasan peruntukan industri;
 - pengembangan kawasan perikanan budidaya dan tangkap; dan
 - pengembangan wisata pantai.

Peta Kawasan Perkotaan Inti I Bregasmalang



Sumber : RTR Kawasan Strategis Bregasmalang Tahun 2016 - 2032

Peta Kawasan Perkotaan Penyangga I dan II Bregasmalang



Sumber : RTR Kawasan Strategis Bregasmalang Tahun 2016 – 2032

6.9. Pelaksanaan Program Unggulan Kepala Daerah

Pelaksanaan program unggulan kepala daerah merupakan realisasi janji politik kepada masyarakat. Diawal masa jabatan bupati/wakil bupati telah menghadapi kendala yang mengganggu pelaksanaan program unggulan tersebut terutama akibat adanya pandemi covid-19. Untuk itu dalam Perubahan RPJMD program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal periode 2019-2024 kembali ditekankan dengan formulasi penyesuaian kondisi terkini. Adapun pelaksanaan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal tahun 2019-2024 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6.12
Pelaksanaan Program Unggulan Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal
Tahun 2019-2024

No	Program Unggulan	Aktivitas Utama	Lokus Program
1	Pembangunan Sentra Pelayanan Publik Prima	Pelayanan publik satu pintu secara digital	Wilayah Perkotaan Slawi
2	Penumbuhan Wirausaha Muda, Perluasan Lapangan Kerja dan Investasi Pro Rakyat	Penumbuhan Wirausaha Pemuda dilakukan melalui : Pendampingan, pemajuan, kolaborasi Penyedia Layanan Pengembangan Usaha (PLPU)	Kabupaten Tegal
		Perluasan Lapangan Kerja dilakukan melalui : kolaborasi oleh UMKM di Pusat Perdagangan strategis seperti : Taman Rakyat Slawi Ayu (TRASA), Kawasan Pariwisata, Alun -Alun Hanggawana	Kota Slawi, Obyek Wisata Guci, Obyek Wisata Purwahamba Indah, Obyek Wisata Cacaban, Obyek Wisata Pasar Slumpring Cempaka, Obyek Wisata Sindang Kemadu
		Investasi Pro Rakyat dilakukan melalui : Forum Bisnis dan Penyediaan Kawasan Peruntukan Industri	Kecamatan Margasari, Kecamatan Warureja, Kecamatan Kramat
3	Penguatan Jaringan Infrastruktur dan Jalan Bebas Lubang serta Pengembangan Wilayah	Penguatan Jaringan Infrastruktur dan Jalan Bebas Lubang melalui : Penyediaan Prasarana Jalan seperti PJU, Drainase dan sarana Keselamatan Lalu Lintas serta Tim Reaksi Cepat Pemeliharaan Jalan.	Lokasi Seluruh Kabupaten Tegal terutama kawasan perbatasan seperti Kecamatan Warureja, Kecamatan dukuhturi, Kecamatan Jatinegara, Kecamatan Margasari, Kecamatan Bumijawa; kawasan perkotaan seperti : Kecamatan Slawi, Kecamatan Adiwerna

No	Program Unggulan	Aktivitas Utama	Lokus Program
		Pengembangan Wilayah dilakukan melalui Implementasi Perpres 79 Tahun 2019	Pasar (Kecamatan Bumijawa, Kecamatan Adiwerna, Kecamatan Pangkah) SPAM (Kecamatan Warureja, Kecamatan Suradadi) BBI (Kecamatan Lebaksiu) Jalan Ruas Yomani-Guci (Kecamatan Lebaksiu, Kecamatan Balapulang Kecamatan Bojong), Embung (Kecamatan Jatinegara), Optimalisasi Cacaban (Kecamatan Kedungbanteng)
4	Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh dan Rumah Sehat bagi Warga Miskin	Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh dilakukan melalui : Program Kampung Ora Kumuh	Kecamatan Warureja, Kecamatan Suradadi, Kecamatan Kramat, Kecamatan Tarub, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Jatinegara, Kecamatan Adiwerna, Kecamatan Slawi, Kecamatan Dukuhturi, Kecamatan Lebaksiu
		Penataan Rumah Sehat bagi Warga Miskin dilakukan melalui : melalui program RTLH	Seluruh wilayah Kabupaten Tegal terutama Kecamatan Bojong, Kecamatan Bumijawa, Kecamatan Warureja, Kecamatan Suradadi, Kecamatan Kramat, Kecamatan Tarub, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Jatinegara, Kecamatan Adiwerna, Kecamatan Slawi, Kecamatan Dukuhturi, Kecamatan Lebaksiu
5	Penanganan Dampak Covid-19	Penanganan Dampak Covid-19 melalui : Penanganan Lanjutan pasca covid-19, Jaminan Sosial, Jaminan Ekonomi	Seluruh kabupaten Tegal

No	Program Unggulan	Aktivitas Utama	Lokus Program
6	Penataan Kota Slawi	Penataan Kota Slawi dilakukan melalui 3 aspek yaitu Aksesibilitas, Amenitas, dan Atraksi.	Koridor 1 meliputi : Jalan Menteri Supeno 1 dan 2, Jln Gajah Mada, Jalan Juanda dan Kawasan Alun-alun Slawi. Koridor 2 meliputi : Jln Dr. Soetomo, Letjen. Sugiono dan Brigjen. Katamso
7	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dilakukan melalui Program Merdeka Sampah	Semua Kecamatan, untuk tahap awal, Kecamatan Adiwerna, Kecamatan Balapulang, kecamatan Bumijawa, Kecamatan Bojong, Kecamatan Dukuhturi, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Kramat, Kecamatan Lebaksiu, Kecamatan Pagerbarang, Kecamatan Pangkah, Kecamatan Slawi, Kecamatan Talang, Kecamatan Tarub
8	Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik antara lain melalui penerapan e-office	Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Tegal
9	Pembinaan Olahraga, Pemberdayaan Pemuda dan Pelestarian Budaya	Pembinaan Olahraga melalui Pengembangan Olahraga Rekreasi dan Olahraga Prestasi	Seluruh Kecamatan Kabupaten Tegal
		Pemberdayaan Pemuda melalui pengoptimalan kepeloporan pemuda dan pengembangan pemuda kreatif	Seluruh Kecamatan Kabupaten Tegal
		Pelestarian Budaya melalui pelestarian, pemajuan dan pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Seluruh Kecamatan Kabupaten Tegal

Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

6.10. Program Pembangunan Daerah

Adapun Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 6.13
Misi, Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal
Tahun 2020-2021

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja Program Tahun 2020		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung jawab
								Target	Realisasi	Target	Rp. (000)	
Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat	Mewujudkan aparatur birokrasi yang profesional		Indeks Reformasi Birokrasi			Opini; Tahunan	45,25	50,1	63,69	55,1		Inspektorat, BPKAD, BP2D
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat			Persen; Tahunan	75	78,61	78,21	80,46		Setda, Disdukcapil, BKD, BPBD, 18 Kecamatan, Sek. DPRD
				Program Pelayanan Pencatatan Sipil							428.400	Dinas Dukcapil
					persentase penduduk 0-18 tahun ber akta kelahiran	Persen; Tahunan; IKU OPD	69,46	80	81	85		
					persentase penduduk ber akta kematian	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	14,73	20	20	25		
				Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk							474.300	Dinas Dukcapil
					Persentase Penduduk ber Kartu Keluarga	Persen; Tahunan; IKU OPD	89,09	90	91	92		
					Persentase Penduduk ber KTP-el	Persen; Tahunan; IKU OPD	89,43	90	91,5	92		

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja Program Tahun 2020		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung jawab
								Target	Realisasi	Target	Rp. (000)	
					Persentase anak memiliki KIA	Persen; Tahunan; IKU OPD	1,85	40	35	50		
			SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)			Skor; Tahunan	2,58	2,75	2,2	3		Dinas Kominfo
				Program Teknologi Informatika dan Persandian							14.203.813	Dinas Kominfo
					Indeks Keamanan Informasi (KAMI)		147	272	270	300		
		Meningkatnya kualitas manajemen kinerja	Nilai SAKIP Kabupaten			Nilai; Tahunan	57,61	61,61	61,36	63,61		Setda, Bappeda dan Litbang, Set. DPRD, Inspektorat
				Program Perencanaan dan Penganggaran Program							1.224.000	Bappeda dan Litbang
					Persentase Dokumen Perencanaan disusun sesuai tahapan		99	100	100	100		
				Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan							867.000	Bappeda dan Litbang
					Tingkat Kesesuaian rencana dan realisasi pembangunan		82	85	85	86		

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja Program Tahun 2020		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung jawab
								Target	Realisasi	Target	Rp. (000)	
					Tingkat ketercapaian indikator pembangunan sesuai target		83,01	85	85	85		
				Program Bina Organisasi							1.198.500	Bagian Organisasi Setda
					Predikat (Nilai) SAKIP Pemerintah Kabupaten Tegal	Persen; Tahunan; IKU OPD	57,61	59,61	59,61	61,61		
					Persentase IKM Kabupaten	Persen; Tahunan; IKU OPD	71,28	72,53	72,53	73,78		
					Persentase OPD Rumpun Organisasi tercapai LKJIP OPD kategori BB	Persen; Tahunan; IKU OPD	35,41	37,41	37,41	39,41		
				Program Manajemen Risiko, Tata Kelola dan Penguatan Pengendalian							153.000	Inspektorat
					Persentase OPD yang tercapai IKUnya	Persen; Tahunan; IKU OPD	57,01	59,23	59,23	60		
		Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK			Opini; Tahunan	WTP	WTP	WTP	WTP		BPKAD, BP2D, Dispermasdes
				Program Pengawasan Intern dan Penanganan Pengaduan Masyarakat							1.285.000	Inspektorat

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja Program Tahun 2020		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung jawab
								Target	Realisasi	Target	Rp. (000)	
					Persentase penyelesaian LHP	Persen; Tahunan; IKU OPD	90	91	91	91		
				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah							2.700.000	BPKAD
					Persentase OPD yg telah mengelola BMD yang baik dan benar	Persen; Tahunan; IKU OPD	50	60	60	70		
				Program Akuntansi dan Pelaporan							647.700	BPKAD
					Persentase Ketepatan waktu Perda Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Persen; Tahunan; IKU OPD	100	100	100	100		
					Persentase OPD yang telah menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP	Persen; Tahunan; IKU OPD	100	100	100	100		
				Program Pajak PBB dan BPHTB							2.993.700	BP2D
					Hasil penagihan pajak PBB dan BPHTB yang tertagih	Persen; Tahunan; IKU OPD		100	100	100		
				Program Penataan Desa							663.000	Dinas Permasdes

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja Program Tahun 2020		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung jawab
								Target	Realisasi	Target	Rp. (000)	
					Persentase Lembaga Pemerintahan Desa yang bekerja sesuai fungsinya	Persen; Tahunan; IKU OPD	50,15	58	58	64		
				Program Administrasi Pemerintahan Desa							805.000	Dinas Permasdes
					Persentase Desa Tertib Adminitrasi Pemerintahan Desa	Persen; Tahunan; IKU OPD	15	25	25	50		
		Meningkatnya kualitas manajemen kepegawaian daerah	Indeks Profesionalitas ASN			Skor; Tahunan	70	72,12	72,24	74,24		BKD
				Program Pendidikan dan Pelatihan ASN							3.240.648	BKD
					persentase PNS mengikuti pelatihan kepemimpinan dan mendapatkan STTPL		62,76	5,62	5,62	5,62		

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja Program Tahun 2020		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung jawab
								Target	Realisasi	Target	Rp. (000)	
					persentase pejabat fungsional non pendidikan dan pengawasan yang mengikuti pelatihan fungsional dan mendapatkan Sertifikat/STTPL		4,27	4,34	4,34	4,34		
					persentase CPNS yang mengikuti Pelatihan Dasar/ Prajabatan sesuai dengan peraturan		100	100	100	100		
				Program Pembinaan Karir dan Penilaian Kompetensi ASN							1.800.360	BKD
					persentase jabatan JPT, Administrator dan Pengawas terisi		85	95,5	95,5	95,5		
					persentase jabatan fungsional non guru/non kesehatan terisi		21,07	2,77	2,77	2,77		
					persentase JPT dan Administrasi yang diuji kompetensinya		24,77	13,68	13,68	13,68		

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja Program Tahun 2020		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung jawab
								Target	Realisasi	Target	Rp. (000)	
Memperkuat daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur yang andal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan	Meningkatkan konektivitas antar wilayah		Indeks Williamson			Persen; Kumulatif	2,6	2,58	N/A	2,54		DPU, Disperkimtaru
		Meningkatnya infrastruktur Wilayah yang mantap	Persentase infrastruktur wilayah mantap			Persen; Tahunan	70,17	77,73	80,04	82,12		DPU
			Persentase infrastruktur permukiman layak			Persen; Tahunan	71,45	80,09	82,12	83,78		Disperkimtaru, DLH
				Program Jalan							123.700.000	
					Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen; Kumulatif;	62,42	70,02	70,02	75,02		
					Persentase jalan yang memiliki drainase/ saluran pembuangan air (minimal 0,5-1)	Persen; Kumulatif;	30	40	40	45		
				Program Jembatan							20.900.000	DPU
					Proporsi jembatan dalam kondisi baik	Persen; Kumulatif;	67,11	73,51	73,51	79,11		

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja Program Tahun 2020		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung jawab
								Target	Realisasi	Target	Rp. (000)	
				Program Tata Perumahan & Permukiman							17.106.420	Dinas Perkimtaru
					Cakupan Akses Layanan Air Minum	Persen; Kumulatif;	86,23	88	88	89		
					Cakupan Akses Layanan Sanitasi (jamban)	Kumulatif;	88,7	90	90	93		
					Persentase Penurunan Luas Kawasan Kumuh	Kumulatif;	23	15,4	15,4	15,4		
					Persentase Penanganan Rumah Tidk Layak Huni (RTLH)	Kumulatif;	12,1	15	15	18		
				Program Tata Ruang dan Pertanahan							4.666.500	Dinas Perkimtaru
					Persentase Ketaatan terhadap RTRW	Persen; Tahunan	85	86	86	87		
				Program Tingkat Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)							26.876.000	DLH
					Persentase sampah terangkut ke TPA	Persen; Tahunan	50	60,35	60,35	70,75		
					Persentase Limbah B3 ditangani	Persen; Tahunan	50	60,35	60,35	70,75		

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja Program Tahun 2020		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung jawab
								Target	Realisasi	Target	Rp. (000)	
		Meningkatnya Sistem jaringan/ konektivitas perhubungan	Rasio konektivitas perhubungan			Skor; Tahunan	67,11	74,23	75,2	75,25		Dishub
				Program Lalu Lintas							2.336.800	
					Persentase Jalan memiliki Perlengkapan Lalu Lintas Jalan	Persen; Tahunan	34,49	43	43	54		Dishub
					Persentase Rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)	Persen; Tahunan	58,33	20	20	40		Dishub
					Persentase Pelanggaran Kendaraan Bermotor Umum	Persen; Tahunan	38,92	35	35	30		Dishub
					Persentase Lokasi Titik Parkir	Persen; Tahunan	57	62	62	67		
				Program Keselamatan Jalan							9.756.300	
					Persentase perlintasan KA memiliki gardu dan palang pintu	Persen; Tahunan	32	34	34	36		Dishub
					Persentase LPJU (Lampu Penerangan Jalan Umum)	Persen; Tahunan	45,15	56,57	56,57	67		Dishub

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja Program Tahun 2020		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung jawab
								Target	Realisasi	Target	Rp. (000)	
					Persentase Fatalitas Korban Kecelakaan	Persen; Tahunan	4,17	4	4	3,8		
				Program Angkutan							2.907.000	
					Persentase Layanan Angkutan Darat	Persen; Tahunan	29,41	31	31	33		Dishub
					rasio ijin trayek angkutan pedesaan/perkotaan	Persen; Tahunan	66	76	76	80		Dishub
					Persentase Kepemilikan Kendaraan Wajib Uji	Persen; Tahunan	77,8	80	80	82		Dishub
	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup		Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			Persen; Tahunan	53,78	64,28	55,05	55,13		DLH
		Meningkatnya kualitas air dan kualitas udara	Indeks Kualitas Air			Persen; Tahunan	61	72	31,11	31,15		DLH
			Indeks Kualitas Udara			Persen; Tahunan	77	77,5	84,99	85,12		
				Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup							4.309.500	DLH
					indeks kualitas air	Persen; Tahunan	61	72	72	74		
					indeks kualitas udara	Persen; Tahunan	77	77,5	77,5	78		
					indeks ketutupan lahan	Persen; Tahunan	59,21	59,21	59,21	59,21		

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja Program Tahun 2020		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung jawab
								Target	Realisasi	Target	Rp. (000)	
				Program Peningkatan Kapasitas dan Penataan Hukum Lingkungan							663.000	DLH
					Persentase pelanggaran lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	Persen; Tahunan	100	100	100	100		
Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan	Mewujudkan perekonomian rakyat yang kuat berbasis pertanian, industri pengolahan dan pariwisata		Pertumbuhan ekonomi			Persen; Tahunan	5,4	5,48	-1,46	3,2		Disperinaker, Disdakop dan UKM, Dis Tan KP, DKPP
		Meningkatnya kesejahteraan rakyat disektor pertanian dan perikanan	Laju PDRB Sektor Pertanian			Persen; Tahunan	1,35	0,5	2,18	2,33		Dinas Tan KP
			Nilai Tukar Nelayan (NTN)			Persen; Tahunan	121,38	122,02	N/A	122,66		DKPP
				Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian							4.635.000	Dinas Tan KP
					Indeks Pertanaman	Skor; Tahunan	1,5	1,54	1,54	1,58		
				Program Peningkatan Produksi Pertanian, Perkebunan dan Hortikultura							2.103.000	Dinas Tan KP

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja Program Tahun 2020		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung jawab
								Target	Realisasi	Target	Rp. (000)	
					Pertumbuhan subsektor Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura	Persen; Tahunan	1,32	1,2	1,2	1,25		
					Pertumbuhan Ekonomi Subsektor Tanaman Pangan	Persen; Tahunan	-1,3	0,1	0,1	0,15		
					Pertumbuhan Ekonomi Subsektor Tanaman Perkebunan	Persen; Tahunan	1,18	1	1	1,1		
					Pertumbuhan Ekonomi Subsektor Tanaman Holtikultura	Persen; Tahunan	1,32	1,2	1,2	1,25		
				Program Perikanan Tangkap							2.275.620	DKPP
					Jumlah produksi perikanan tangkap	Nilai; Tahunan	1.551.423	1.566.937	1.566.937	1.582.606		
					Nilai produksi perikanan tangkap	Nilai; Tahunan	14.459.278	14.603.871	14.603.871	14.749.909		
				Program Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan							1.173.000	DKPP
					Jumlah produksi perikanan budidaya	Nilai; Tahunan	2.047.818	2.068.296	2.068.296	2.088.979		
					Nilai produksi perikanan budidaya	Nilai; Tahunan	50.961.889	87.682.222	87.682.222	88.559.044		

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja Program Tahun 2020		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung jawab
								Target	Realisasi	Target	Rp. (000)	
					Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan	Nilai; Tahunan	4.399.411	4.443.405	4.443.405	4.487.839		
					Nilai produksi pengolahan hasil perikanan	Nilai; Tahunan	219.200.656	221.392.663	221.392.663	223.606.589		
		Meningkatnya kesejahteraan rakyat di sektor industri	Laju PDRB sektor Industri			Persen; tahunan	6,02	6,09	-0,46	1,45		Disperinaker
				Program Peingkatan Layanan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Tekstil dan Aneka							6.337.750	Dinas Perinaker
					Pertumbuhan sub sektor PDRB industri logam	Persen; Tahunan;	7	7,9	7,9	7,9		
					cakupan bina kelompok pengrajin industri logam, mesin, alat transportasi, tekstil, aneka	Tahunan; Permendagri No. 86/2017	4,25	4,95	4,95	5		
				Program Peningkatan Layanan Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan							459.000	Dinas Perinaker
					Pertumbuhan sub sektor PDRB industri agro	Persen; Tahunan;	7	7,4	7,4	7,4		

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja Program Tahun 2020		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung jawab
								Target	Realisasi	Target	Rp. (000)	
		Meningkatnya kesejahteraan rakyat di sektor Pariwisata	Jumlah Wisatawan Mancanegara			Jumlah; Tahunan	487	587	137	150		Dinas Parpora
			Jumlah Wisatawan Nusantara			Jumlah; Tahunan	1.052.487	1.152.587	466.351	552.687		Dinas Parpora
				Program Pemasaran dan Pengembangan Produk Wisata							1.550.400	Dinas Parpora
					Jumlah Kunjungan Wisnu dan wisman	Jumlah; Tahunan	1.052.487	1.052.587	1.052.587	1.052.687		
					Rata-rata lama kunjungan wisata	Persen; Tahunan	0,9	0,08	0,08	0,09		
				Program Obyek dan Sarana Wisata							6.677.940	Dinas Parpora
					Persentase Sarana dan Prasarana Pariwisata dalam Kondisi Baik	Persen; Tahunan	22,22	66,67	66,67	66,67		
					Persentase Usaha Pariwisata memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	Persen; Tahunan	70	75	75	80		
		Meningkatnya kesejahteraan rakyat di sektor Perdagangan	Laju PDRB sektor Perdagangan			Persen; Tahunan	5,95	6,02	-4,2	2,56		Dinas Dag Kop & UKM

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja Program Tahun 2020		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung jawab
								Target	Realisasi	Target	Rp. (000)	
				Program Perdagangan							2.232.100	Dinas Dagkop UKM
					Persentase Pedagang tertib niaga	Persen; Tahunan	18,73	20	20	40		
				Program Pengelolaan Pasar							7.524.500	Dians Dagkop UKM
					Jumlah pasar yang merujuk SNI	Jumlah; Tahunan	1 Pasar	1 Pasar	1 Pasar	1 Pasar		
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi	Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas		Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM),			Nilai; Tahunan	66,44	68,03	68,39	68,73		Disdikbud, Dinkes
			Indeks pemberdayaan Gender (IDG)			Nilai; Tahunan	69,05	69,3	69,25	69,7		Dinas P3AP2KB
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)			Nilai; Tahunan	86,76	86,85	86,85	86,94		Dinas P3AP2KB
		Meningkatnya kualitas layanan pendidikan masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah			Tahun; Tahunan	6,7	6,75	6,98	7,13		Disdikbud, Dis Arpus
			Harapan Lama Sekolah			Tahun; Tahunan	12,34	12,37	12,67	12,82		Disdikbud, Dis Arpus

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja Program Tahun 2020		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung jawab
								Target	Realisasi	Target	Rp. (000)	
				Program Pendidikan Dasar							143.144.802	Dinas Dikbud
					Angka Putus Sekolah SD/SDLB/MI	Persen; Tahunan	0,14	0,14	0,14	0,13		
					Angka Putus Sekolah SMP/SMPLB/MTs	Persen; Tahunan	0,13	0,13	0,13	0,12		
				Program Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal Informal							2.590.650	Dinas Dikbud
					APM PAUD	Persen; Tahunan	24,17	25,21	25,21	25,89		
					Angka partisipasi PNFI	Persen; Tahunan	31,24	32,95	32,95	34,65		
		Meningkatnya kualitas layanan kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup			Tahun; Tahunan	71,14	71,19	71,19	69,73		Dinkes, RSUD Dr. Soselo, RSUD Suradadi
				Program Kesehatan Masyarakat							45.046.000	Dinas Kesehatan
					Persentase Desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Persen; Tahunan	35	40	40	50		
					Cakupan rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	Persen; Tahunan	80	81	81	82		

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja Program Tahun 2020		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung jawab
								Target	Realisasi	Target	Rp. (000)	
					Cakupan desa/kelurahan siaga aktif mandiri	Persen; Tahunan	10	11	11	12		
		Meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan gender	Indeks pemberdayaan Gender (IDG)			Nilai; Tahunan	69,05	69,3	69,25	69,7		Dinas P3AP2KB
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)			Nilai; Tahunan	86,76	86,85	71,4	86,94		Dinas P3AP2KB
				Program Pemberdayaan Perempuan							681.750	Dinas P3AP2KB
					Capaian Keadilan dan Kesetaraan Gender/ APE (Anugerah Parahita Ekapraya)	Persen; Tahunan	70	72	72	73		
				Program Perlindungan Anak							707.000	
					Capaian Pemenuhan Hak Anak	Persen; Tahunan	50	55	55	60		
		Meningkatnya pengendalian pertumbuhan penduduk										
			Total Fertility Rate (TFR)				2,47	2,44	2,24	2,4		Dinas P3AP2KB
				Program Keluarga Berencana							3.273.275	

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja Program Tahun 2020		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung jawab
								Target	Realisasi	Target	Rp. (000)	
					Persentase pemakaian kontrasepsi (CPR)	Persen; Tahunan	69,14	69,81	69,81	70,21		
		Meningkatnya kualitas pemuda dan olahraga	Kota Layak Pemuda			Level; Tahunan	proses	proses	utama	utama		Dinas Parpora
			Jumlah Prestasi Olahraga tingkat Provinsi			Kali; Tahunan	5	6	N/A	7		Dinas Parpora
				Prgm Pemuda dan Olahraga							8.213.040	Dinas Parpora
					Persentase Wirausaha Pemuda	Persen; Tahunan	0,01	0,3	0,3	0,6		
					Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	Persen; Tahunan	100	100	100	100		
					Persentase Atlet yang Berprestasi	Persen; Tahunan	65	70	70	75		
	Menurunkan kesenjangan kemiskinan		Indeks Gini			Persen; Tahunan	0,311	0,307	0,307	0,303		Dinsos, Dispermasdes, Disperinaker, DPMPSTSP
		Menurunkan angka kemiskinan	Persentase penduduk miskin			Persen; Tahunan	7,94	7,01	8,14	8,41		Dinsos, Dispermasdes
				Program Rehabilitasi Sosial							1.800.335	Dinas Sosial

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja Program Tahun 2020		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung jawab
								Target	Realisasi	Target	Rp. (000)	
					Persentase Cakupan Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia, Disabilitas dan Tuna Sosial	Persen; Tahunan	83,34	84,34	84,34	85,34		
				Program Pemberdayaan Sosial							1.018.444	Dinas Sosial
					Persentase Cakupan Pemberdayaan Perorangan, Keluarga, Kelembagaan, Kepahlawanan dan Sumber Dana sosial	Persen; Tahunan	89,08	90,08	90,08	91,08	-	
				Program Perlindungan dan Jaminan Sosial							909.000	Dinas Sosial
					Persentase Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persen; Tahunan	80,91	82,46	82,46	90,48	-	
				Program Penanganan Fakir Miskin							934.250	Dinas Sosial
					Persentase Cakupan Penanganan Fakir Miskin	Persen; Tahunan	96,64	97,87	97,87	98,89	-	
				Program Pengembangan Desa							4.080.000	Dinas Permasdes

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja Program Tahun 2020		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung jawab
								Target	Realisasi	Target	Rp. (000)	
					Persentase Perkembangan BUMDES Tumbuh dan Berkembang	Persen; Tahunan	35 Bumdes	25	25	30		
					Persentase Pengembangan Desa	Persen; Tahunan	195 Kerjasama Desa dan 13 Kerjasama Antar Desa	100	100	100		
					Persentase Pengembangan Kawasan Perdesaaan	Persen; Tahunan	0 Pengembangan Kawasan Pedesaan.	50	50	62,5		
				Program Pemberdayaan Masyarakat							780.000	Dinas Permasdes
					Persentase Lembaga Kemasyarakatan aktif	Persen; Tahunan	10	25	25	50		
					Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang berdaya	Persen; Tahunan	5	25	25	50		
		Menurunnya pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka			Persen; Tahunan	8,45	7,45	9,82	10,42		Disperinaker, DPMPSTP
				Program Penanaman Modal							712.139	Dinas PMPTSP
					Nilai Investasi PMA	Rp (000.000); Tahunan;	480.800	500.000	500.000	520.000		
					Jumlah Investor PMA	Pemohon;Tahun	3	5	5	7		
					Nilai Investasi PMDN	Rp (000.000); Tahunan;	1.073.862	850.000	850.000	875.000		

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja Program Tahun 2020		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung jawab
								Target	Realisasi	Target	Rp. (000)	
					Jumlah Investor PMDM	Pemohon; Tahun	7.257	7.457	7.457	7.657		
				Program Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja							4.745.000	Dinas Perinaker
					AKAN	Jumlah, Tahunan	653	660	660	672		
					AKAD	Jumlah, Tahunan	231	246	246	261		
					AKL	Jumlah, Tahunan	120	140	140	159		
Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal	Mewujudkan kerukunan hidup dalam masyarakat		Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum			Indeks; Tahunan	80,66	82,66	82,66	84,66		Kesbangpol
		Meningkatnya kerukunan hidup masyarakat	Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum			Indeks; Tahunan	80,66	82,66	82,66	84,66		Kesbangpol; Satpol PP
				Program Penegakan Perundang-undangan Daerah							525.300	Satpol PP
					Persentase penyelesaian penegakan perda	Persen; Tahunan	76	80	80	82		

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja Program Tahun 2020		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung jawab
								Target	Realisasi	Target	Rp. (000)	
				Program Ketentraman dan Ketertiban Umum							1.590.750	Satpol PP
					Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Persen; Tahunan	70	74	74	76		
				Program Kesbangpol							989.400	Kesbangpol;
					Persentase Partisipasi Pengguna Hak Pilih Pemilu Legislatif	Persen; Tahunan	60,4	0	0	0		
					Persentase Partisipasi Pengguna Hak Pilih Pemilu Presiden	Persen; Tahunan	60,4	0	0	0		
					Persentase Partisipasi Pengguna Hak Pilih Pemilu Gubernur	Persen; Tahunan	70,4	0	0	0		
					Persentase Partisipasi Pengguna Hak Pilih Pemilu Bupati	Persen; Tahunan	65,59	0	0	0		
					Persentase Rata-Rata Partisipasi Pengguna Hak Pilih Pilkades	Persen; Tahunan	76,6	0	0	0		

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja Program Tahun 2020		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung jawab
								Target	Realisasi	Target	Rp. (000)	
					Jumlah/ Frekuensi Konflik SARA dalam Masyarakat	Persen; Tahunan	0	0	0	0		
	Meningkatnya kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana		Indeks Risiko Bencana			Angka; Tahunan	184,81	181,98	183	177,71		BPBD
		Meningkatnya kapasitas daerah dalam menurunkan indek resiko bencana	Indeks Kapasitas Daerah			Angka; Tahunan	0,58	0,62	0,6	0,72		BPBD
				Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana							1.168.920	BPBD
					Persentase masyarakat siap siaga bencana	Persen; Tahunan	1.72	02.44	02.44	2.51		
				Program Penanganan Kedaruratan, Peralatan dan Logistik Bencana							744.600	BPBD
					Persentase layanan penanganan tanggap darurat, bantuan peralatan dan logistik	Persen; Tahunan	85.71	90.19.00	90.19.00	94.67		

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Kinerja Program Tahun 2020		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021		Perangkat Daerah Penanggung jawab
								Target	Realisasi	Target	Rp. (000)	
				Program Peningkatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana							1.152.600	BPBD
					Persentase penanganan dan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Persen; Tahunan	13,59	21,74	21,74	29,89		
	Meningkatkan pelestarian dan pewarisan kebudayaan		Indeks Kebudayaan			Indeks; tahunan	60	62,34	N/A	64,73		Disdikbud
		Meningkatnya pelestarian dan pewarisan kebudayaan	Persentase cagar budaya (<i>tangible dan intangible</i>) dilestarikan			Indeks; tahunan	21,4	22,5	N/A	24,5		Disdikbud
				Program Kebudayaan							1.938.000	Dinas Dikbud
					Persentase seni dan kesenian yang dibina	Persen; Tahunan	78,5	79,61	79,61	80,12		
					Persentase Benda Cagar Budaya dan Situs Budaya yang dibangun/direhabilitasi	Persen; Tahunan	21,4	22,5	22,5	24,5		
					Persentase tradisi yang dikembangkan	Persen; Tahunan	50	55	55	57,5		

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

Tabel 6.14
Misi, Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal
Tahun 2022-2024

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	
MISI 1: Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat												
Tujuan: 1.1 Mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan budaya antikorupsi dalam pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi		63,69	64,59		65,19		65,69		65,69		
Sasaran 1.1.1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		2,68	3,1		3,25		3,4		3,4		
	Indeks Kepuasan Masyarakat		78,61	82,15		84,83		86,2		86,2		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan Informasi	Persen; Tahunan	40,62	50,00	370.000	60,00	380.000	75,00	400.000	75,00	1.500.000	Kominfo SP
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase perangkat daerah yang terpenuhi kebutuhan TIK dalam digitalisasi pemerintahan	Persen; Tahunan	25,00	50,00	1.800.000	75,00	1.900.000	100,00	2.000.000	100,00	7.500.000	Kominfo SP
	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan Dinas kominfo	Persen; Tahunan	16,67	70,83		85,42		100,00		100,00		Kominfo SP
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	Persen; Tahunan	20,00	30,00	1.500.000	50,00	1.500.000	80,00	1.500.000	80,00	6.000.000	Kominfo SP

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	
	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen; Tahunan	45,00	65,00		75,00		85,00		85,00		Kominfo SP
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen; Tahunan	38,15	52,36	120.000	59,47	130.000	66,57	140.000	66,57	500.000	Kominfo SP
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Adiwerna	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	40.000	100	40.000	100	40.000	100	160.000	Kecamatan Adiwerna
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Balapulang	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	40.000	100	40.000	100	40.000	100	160.000	Kecamatan Balapulang
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Bojong	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	40.000	100	40.000	100	40.000	100	160.000	Kecamatan Bojong
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Bumijawa	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	40.000	100	40.000	100	40.000	100	160.000	Kecamatan Bumijawa
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Dukuhwaru	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	45.000	100	45.000	100	45.000	100	180.000	Kecamatan Dukuhwaru
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Dukuhturi	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	40.000	100	40.000	100	40.000	100	160.000	Kecamatan Dukuhturi
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Jatinegara	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	40.000	100	40.000	100	40.000	100	160.000	Kecamatan Jatinegara
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Kedungbanteng	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	40.000	100	40.000	100	40.000	100	160.000	Kecamatan Kedungbanteng

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Kramat	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	40.000	100	40.000	100	40.000	100	160.000	Kecamatan Kramat
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Lebaksiu	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	40.000	100	40.000	100	40.000	100	160.000	Kecamatan Lebaksiu
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Margasari	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	39.624	100	39.624	100	39.624	100	158.496	Kecamatan Margasari
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Pagerbarang	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	40.000	100	40.000	100	40.000	100	160.000	Kecamatan Pagerbarang
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Pangkah	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	40.000	100	40.000	100	40.000	100	160.000	Kecamatan Pangkah
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Slawi	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	40.000	100	40.000	100	40.000	100	160.000	Kecamatan Slawi
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Suradadi	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	40.000	100	40.000	100	40.000	100	160.000	Kecamatan Suradadi
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Talang	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	40.000	100	40.000	100	40.000	100	160.000	Kecamatan Talang
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Tarub	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	40.000	100	40.000	100	40.000	100	160.000	Kecamatan Tarub
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Warureja	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	40.000	100	40.000	100	40.000	100	160.000	Kecamatan Warureja

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan mandiri dan maju berkembang Kecamatan Adiwerna	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	10	60	30.000	80	30.000	100	30.000	100	120.000	Kecamatan Adiwerna
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan mandiri dan maju Kecamatan Balapulang	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	10	60	30.000	80	30.000	100	30.000	100	120.000	Kecamatan Balapulang
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan mandiri dan maju Kecamatan Bojong	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	10	60	30.000	80	30.000	100	30.000	100	120.000	Kecamatan Bojong
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan maju dan berkembang Kecamatan Bumijawa	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	10	60	30.000	80	30.000	100	30.000	100	120.000	Kecamatan Bumijawa
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan mandiri dan maju Kecamatan Dukuwaru	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	10	60	191.500	80	226.000	100	248.000	100	794.500	Kecamatan Dukuwaru
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan mandiri dan maju Kecamatan Dukuhturi	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	10	60	30.000	80	30.000	100	30.000	100	120.000	Kecamatan Dukuhturi
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan mandiri dan maju Kecamatan Jatinegara	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	10	60	30.000	80	30.000	100	30.000	100	120.000	Kecamatan Jatinegara
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan maju dan berkembang Kecamatan Kedungbanteng	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	10	60	30.000	80	30.000	100	30.000	100	120.000	Kecamatan Kedungbanteng
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan mandiri dan maju Kecamatan Kramat	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	10	60	30.000	80	30.000	100	30.000	100	120.000	Kecamatan Kramat

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan mandiri dan maju Kecamatan Lebaksiu	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	10	60	30.000	80	30.000	100	30.000	100	120.000	Kecamatan Lebaksiu
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan mandiri dan maju Kecamatan Margasari	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	10	60	35.300	80	35.300	100	35.300	100	141.200	Kecamatan Margasari
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan mandiri dan maju Kecamatan Pagerbarang	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	10	60	30.000	80	30.000	100	30.000	100	120.000	Kecamatan Pagerbarang
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan mandiri dan maju Kecamatan Pangkah	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	10	60	30.000	80	30.000	100	30.000	100	120.000	Kecamatan Pangkah
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan mandiri dan maju Kecamatan Slawi	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	10	60	30.000	80	30.000	100	30.000	100	120.000	Kecamatan Slawi
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan maju dan berkembang Kecamatan Suradadi	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	10	60	30.000	80	30.000	100	30.000	100	120.000	Kecamatan Suradadi
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan mandiri dan maju Kecamatan Talang	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	10	60	30.000	80	30.000	100	30.000	100	120.000	Kecamatan Talang
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan mandiri dan maju Kecamatan Tarub	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	10	60	60.000	80	60.000	100	60.000	100	377.750	Kecamatan Tarub
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan mandiri dan maju Kecamatan Warureja	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	10	60	30.000	80	30.000	100	30.000	100	120.000	Kecamatan Warureja
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rata-rata kinerja OPD rumpun pemerintahan kesra (LKjIP)	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	72,53	75,03	2.542.709	76,28	2.568.137	77,53	2.593.818	77,53	10.222.198	Setda

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	
	Persentase pelayanan publik OPD rumpun pemerintahan dan kesra yang sesuai standard (IKM)	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	37,41	41,41		43,41		45,41		45,41		Setda
	Persentase pembentukan Perda yang terselesaikan	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017										Setda
	Persentase penyelesaian permasalahan hukum yang terfasilitasi											Setda
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Tertib dan Baik Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Asset Desa	Persen; Tahunan; Permendagri No. 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa, Permendagri 18 Tahun 2020 tentang LPPD	35	68	5463948,5	89	5518587,98 ₅	100	5573773,86 ₅	100	21966160,3 ₅	Dispermades
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	Persen; Tahunan; Permendagri 18/2020	15	30	130000	40	131300	50	132613	50	539633	Disdukcapi
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penduduk ber Kartu Keluarga	Persen; Tahunan; IKU OPD	91,67	94	155000	96	156550	98	158115,5	98	727838,5	Disdukcapi
	Perekaman KTP elektronik	Persen; Tahunan; IKU OPD	99,68	99,74		99,76		99,8		99,8		Disdukcapi
	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	Persen; Tahunan; IKU OPD	21,18	60		70		80		80		Disdukcapi
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan akta kelahiran	Persen; Tahunan; Permendagri 18/2020	93,1	95,5	145000	96	146450	96,5	147914,5	96,5	535826,5	Disdukcapi
	Persentase penduduk ber akta kematian	Persen; Tahunan; IKU OPD	68,5	70,0		70,8		71,5		71,5		Disdukcapi
Sasaran 1.1.2: Meningkatnya kualitas manajemen kinerja	Nilai SAKIP Kabupaten		63,61	67,61		70,61		73,61		73,61		

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan disusun sesuai tahapan	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100,00	100,00	1.456.000	100,00	1.478.000	100,00	1.488.000	100,00	5.868.000	Bappeda dan Litbang
	Tingkat Kesesuaian rencana dan realisasi pembangunan	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	85,00	87,00		88,00	573000,00	90,00	578000,00	90,00	578000,00	Bappeda dan Litbang
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan rumpun Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen; Tahunan; IKU PD	100,00	100,00	2.275.000	100,00	2.350.000	100,00	2.450.000	100,00	9.246.000	Bappeda dan Litbang
	Tingkat keselarasan Dokumen Perencanaan rumpun bidang Perekonomian dan SDA	Persen; Tahunan; IKU PD	85,00	90,00		92,00		95,00		95,00		Bappeda dan Litbang
	Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan rumpun bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen; Tahunan; IKU PD	85,00	90,00		92,00		97,00		97,00		Bappeda dan Litbang
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Adiwerna	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	72	77	50.000	78	50.000	80	50.000	80	155.000	Kecamatan Adiwerna
	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Balapulang	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	72	77	50.000	78	50.000	80	50.000	80	50.000	Kecamatan Balapulang
	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Bojong	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	72	77	50.000	78	50.000	80	50.000	80	50.000	Kecamatan Bojong
	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Bumijawa	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	72	77	50.000	78	50.000	80	50.000	80	50.000	Kecamatan Bumijawa
	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Dukuhwaru	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	72	100	7.500	100	10.000	100	10.000	100	10.000	Kecamatan Dukuhwaru

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	
	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Dukuhturi	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	72	77	50.000	78	50.000	80	50.000	80	50.000	Kecamatan Dukuhturi
	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Jatinegara	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	72	77	50.000	78	50.000	80	50.000	80	50.000	Kecamatan Jatinegara
	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Kedungbanteng	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	72	77	50.000	78	50.000	80	50.000	80	50.000	Kecamatan Kedungbante ng
	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Kramat	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	72	77	50.000	78	50.000	80	50.000	80	50.000	Kecamatan Kramat
	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Lebaksiu	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	72	77	50.000	78	50.000	80	50.000	80	50.000	Kecamatan Lebaksiu
	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Margasari	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	72	77	5.200	78	5.200	80	5.200	80	5.200	Kecamatan Margasari
	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Pagerbarang	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	72	77	50.000	78	50.000	80	50.000	80	50.000	Kecamatan Pagerbarang
	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Pangkah	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	72	77	50.000	78	50.000	80	50.000	80	50.000	Kecamatan Pangkah
	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Slawi	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	72	77	50.000	78	50.000	80	50.000	80	50.000	Kecamatan Slawi
	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Suradadi	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	72	77	50.000	78	50.000	80	50.000	80	50.000	Kecamatan Suradadi
	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Talang	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	72	77	50.000	78	50.000	80	50.000	80	50.000	Kecamatan Talang
	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Tarub	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	72	77	50.000	78	50.000	80	50.000	80	50.000	Kecamatan Tarub
	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Warureja	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	72	77	50.000	78	50.000	80	50.000	80	50.000	Kecamatan Warureja

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Proses Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa tercapai BAIK	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	1.377.270	100	1.446.315	100	1.515.642	100	1.515.642	Setda
	Persentase Tingkat Maruritas UKPBj terpenuhi	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	1	3		3		4		4		Setda
	Persentase Tingkat Standarisasi LPSE terpenuhi		12	12		12		12		12		Setda
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase integrasi Renja DPRD ke dalam Renja SEKRETARIAT DPRD	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100	100	24.507.256	100	24.507.256	100	24.507.256	100	98.029.024	Setwan
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Dukungan Produk Kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen; Tahunan; IKU OPD	65,00	73,44	1.707.595	87,50	1.712.595	92,50	1.707.595	92,50	5.966.631	Bappeda dan Litbang
Sasaran 1.1.3: Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK		WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah		70,00	80,00	2.878.500	85,00	2.907.285	95,00	2.936.358	95,00	11.572.143	BPKAD
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	persentase hasil penagihan pajak PBB dan BPHTB yang tertagih		100	100	2.948.195	100	2.977.677	100	3.007.454	100	11.852.331	BPKAD
	presentase hasil penagihan pajak non PBB dan BPHTB yang Tertagih		100	100		100		100		100		BPKAD
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase OPD yang telah mengelola Barang Milik Daerah yang baik dan benar	Persen	50,00	80,00	3.600.000	90,00	2.626.000	95,00	2.720.000	95,00	11.546.000	BPKAD
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Peningkatan nilai LAKE LKD	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	45,00	65,00	429.250	75,00	433.543	85,00	437.878	85,00	1.725.670	Perpustakaan dan Arsip
	Peningkatan jumlah Perangkat Daerah bernilai LAKI Cukup	Jumlah; Tahunan	0,00	10,00		12,00		14,00		14,00		Perpustakaan dan Arsip

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan BPK RI	Persen; Tahunan:	91,70	92,00	764.420	92,00	764.420	92,00	764.420	92,00	3.057.680	Inspektorat
	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan Itprov	Persen; Tahunan:	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		Inspektorat
	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan Itkab	Persen; Tahunan:	23,77	60,00		70,00		80,00		80,00		Inspektorat
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Penerapan SPIP Secara efektif	Persen; Tahunan:	5	20	712.000	30	712.000	50	712.000	0,5	2.848.000	Inspektorat
	Persentase Predikat WBK/WBBM berdasarkan penilaian internal	Persen; Tahunan:	2,00	8,30		8,30		12,50		12,50		Inspektorat
	Persentase Pemenuhan IKU OPD	Persen; Tahunan:	59,53	70,00		90,00		90,00		90,00		Inspektorat
Sasaran 1.1.4: Meningkatnya kualitas manajemen kepegawaian daerah	Indeks Profesionalistas ASN		72,12	76,42		78,31		80,56		80,56		
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin sesuai peraturan	Persen, Tahunan	0,12	0,48	4.550.000	0,18	4.600.000	0,15	4.260.000	0,15	17.910.000	BKD
	Persentase jabatan struktural/jabatan fungsional (non guru non kesehatan) terisi sesuai dengan kompetensinya	Persen, Tahunan	53,82	57,50		59,30		62,10		62,10		BKD
	Rasio pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah Dasar (%)	Persen, Tahunan	427,93	239,96		264,61		293,12		293,12		BKD
	Rasio pegawai fungsional (%)	Persen, Tahunan	9,64	15,28		15,68		16,23		16,23		BKD

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	
	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi (%) tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	Persen, Tahunan	93,50	93,26		92,69		93,05		93,05		BKD
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase PNS yang mengikuti diklat teknis 20/jam	Persen; kumulatif; PP no.11 tahun 2017	47,50	70,00	2.775.000	75,00	2.785.000	80,00	2.795.000	80,00	11.118.000	BKD
	Persentase PNS mengikuti seminar/workshop/seje nis sesuai dengan tupoksi jabatan	Persen; Tahunan; PP no.11 tahun 2017	33,40	40,00		45,00		50,00		50,00		BKD
MISI 2: Memperkuat daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur yang andal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan												
Tujuan 2.1 Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar yang berwawasan lingkungan	Persentase Infrastruktur wilayah mantap berwawasan lingkungan			78,15		79,65		81,23		81,23		
Sasaran 2.1.1. Meningkatnya Infrastruktur Wilayah dan Permukiman yang Mantap	Persentase Infrastruktur Pekerjaan Umum		64,82	74,46		78,35		83,6		83,6		
	Persentase Infrastruktur Permukiman Layak		89,45	93,76		95,26		97,23		97,23		
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio Ketersediaan Jaringan Irigasi dalam kondisi baik pada Daerah Irigasi (DI) Kewenangan Kabupaten	Persen; Kumulatif; Permendagri 18 Tahun 2020, Keputusan Bupati Tegal Nomor 050/492 Tahun 2019 tanggal 25 Maret 2019 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten	60	61,33	18.100.000	61,95	18.100.000	62,57	18.100.000	63,8	62.231.125	DPU

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan Akses Layanan Air Minum	Persen; Kumulatif; PermenPUPR No 01/PRT/M/2014, PermenPUPR No 18/PRT/M/2007, Permendagri 18 Tahun 2020, SPM	61,09	85,09	3.655.000	97,09	3.910.000	109,09	4.170.000	109,09	15.120.000	DPU
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase ketersediaan Jaringan Drainase di Jalan Kewenangan Kabupaten	Persen; Keputusan Bupati Tegal Nomor 050/583/2014 Tahun 2014 tentang Penetapan Jalan Kabupaten Tegal; Jumlah Ruas 453 Ruas; Panjang jalan 847,27 Km. 490,15 Km jalan harus berdainase; 277,95 Km jalan yang berdrainase.	94,77	95,97	24.580.000	96,37	24.580.000	96,37	24.580.000	96,37	98.320.000	DPU
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Prosentase Lingkungan yang tertata					P1					0	DPU
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio Bangunan Negara yang Sesuai Standar Teknis	Persentase; Kumulatif; Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan	13,89199255	23,8919925 5	64.925.000	28,89199255	37.425.000	33,89199255	35.425.000	33,89199255	194.200.00 0	DPU
	Rasio bangunan yang memiliki IMB	Persentase; Kumulatif										DPU
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio penyedia jasa konstruksi yang Sesuai Standar Teknis	Persen; Kumulatif; PP 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2017 tetang Jasa Konstruksi	0	20	1.500.000	30	1.750.000	40	2.000.000	40	6.200.000	DPU
	Rasio tenaga konstruksi yang memiliki sertifikast kompetensi	Persen; Tahunan; Permendagri 18 Tahun 2020	0	100		100		100		100		DPU

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	Persen; Keputusan Bupati Tegal Nomor 050/583/2014 Tahun 2014 tentang Penetapan Jalan Kabupaten Tegal; Jumlah Ruas 453 Ruas; Panjang jalan 847,27 Km.	81,11	83	144.600.00 0	85	144.600.00 0	87,5	144.600.00 0	87,5	542.712.43 5	DPU
	Proporsi Jembatan dalam Kondisi Mantap	Persen; Keputusan Bupati Tegal Nomor 630/394 Tahun 2019 tentang Penetapan Nama Jembatan di Kabupaten Tegal; Jumlah Jembatan 454 unit;; 29 % kondisi jembatan rusak (ringan s/d berat)	88,05	91		92		93,5		93,5		DPU
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rasio kepatuhan terhadap ITR yang diajukan	Persen; Tahunan	86	88	600.000	89	625.000	90	650.000	90	2.450.000	Perkimtaru
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Bidang; Tahun	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	40.000.000	Perkimtaru
PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Pengendalian pemanfaatan tanah negara ?										0	Perkimtaru
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase pengelolaan taman makam pahlawan	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	89,8	90	500900	90,25	568000	90,75	768600	90,75	2029634	Dinsos
PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Sarana dan Prasarana Desa yang terpenuhi dan Baik	Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 1 tahun 2017 tentang Penataan Desa	55,23	65,23	3848100	70,23	3886581	80,23	3925446,81	80,23	15470127,8 1	Dispermades

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Desa yang melakukan kerjasama	Persen; Tahunan; Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Des, Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang LPPD	69,39501779	70,8185053 4	303000	71,53024911	306030	72,24199288	309090,3	72,24199288	1218120,3	Dispermades
Sasaran 2.1.2.Meningkatnya Sistem jaringan/konektivitas perhubungan	Rasio konektivitas kabupaten		75,34	76,87		76,98		77,24		77,24		
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase penurunan rasio kejadian kecelakaan lalu lintas	Persen; Tahun/ Triwulan; Data	0,65	0,55	15300066	0,5	15606100	0,45	15898196	0,45	61.804.462	Dishub
	Konektivitas transportasi	Persen, Tahun, Data	75,2	75,3		75,4		75,5		75,5	0	Dishub
	Kinerja lalu lintas kabupaten	Satuan mobil penumpang (smp) /jam; tahun data	0,43	0,47		0,5		0,52		0,52		Dishub
Sasaran 2.1.3.Meningkan Kualitas Lingkungan Hidup	IKLH		64,28	65,78		66,28		68,28		68,28		
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang dimanfaatkan	Dokumen	4	6	5.450.000	5	5.975.000	5	6.650.000	5	20.242.470	DLH
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Luas Lahan/area yang dilakukan upaya pengendalian pencemaran dan/ kerusakan melalui upaya pencegahan, penanggulangan dan/atau pemulihan	m2, Kumulatif	25.64 / 5900 m2	50 / 14356m2	5.450.000	62.37 / 14356m2	5.975.000	62.37 / 14356m2	6.650.000		20.242.470	DLH

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Peningkatan Luas Lahan Kehati yang terkelola	Persen, Tahunan	1	20	350.000	30	350.000	50	400.000	50	1.150.000	DLH
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pengurangan Luas Lahan yang terkontaminasi Pencemaran Limbah B3	m2, Kumulatif	25.64 / 5900 m2	50 / 14356m2	50.000	62.37 / 14356m2	50.000	62.37 / 14356m2	50.000	62.37 / 14356m2	200.000	DLH
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Cakupan Akses Sanitasi/ Limbah Domestik	Persen; Kumulatif; Permendagri 18 Tahun 2020, SPM	94,37	95,57	100.000	95,97	100.000	96,37	100.000	96,37	400.000	DPU
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan Sampah	Persen; Tahunan ; PP 27 tahun 2020; UU 18 Tahun 2008	34,01	50,00	53.920.000	60,00	115.340.00 0	75,00	53.170.000	75,00	237.585.37 3	DLH
	Persentase Pengurangan Sampah	Persen; Tahunan ; PP 27 tahun 2020; UU 18 Tahun 2008	18,03	22,00		24,00		25,00		25,00		DLH
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Rasio ketersediaan sarpras persampahan	Jumlah, Penting, UU No. 18 Tahun 2008	0	82,00	18.166.000	83,00	19.696.000	85,00	17.376.000	85,00	55.988.000	DPU
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Jumlah Pelaku Usaha yang dilakukan Pengawasan	Persen, Tahunan	25	25	50.000	25	50.000	25	50.000	25	200.000	DLH
	Persentase Pelaku Usaha yang Berkomitmen dalam Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	Persen, Tahunan	34	45		50		55		55		DLH
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Peningkatan Kelompok Masyarakat / Lembaga yang Peduli lingkungan hidup	Jumlah, Kumulatif	25	35	100.000	40	100.000	45	100.000	45	350.000	DLH

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Jumlah Pengakuan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah, Tahun	1	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	200.000	DLH
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah peningkatan kinerja masyarakat peduli lingkungan hidup	Jumlah, Kumulatif	12	20	270.000	25	270.000	30	270.000	30	1.080.000	DLH
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan Lingkungan yang ditindaklanjuti	Persen, Tahunan	90,00	90,00	125.000	90,00	125.000	90,00	150.000	90,00	450.000	DLH
MISI 3: Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan												
Tujuan 3.1. Mewujudkan perekonomian rakyat yang kuat berbasis pertanian, industri pengolahan dan pariwisata	Pertumbuhan Ekonomi			3,5		4,2		4,9		4,9		
Sasaran 3.1.2. Meningkatnya Porduktifitas Sektor Pertanian	Laju PDRB Sektor Pertanian		0,5	0,7		0,8		1		1		
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap (Kg.)	Kilogram; Tahunan; Manual IKU Kementrian KKP; Renstra Dinas KP Provinsi Jateng	1.964.378	2.003.862	450.000	2.023.900	500.000	2.044.139	550.000	2.044.139	1.893.250	DKPP
	Nilai Produksi Perikanan Tangkap (Rp.)	Ribu Rupiah; Tahunan; Manual IKU Kementrian KKP; Renstra Dinas KP Provinsi Jateng	13.608.184	13.881.708		14.020.525		14.160.730		14.160.730		DKPP
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase perairan umum daratan (PUD) yang bebas dari destructive fishing	Persen; Tahun	11,11111111	55,55555556	170.000	77,77777778	190.000	100	210.000	100	720.000	DKPP
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya (kg)	Kilogram; Tahunan; Manual IKU Kementrian KKP; Renstra Dinas KP Provinsi Jateng	2.730.262	2.764.493	470.000	2.792.138	490.000	2.825.643	510.000	2825643	1.901.250	DKPP

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	
	Nilai Produksi Perikanan Budidaya (Rp.000)	Ribu Rupiah; Tahunan; Manual IKU Kementerian KKP; Renstra Dinas KP Provinsi Jateng	145.642.227	148.291.68 0		150.431.397		153.024.735		153.024.735		DKPP
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	Kilogram; Tahunan; Manual IKU Kementerian KKP; Renstra Dinas KP Provinsi Jateng	5.478.639	5.492.344	270.000	5.503.329	290.000	5.517.087	310.000	5.517.087	1120000	DKPP
	Nilai Produksi Pengolahan Hasil Perikanan (Rp.000)	Ribu Rupiah; Tahunan Manual IKU Kementerian KKP; Renstra Dinas KP Provinsi Jateng	131189142,4	131517312	0	131780346,7	0	132109797,5	0	132109797,5	0	DKPP
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi daging (kg)	Kilogram, Tahunan, Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jateng	11.284.734	11.511.557	170.000	11.626.673	210.000	11.742.939	250.000	11.742.939	690.000	DKPP
	Produksi Telur (kg.)	Kilogram, Tahunan, Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jateng	10.760.493	10.976.779		11.086.547		11.197.412		11.197.412		DKPP
	Produksi Susu (kg.)	Kilogram, Tahunan, Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jateng	604.664	616.818		622.986		629.216		629.216		DKPP
	Persentase Penanganan Organisasi Pengganggu Tanaman (OPT)	Persen; Tahun	89,80	89,90		89,93		90,00		90,00		TanKP
	Persentase Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi	Persen; Tahun	63,00	68,00		72,00		75,00		75,00		TanKP
	Luas Lahan Pertanian Organik	Persen; Tahun	2,00	2,00		2,00		5,00		5,00		TanKP
	Rasio Penggunaan Alsintan Pra Panen	Persen; Tahun	62,72	62,98		63,24		63,50		63,50		TanKP
	Rasio Penggunaan Alsintan Pasca Panen	Persen; Tahun	15,51	16,98		19,45		22,01		22,01		TanKP

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Indeks pertanaman	Indeks; Akumulatif; IKU OPD	1,52	1,62	100.000.00 0	1,66	100.000.00 0	1,70	100.000.00 0	1,70	400.000.00 0	TanKP
	Aksebilitas Jalan Usaha Tani (Km/Ha)	Persen; Tahun	2,60	3,34		3,70		4,11		4,11		TanKP
	Luas Lahan Sawah Lestari	Persen; Tahun	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		TanKP
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Rasio Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	Persen; Tahunan; IKU OPD	< 2,5	< 2,5	90.000	< 2,5	100.000	< 2,5	120.000	< 2,5	390.000	TanKP
	Rasio Penggunaan Agnesia Hayati per Luas tanam dalam menekan serangan OPT Padi	Persen; Tahunan; IKU OPD	0	2		3		4		4		TanKP
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Ternak terkendali status kesehatannya	Persen ; Tahunan;;	31,37254902	5,60224089 6	345.000	5,602240896	365.000	5,602240896	385.000	5,602240896	1.420.000	DKPP
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah Kelompok Tani Ternak (KTT) meningkat status kelembagaannya.	Kelompok/Tahunan/Renstra Disnak Provinsi Jateng.	2 kelompok	2 kelompok	100.000	2 kelompok	100.000	2 kelompok	100.000	10 kelompok	400.000	DKPP
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan kapasitas penyuluh swadaya terhadap dasar-dasar penyuluhan	Persen; Tahun	150	27		20		20		100	-	TanKP
	Pertumbuhan Pos Penyuluh Desa (Posludhes)	Persen; Tahun	70	13		11		10		57		TanKP
	Penumbuhan Peningkatan Kelas Kelompok Tani Pemula Ke Lanjut	Persen; Tahun	628	2,51		2,57		2,64		11,94		TanKP
	Penumbuhan Peningkatan Kelas Kelompok Tani Lanjut Ke Madya	Persen; Tahun	614	1,94		1,93		1,92		9,77		TanKP

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	
	Indeks Gapoktan yang bermitra dengan BUMP	Persen; Tahun	7	7		7		7		7		TanKP
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase penguatan cadangan pangan					P1					0	TanKP
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase penguatan cadangan pangan	Persen; Tahunan; Permentan No. 65/Permentan/OT.140/12/2 010	210	228	222.200	238	224.422	245	226.666	245	893.288	TanKP
	Persentase ketersediaan informasi harga dan pasokan pangan	Persen; Tahunan; Permentan No. 65/Permentan/OT.140/12/2 010	48	50		51		52		52		TanKP
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan daerah rawan pangan	Persen; Tahunan; Permentan No. 65/Permentan/OT.140/12/2 010	72	84	37.768	87	38.146	90	38.527	90	151.836	TanKP
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persen; Tahunan; Permentan No. 65/Permentan/OT.140/12/2 010	90	80	65.650	83	66.307	85	66.970	85	263.926	TanKP
Sasaran 3.1.3. Meningkatnya Porduktifi tas di Sektor Industri Pengolahan	Laju PDRB Sektor Industri		6,09	6,24		6,31		6,38		6,38		
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Kesesuaian Pembangunan Industri dengan Rencana Pembangunan Industri	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100,00	100,00	1.000.000	100,00	1.200.000	100,00	1.500.000	100,00	4.150.000	Perinaker
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan komitmen perolehan IUI	Persen, Bulan	100,00	100,00	25.000	100,00	25.000	100,00	25.000	100,00	100.000	Perinaker
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Presentase Industri yang terverifikasi	Persen, Bulan	100,00	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00	200.000	Perinaker

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	
Sasaran 3.1.4. Meningkatnya Produktifitas Pariwisata	Rasio PAD sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten		1,85	1,99		2,23		2,33		2,33		
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Destinasi Tujuan Wisata produktif (DTW) yang ditetapkan	Persen; Tahunan	100	100	7.000.000	100	7.500.000	100	8.000.000	100	28.960.000	Porapar
	Persentase usaha pariwisata memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	Unit; Tahunan	75,00	85,00		90,00		95,00		95,00		Porapar
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase DTW yang dipromosikan	Persen; Tahunan	75,00	85,00	1.000.000	90,00	1.250.000	95,00	1.500.000	95,00	3.800.000	Porapar
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah SDM Pariwisata yang bersertifikasi	Jumlah SDM Pariwisata yang bersertifikasi	10	20	500.000	25	600.000	26	700.000	25	1.900.000	Porapar
Sasaran 3.1.5. Meningkatnya Produktifitas di Sektor Perdagangan	Laju PDRB Sektor Perdagangan		6,02	6,16		6,24		6,31		6,31		
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pasar direhabilitasi	Persentase, Tahunan; Permendagri No.70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan & Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan & Toko Modern	50,00	65,38	2.500.000	76,92	2.500.000	88,46	2.500.000	88,46	11.907.781	Disdagkop UMKM
	Persentase pasar e- retribusi	Persen; Tahunan	7,69	46,15		65,38		84,62		84,62		Disdagkop UMKM
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Pedagang Tertib Ukur	Persentase, data tahunan	27,95385227	35,0086195 5	150.000	50,00663042	200.000	60,00530434	250.000	60,00530434	750.000	Disdagkop UMKM

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase harga dan Stok Bahan Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Stabil	Persen; Tahunan: Kemendag	<9%	<9%	95.000	<9%	120.000	<9%	120.000	<9%	395.000	Disdagkop UMKM
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase laju peningkatan nilai penjualan produk dalam negeri	Persen; Tahun	2	2	150.000	2	220.000	2	250.000	2	810.305	Disdagkop UMKM
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Laju Nilai Ekspor	Persen; Tahun	1	1	-	1	30.000	1	35.000	1	92.000	Disdagkop UMKM
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pemberian rekomendasi izin yang terfasilitasi	Persen; Tahunan: Permendagri 18/2020	100	100	20.000	100	20.000	100	20.000	100	80.000	Disdagkop UMKM
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Rekomendasi Usaha Simpan Pinjam yang terfasilitasi	Persen; Tahun	100	100	50.000	100	50.000	100	50.000	100	200.000	Disdagkop UMKM
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat dan cukup sehat	Persen; Tahun	72,9	17,3120728 9	60.000	17,76765376	70.000	18,22323462	80.000	18,22323462	260.000	Disdagkop UMKM
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Koperasi yang memiliki kompetensi	Persen; Kumulatif	9	17,72	569.358	26,07	580.000	35,18	587.000	35,18	2.303.716	Disdagkop UMKM
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi bermitra	Persen; Tahun	1,038961039	3,63636363 6	52.000	4,935064935	54.000	6,233766234	55.000	6,233766234	204.386	Disdagkop UMKM
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Peningkatan UMKM yang Bermitra	Persen; Kegiatan	2,628811777	4,20609884 3	90.000	4,731861199	100.000	5,257623554	100.000	5,257623554	290.000	Disdagkop UMKM
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Peningkatan Skala Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil	Persen; Kegiatan	0	1,05152471 1	160.000	2,628811777	235.000	4,206098843	310.000	4,206098843	945.133	Disdagkop UMKM
MISIS 4: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi												
Tujuan 4.1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas	IPM			69,43		70,13		70,83		70,83		
	IPG			87,03		87,12		87,21		87,21		

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	
Sasaran 4.1.1. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan		0,546	0,556		0,558		0,56		0,56		
PROGRAM PENGELOLA PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasai dalam PAUD	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	25,21	26,56	200.333.07 8	27,48	202.336.40 9	29,43	204.359.77 3	29,43	805.378.84 1	Disdikbud
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	32,95	36,35		38,05		39,75		39,75		Disdikbud
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasai dalam pendidikan dasar	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	99,96	100		100		100		100		Disdikbud
	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasai dalam pendidikan menengah	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	65,60	75,50		78,80		82,10		85,40		Disdikbud
	Rata-rata Nilai Kelulusan SD	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	46,75	53,77		56,11		58,45		60,79		Disdikbud
	Rata-rata Nilai Kelulusan SMP	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	52,84	54,72		55,45		56,34		56,34		Disdikbud
Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Muatan Lokal dalam KBM	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	5,26	5,26	1.206.950	5,26	1.219.020	5,26	1.231.210	5,26	4.852.179	Disdikbud
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio Guru Kelas, SD, PAUD	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	1 : 0,3	1 : 0,3	181.800	1 : 0,3	183.618	1 : 0,3	185.454	1 : 0,3	730.872	Disdikbud
	Rasio Guru Mapel, SD, SMP, PAUD dan Dikmas	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	1 : 1 : 32	1 : 1 : 31		1 : 1 : 30		1 : 1 : 29		1 : 1 : 28		Disdikbud
Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan Berizin	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100	100	50.000	100	50.000	100	50.000	100	200.000	Disdikbud

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Skor; Tahunan; Permendagri 18/2020	48,00	52,00	530.250	54,00	535.553	56,00	540.908	56,00	2.131.711	Perpustakaan dan Arsip
Sasaran 4.1.2. Meningkatnya kualitas layanan kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan		0,794	0,801		0,802		0,804		0,804		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Persen; Tahunan	46,00	75,00	122.264.08 2	100,00	123.486.72 3	100,00	124.721.59 0	100,00	491.525.94 1	Dinas Kesehatan
	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	Persen; Tahunan; Permendagri No 18 Tahun 2020	0,10	0,11		0,12		0,13		0,13		Dinas Kesehatan
	Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Persen; Tahunan; Permendagri No 18 Tahun 2020	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Kesehatan
	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persen; Tahunan; SPM bidang Kesehatan	96,00	98,00		99,00		100,00		100,00		Dinas Kesehatan
	persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen; Tahunan; Permendagri No 18 Tahun 2020	96,00	98,00		99,00		100,00		100,00		Dinas Kesehatan
	persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen; Tahunan; Permendagri No 18 Tahun 2020	98,00	100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Kesehatan
	Cakupan balita stunting	Persen; Tahunan	20,00	18,00		16,00		14,00		14,00		Dinas Kesehatan
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen; Tahunan; Permendagri No 18 Tahun 2020	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Kesehatan
	Pelayanan kesehatan balita	Persen, tahunan, SPM bidang Kesehatan	95,35	97,00		99,00		100,00		100,00		Dinas Kesehatan
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen; Tahunan; Permendagri No 18 Tahun 2020	70,00	80,00		85,00		90,00		90,00		Dinas Kesehatan
	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	Persen, tahunan, SPM bidang Kesehatan								0,00		Dinas Kesehatan

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	
	Persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen; Tahunan; Permendagri No 18 Tahun 2020	40,00	50,00		55,00		60,00		60,00		Dinas Kesehatan
	Persentase orang usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen; Tahunan; Permendagri No 18 Tahun 2020	87,50	95,00		97,00		100,00		100,00		Dinas Kesehatan
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen; Tahunan; Permendagri No 18 Tahun 2020	75,00	78,00		79,00		80,00		80,00		Dinas Kesehatan
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen; Tahunan; Permendagri No 18 Tahun 2020	55,00	65,00		70,00		75,00		75,00		Dinas Kesehatan
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen; Tahunan; Permendagri No 18 Tahun 2020	60,00	70,00		75,00		80,00		80,00		Dinas Kesehatan
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen; Tahunan; Permendagri No 18 Tahun 2020	55,00	65,00		70,00		75,00		75,00		Dinas Kesehatan
	Cakupan desa UCI	Persen, tahunan	94,00	96,00		98,00		100,00		100,00		Dinas Kesehatan
	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Persen, tahunan, SPM bidang Kesehatan	86,00	90,00		95,00		95,00		95,00		Dinas Kesehatan
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen; Tahunan; Permendagri No 18 Tahun 2020	86,00	90,00		95,00		95,00		95,00		Dinas Kesehatan

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	
	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Persen, tahunan, SPM bidang Kesehatan	97,00	97,00		98,00		99,00		99,00		Dinas Kesehatan
	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen; Tahunan; Permendagri No 18 Tahun 2020	97,00	97,00		98,00		99,00		99,00		Dinas Kesehatan
	Persentase desa STBM	Persen, Tahunan	2,00	7,00		9,00		10,00		10,00		Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah RSUD dr Soeselo		100	100	165000	100	165000	100	165000	100	165.000	RSUD Soeselo
	Nilai Kesehatan Kinerja BLUD RSUD Soeselo		100	100	137990863,5	100	144890406,7	100	152134927	100	152134927	RSUD Soeselo
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah RSUD Suradadi		100	100	800000	100	750000	100	700000	100	700.000	RSUD Suradadi
	Nilai Kesehatan Kinerja BLUD RSUD Suradadi		100	100	22500000	100	23000000	100	23500000	100	23500000	RSUD Suradadi
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Cakupan pelayanan perijinan praktik tenaga kesehatan	Persen; Tahunan	100,00	100,00	219.448	100,00	231.392	100,00	244.532	100,00	843.960	Dinas Kesehatan
	Cakupan puskesmas yang mempunyai 9 tenaga kesehatan strategis	Persen; Tahunan	59,00	69,00		83,00		93,00		100,00		Dinas Kesehatan

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Cakupan produk industri rumah tangga (PIRT) pangan yang tersertifikasi	Persen, Tahunan	100	100	592.477	100	651.724	100	716.897	100	2.499.712	Dinas Kesehatan
	Cakupan pemenuhan persyaratan perijinan sarana pelayanan kefarmasian	Persen, Tahunan	100	100		100		100		100		Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	Persen; Tahunan; Indikator Kinerja program promosi kesehatan	82	84	48.998.971	85	49.488.961	85	49.983.851	85	196.985.61 6	Dinas Kesehatan
Sasaran 4.1.2. Meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		69,3	70,16		70,8		71,4		71,4		
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja operasi APBD	Kategori, Tahunan, APBD	21,00	26,00	225.000	28,00	230.000	30,00	235.000	30,00	890.000	P3AP2KB
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Rasio, Tahunan, Data SIMPONI	5,16	6,37	485.524	6,35	485.524	6,32	485.524	6,32	1.942.096	P3AP2KB
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Keluarga mendapat pelayanan konseling	Persen, Tahunan, Laporan Kunjungan	0,04	0,06	125.000	0,07	150.000	0,08	200.000	0,08	575.000	P3AP2KB
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Data Gender dan Anak yang tersedia	Persen, tahunan, laporan SIGA	72,00	76,00	27.000	78,00	28.000	80,00	30.000	90,00	110.000	P3AP2KB
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Pencapaian Pemenuhan Hak Anak	Persen, Tahunan, Data Evaluasi KLA	55,00	64,00	250.000	67,00	350.000	70,00	300.000	70,00	1.050.000	P3AP2KB
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen, Tahunan, Data Simfoni PPPA	60	80	699.000	90	819.000	100	982.000	100	2.911.000	P3AP2KB

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence Rate/mCPR)	Persen, bulanan, Laporan Dalap Kab	69,04	69,14	3.539.173	69,34	4.125.134	69,54	4.236.194	69,54	12.219.648	P3AP2KB
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	Persen; Tahun	14,06	13,86		13,76		13,66		13,66		P3AP2KB
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	TFR (Angka kelahiran Total)	Dokumen; Tahunan; BPS	2,43	2,37	195.000	2,33	225.000	2,30	300.000	2,30	896.000	P3AP2KB
Sasaran 4.1.3. Meningkatnya Kualitas Pemuda	Pertumbuhan wirausaha muda pemula berbasis kinerja		200	400		500		600		600		
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase peningkatan penyadaran pemuda	Persen; Tahunan	5,00	10,00	2.350.000	12,00	2.350.000	15,00	2.350.000	15,00	8.400.000	Porapar
	Persentase kelompok kewirausahaan pemuda dibina	Persen; Tahunan	15,00	25,00		30,00		35,00		35,00		Porapar
	Persentase peningkatan organisasi pemuda yang aktif	Persen; Tahunan	10,00	20,00		25,00		30,00		30,00		Porapar
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAAGAAN	Jumlah Atlit yang berprestasi		62	75	15000	80	15000	85	15000	85	60000	Porapar
Tujuan 4.2. Menurunkan Kesenjangan Kemiskinan	Indeks Gini			0,299		0,295		0,289		0,289		
Sasaran 4.2.1. Menekan Laju Angka Kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin		8,14	8,41		8,3		8,21		8,21		

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS Perseorangan Keluarga dan Kelembagaan yang pernah dibina dan diberdayakan	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	32,44	66,25	956300	83,15	1075425	100,00	1146300	100,00	3581025	Dinsos
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar ,gelandangan pengemis dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti .	Persen; Tahunan; Permendagri No. 18 Tahun 2019	25,16	47,01	2003750	65,57	2230235	100,00	2488569	100,00	10007956	Dinsos
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS, Fakir Miskin dan anak terlantar yang memperoleh perlindungan dan jaminan Sosial.	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	83,28	99,21	957010,931	100	926982,731	100	1112068,89 1	100	4156062,55 3	Dinsos
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Cakupan Fasitiasi Penanganan warga migran Korban tindak kekerasan/ perdagangan orang	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	100	100	100000	100	100000	100	100000	100	300000	Dinsos
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Pemberdayaan masyarakat Desa	Persen; Tahunan; Permendagri No. 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa	100	100	934250	100	943592,5	100	953028,425	100	3755870,92 5	Dispermades
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga yang mendapatkan pembinaan dan ketahanan kesejahteraan keluarga	Persen ; bulanan ; Laporan Dalap Kab	20.84	21,05	195.800	22,00	215.380	22.05	261.000	22.05	850.180	P3AP2KB

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	
Sasaran 4.2.2. Menekan Laju Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka		9,82	10,21		9,54		8,45		8,45		
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	Persen, Tahun	0	40	50.000	60	50.000	100	50.000	100	150.000	Perinaker
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Produktivitas Tenaga Kerja	Persen, Tahun	3,70	5,50	832.000	6,40	1.248.000	6,70	1.664.000	6,70	4.160.000	Perinaker
	Persentase Tenaga Kerja yang berkompeten	Persen, Bulan	3,70	5,50		6,40		6,70		6,70		Perinaker
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	AKAN	Jumlah Orang, Tahunan	660,00	350,00	200.000	500,00	220.000	700,00	240.000	700,00	770.000	Perinaker
	AKAD	Jumlah Orang, Tahunan	246,00	375,00		500,00		700,00		700,00		Perinaker
	AKL	Jumlah Orang, Tahunan	140	625		800		1000		1000		Perinaker
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Indeks Hubungan Industrial	Satuan, Bulan	59,53	80,00	275.000	90,00	300.000	90,00	325.000	90,00	1.150.000	Perinaker
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Transmigran yang ditempatkan	Persen; Tahunan; UU No. 29 Tahun 2009	100	100	120.000	100	132.000	100	145.200	100	497.200	Perinaker
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan Investasi di kabupaten Tegal	Persen; Tahunan	39,69	3,23	200.000	3,13	210.000	3,03	220.000	3,03	755.000	DPMPTSP
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan calon investor yang berkomitmen	Persen; Tahunan	1,00	1,33	500.000	1,00	500.000	1,25	525.000	1,25	1.775.000	DPMPTSP
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat Perijinan	Nilai	78	80	660.000	81	710.000	82	715.000	82	2.667.400	DPMPTSP
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Kepatuhan Perusahaan	Persentase	61,28	67,28	330.000	70,28	490.580	73,28	419.567	73,28	1.390.147	DPMPTSP
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase frekuensi Peningkatan Update data	Persentase	6,00	10,00	100.000	12,00	100.000	15,00	100.000	15,00	375.000	DPMPTSP

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	
PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	persentase izin lokasi penanaman modal dan kemudahan berusaha yang terfasilitasi	Persen; Tahunan;	76,20	80,00	500.000	82,00	550.000	84,00	600.000	84,00	2.100.000	Perkimtaru
MISI 5: Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal												
Tujuan 5.1. Mewujudkan kerukunan hidup dalam masyarakat	Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum			86,66		88,66		90,66		90,66		
Sasaran 5.1.1. Meningkatnya kerukunan Kerukunan Hidup Masyarakat	Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum		82,66	86,66		88,66		90,66		90,66		
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Presentase masyarakat memiliki karakter kebangsaan	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	80,66	86,66	404.000	88,66	408.040	90,66	412.120	90,66	6.876.047	Kesbangpol
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Pesentase Pengguna Hak Pilih Pemilu Legislatif, Presiden/Wakil Presiden, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/WakilBupati dan Persentase Pengguna Hak Pilih Pilkades.	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	Pesentase Pengguna Hak Pilih Pemilu Legislatif 60.4 %, Presiden/Wakil Presiden 60.4%, Gubernur/Wakil Gubernur 70.4 %, Bupati/WakilBup ati 65,59 dan Persentase Pengguna Hak Pilih Pilkades 76,60 %.	0	1.848.798	Gubernur/Wakil Gubernur 74%, Bupati/WakilBup ati 71 % dan Persentase Pengguna Hak Pilih Pilkades 80 %	2.757.118	Pesentase Pengguna Hak Pilih Pemilu Legislatif 65 %, Presiden/Wa kil Presiden 65%	3.320.684	Pesentase Pengguna Hak Pilih Pemilu Legislatif 65 %, Presiden/Wa kil Presiden 65%	9.534.250	Kesbangpol
	Persentase Bantuan Partai politik			100		100		100		100		
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas yang Terbina	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	80,00	90,00	202.000	100,00	204.020	100,00	206.060	100,00	812.080	Kesbangpol

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Gangguan KANTIBMAS yang tertangani	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	85,00	90,00	151.500	93,00	153.015	95,00	154.545	81,00	609.060	Kesbangpol
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Adiwerna	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	20.000	100	20.000	100	20.000	100	80.000	Kecamatan Adiwerna
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Balapulang	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	20.000	100	20.000	100	20.000	100	80.000	Kecamatan Balapulang
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Bojong	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	20.000	100	20.000	100	20.000	100	80.000	Kecamatan Bojong
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Bumijawa	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	20.000	100	20.000	100	20.000	100	80.000	Kecamatan Bumijawa
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Dukuhwaru	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	78.000	100	84.000	100	90.000	100	299.000	Kecamatan Dukuhwaru

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Dukuhturi	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	20.000	100	20.000	100	20.000	100	80.000	Kecamatan Dukuhturi
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Jatinegara	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	20.000	100	20.000	100	20.000	100	80.000	Kecamatan Jatinegara
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Kedungbanteng	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	20.000	100	20.000	100	20.000	100	80.000	Kecamatan Kedungbanteng
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Kramat	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	20.000	100	20.000	100	20.000	100	80.000	Kecamatan Kramat
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Lebaksiu	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	20.000	100	20.000	100	20.000	100	80.000	Kecamatan Lebaksiu

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Margasari	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	20.000	100	20.000	100	20.000	100	80.000	Kecamatan Margasari
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Pagerbarang	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	20.000	100	20.000	100	20.000	100	80.000	Kecamatan Pagerbarang
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Pangkah	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	20.000	100	20.000	100	20.000	100	80.000	Kecamatan Pangkah
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Slawi	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	20.000	100	20.000	100	20.000	100	80.000	Kecamatan Slawi
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Suradadi	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	20.000	100	20.000	100	20.000	100	80.000	Kecamatan Suradadi

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Talang	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	20.000	100	20.000	100	20.000	100	80.000	Kecamatan Talang
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Tarub	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	20.000	100	20.000	100	20.000	100	80.000	Kecamatan Tarub
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Kecamatan Warureja	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	20.000	100	20.000	100	20.000	100	80.000	Kecamatan Warureja
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Konflik SARA yang tertangani	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	97,00	98,00	156.550	99,00	158.116	100,00	159.697	100,00	629.363	Kesbangpol
ROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Gangguan Trantibum Kecamatan Adiwerna yang tertangani	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	30.000	100	30.000	100	30.000	100	120.000	Kecamatan Adiwerna
ROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Gangguan Trantibum Kecamatan Balapulang yang tertangani	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	30.000	100	30.000	100	30.000	100	120.000	Kecamatan Balapulang
ROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Gangguan Trantibum Kecamatan Bojong yang tertangani	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	30.000	100	30.000	100	30.000	100	120.000	Kecamatan Bojong
ROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Gangguan Trantibum Kecamatan Bumijawa yang tertangani	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	30.000	100	30.000	100	30.000	100	120.000	Kecamatan Bumijawa

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	
ROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Gangguan Trantibum Kecamatan Dukuhwaru yang tertangani	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	20.000	100	30.000	100	30.000	100	80.000	Kecamatan Dukuhwaru
ROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Gangguan Trantibum Kecamatan Dukuhturi yang tertangani	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	30.000	100	30.000	100	30.000	100	120.000	Kecamatan Dukuhturi
ROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Gangguan Trantibum Kecamatan Jatinegara yang tertangani	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	30.000	100	30.000	100	30.000	100	120.000	Kecamatan Jatinegara
ROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Gangguan Trantibum Kecamatan Kedungbanteng yang tertangani	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	30.000	100	30.000	100	30.000	100	120.000	Kecamatan Kedungbante ng
ROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Gangguan Trantibum Kecamatan Kramat yang tertangani	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	30.000	100	30.000	100	30.000	100	120.000	Kecamatan Kramat
ROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Gangguan Trantibum Kecamatan Lebaksiu yang tertangani	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	30.000	100	30.000	100	30.000	100	120.000	Kecamatan Lebaksiu
ROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Gangguan Trantibum Kecamatan Margasari yang tertangani	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	21700	100	21700	100	21700	100	86.800	Kecamatan Margasari
ROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Gangguan Trantibum Kecamatan Pagerbarang yang tertangani	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	30.000	100	30.000	100	30.000	100	120.000	Kecamatan Pagerbarang
ROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Gangguan Trantibum Kecamatan Pangkah yang tertangani	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	30.000	100	30.000	100	30.000	100	120.000	Kecamatan Pangkah
ROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Gangguan Trantibum Kecamatan Slawi yang tertangani	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	30.000	100	30.000	100	30.000	100	120.000	Kecamatan Slawi

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	
ROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Gangguan Trantibum Kecamatan Suradadi yang tertangani	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	30.000	100	30.000	100	30.000	100	120.000	Kecamatan Suradadi
ROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Gangguan Trantibum Kecamatan Talang yang tertangani	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	30.000	100	30.000	100	30.000	100	120.000	Kecamatan Talang
ROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Gangguan Trantibum Kecamatan Tarub yang tertangani	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	25.000	100	25.000	100	25.000	100	75.000	Kecamatan Tarub
ROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Gangguan Trantibum Kecamatan Warureja yang tertangani	Persen; Tahunan: Permendagri 86/2017	100	100	30.000	100	30.000	100	30.000	100	120.000	Kecamatan Warureja
Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	presentase gangguan trantibun yang dapat diselesaikan	Persen; Tahunan; Permendagri No. 18/2020	80,00	86,00	859.922	88,00	868.521	90,00	877.207	90,00	3.457.058	Satpol PP
	Presentase perda dan perkada yg ditegakkan	Persen; Tahunan; Permendagri No. 18/2020	70,00	75,00		77,00		80,00		80,00		Satpol PP
Tujuan 5.2. Menurunnya Resiko Bencana	Indeks Risiko Bencana			174,62		172,12		171,84		171,84		
Sasaran 5.2.1. Meningkatnya kapasitas daerah dalam menurunkan resiko bencana	Indeks Kapasitas Daerah		0,6	0,8		0,89		0,9		0,9		
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen, Tahunan, permendagri 18 tahun 2020	66	82	1100000	90	1150000	100	1200000	100	4500000	Satpol PP
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase warga negara yg memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen; Tahunan; Permendagri No. 18/2020	85.71	99.15	2.722.960	100.00	2.750.190	100.00	2.777.691	100.00	10.946.841	BPBD

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	
	Jumlah warga negara yg memperoleh layanan pencegahan dan kesiap siagaan terhadap bencana	Jumlah; Tahunan; Permendagri No. 18/2020	100	400		500		600		600		BPBD
	Persentase warga negara yg memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen; Tahunan; Permendagri No. 18/2020	100	400		500		600		600		BPBD
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	100	100	309913	100	313012,13	100	650000	100	1582838,13	Dinsos
Tujuan 5.3. Meningkatkan Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan			66,08		68,52		70		70		
Sasaran 5.3.1. Meningkatnya pelestarian dan pewarisan kebudayaan	Cakupan Kelestarian Pengembangan dan Pemanfaatan Obyek Kemajuan Kebudayaan		22,5	26,5		27		28,56		28,56		
Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Persentase Penggunaan Bahasa Daerah Tegal digunakan di Sekolah	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	100	100	100.000	100	100.000	100	100.000	100	400.000	disdikbud
Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase kebudayaan dan tradisi yang dikembangkan	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86 Tahun 2017	76,15	87,58	1.054.188	91,39	1.064.729	95,2	1.075.377	99,01	4.238.044	disdikbud
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase seni dan kesenian yang dibina	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86 Tahun 2017	67,15	77,23	300.000	80,59	300.000	83,95	300.000	87,31	1.200.000	disdikbud

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		PD Penanggung Jawab
				target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	target	Rp000	
Program Pembinaan Sejarah	Persentase sejarah yang terdokumentasikan	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86 Tahun 2017	68,79	79,11	100.000	82,55	100.000	85,99	100.000	89,43	350.000	disdikbud
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Terlestariannya Cagar Budaya	Persen; Tahunan; Permendagri No.18 Tahun 2020	45,83	52,70	1.881.630	54,99	1.900.446	57,28	1.919.451	59,57	7.564.527	disdikbud
Program Pengelolaan Permuseum	Persentase museum yang dikelola	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86 Tahun 2017	100	100	340.000	100	350.000	100	360.000	100	1.375.000	disdikbud

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021